

sinergi

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH



**Lahirnya Regulasi Perencanaan dan
Pemrograman Perkuat Pembangunan
Infrastruktur PUPR Berbasis Pengembangan Wilayah**

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR

bpiw.pu.go.id



Edisi 58 | Mei - Juni 2022

Tim Penyusun

Pelindung:

Rachman Arief Dienaputra

Penanggung Jawab:

Iwan Nurwanto

Penasihat Redaksi:

Benny Hermawan

Hari Suko Setiono

Kuswardono

Manggas Rudy Siahaan

Pemimpin Redaksi:

Setyo Purnomo

Redaktur Pelaksana:

Tiara Titi Kartika

Penyunting/Editor :

Bernadi Haryawan

Hasna Widiastuti

Zaldy Sastra

Entatarina Simanjuntak

Doedoeng Zenal Arifin

Shovich

Dita S.N.A Diliiani

Tommy Aramanda Hutasuhut

Nicholas

Mutri Batul Aini

Azim Al Haqy Hakim

Nabilatul Arifah

Alfin Nurus Subkhi

Desain Grafis:

Rasyid Pranawa

Fotografer:

Daris Anugrah

Hendra Djamal

Sekretariat:

Untung Priyono

Diterbitkan oleh:

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)

Kementerian PUPR



SIGAP MEMBANGUN NEGERI



Salam Sinergi

Pembaca yang terhormat.

Buletin Sinergi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memasuki edisi 58 Mei-Juni 2022. Edisi kali ini mengangkat tema "Lahirnya Regulasi Perencanaan dan Pemrograman Perkuat Pembangunan Infrastruktur PUPR Berbasis Pengembangan Wilayah". Tema ini dibahas pada rubrik Topik Utama.

Pada rubrik Wawancara menghadirkan Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian PUPR, Ir. Edy Juharsyah, M.Tech. Rubrik ini membahas beberapa hal, diantaranya terkait sinkronisasi penyusunan program tahunan hingga penganggaran infrastruktur PUPR yang kolaboratif, mendukung pengembangan infrastruktur wilayah.

Rubrik Perspektif diisi dengan beberapa tulisan dari narasumber terkait tema Topik Utama, yakni *Aessor* Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama, Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Prof. Dr. Ir. Anita Firmanti, M.T., Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan, Ir. Edward Abdurrahman, M.Sc., dan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Bina Marga Cipta Karya, Pandu Gunadi Atmosukarto, S.T., MUM.

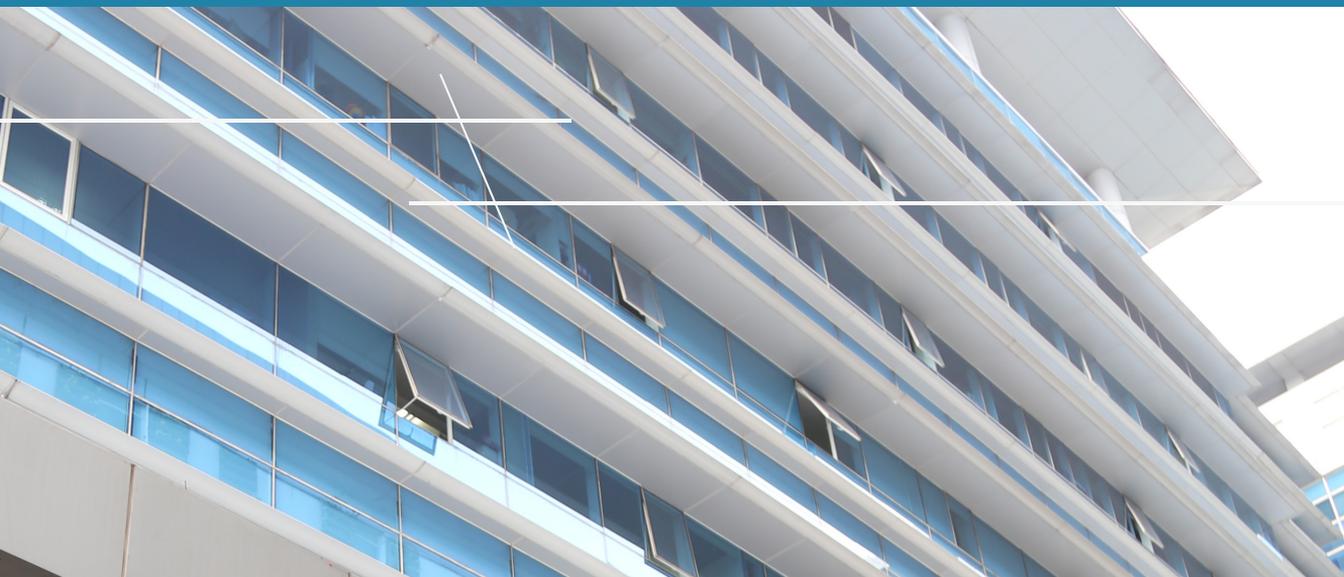
Narasumber lainnya yang memberikan pandangannya pada rubrik tersebut adalah Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Ir. Miftachul Munir, M.T., Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Ir. Birendrajana, M.T., dan Sub Koordinator Hukum, Bagian Hukum Kerja Sama Komunikasi Publik, Sekretariat BPIW Kementerian PUPR, Rahindro, S.Sos, M.Eng., MURP.

Rubrik Warta BPIW membahas mengenai Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Sulawesi Utara Guna Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi. Kegiatan Bulan Kepatuhan yang dilaksanakan Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional ditampilkan pada rubrik Sorot. Pengalaman dan pekerjaan yang dilakukan Koordinator Evaluasi, Pusat Pengembangan infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW Kementerian PUPR, Djuang Fadjar Sodikin, S.T., M.T., Ph.D., dibahas pada rubrik Sosok.

Rubrik *regular* juga tetap dihadirkan, antara lain Info Pengembangan Wilayah, Ulasan Berita, BPIW Muda, dan *Review*. Disamping itu ada beberapa rubrik ringan yang menghiasi Buletin Sinergi seperti Tips, Plesiran, Serba-serbi, Kuis, dan Pesan Pembaca.

Kami berharap seluruh informasi yang ditampilkan pada edisi ini dapat menambah wawasan para pembaca terkait perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dan pengembangan wilayah.

Pemimpin Redaksi



daftar isi



- 6** **Topik Utama**
Permen PUPR 6/2022
Perkuat Perencanaan
dan Pemrograman
Pembangunan
Infrastruktur Berbasis
Pengembangan
Wilayah



- 12** **Wawancara**
Ir. Edy Juharsyah, M.Tech.
BPIW-Biro PAKLN Berbagi Peran

- 14** **Perspektif**
Prof. Dr. Ir. Anita Firmanti, M.T.
Mempertajam Analisis BPIW
Untuk Efektifitas
Pembangunan Infrastruktur
dalam Mendukung Indonesia
Sejahtera 2045



- 18** **Perspektif**
Ir. Edward Abdurrahman, M.Sc.
Regulasi Perencanaan dan
Pemrograman Infrastruktur PUPR
dalam Penyelenggaraan Perumahan

- 23** **Perspektif**
Pandu Gunadi Atmosukarto, S.T., MUM
Regulasi Infrastruktur PUPR Dorong
Pemerataan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman



- 28** **Perspektif**
Ir. Miftachul Munir, MT
Kebijakan Penyelenggaraan
Infrastruktur Bidang Jalan dan
Jembatan



SINERGI

Edisi Mei - Juni 2022

Perspektif

31

Ir. Birendrajana, M.T.
Regulasi Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR Diharapkan Mempercepat Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air



38

Warta BPIW

Infrastruktur Dorong Pengembangan Pariwisata BPIW Pacu Percepatan Pembangunan di KSPN

53

BPIW Muda

Isma Aini, S.T
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Melalui Pembangunan Infrastruktur



58

Sorot

Djuang Fadjar Sodikin, S.T., M.T., Ph.D.
Bekerja Dengan Tim Harus Saling Percaya dan Saling Dukung

Permen PUPR 6/2022 Perkuat Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pengembangan Wilayah

Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR akan semakin akuntabel. Hal ini sejalan dengan kesepakatan dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan ditetapkannya Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR.

Akuntabilitas Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR

Bila dibaca pada konsideran menimbang pada Permen tersebut, menurut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW Kementerian PUPR, Benny Hermawan ada dua semangat yang ingin dicapai. Pertama, semangat untuk penguatan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR, sebagai upaya mewujudkan infrastruktur PUPR yang handal dalam mendukung target-target pemerintah dan percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur PUPR. Kedua, semangat agar perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dilaksanakan secara akuntabel.

Peningkatan akuntabilitas ini merupakan tindak lanjut rekomendasi KPK dalam meningkatkan keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program infrastruktur PUPR. Hal tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Tindak Lanjut Kajian Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan antara Tim Deputi Bidang Pencegahan KPK dengan Ditjen Bina Marga, Ditjen Bina Konstruksi, dan BPIW Kementerian PUPR pada tahun 2019. Melalui terbitnya Permen ini, diharapkan di masa depan potensi penyimpangan dapat dicegah dari mulai tahapan perencanaan.

"Permen ini merupakan milik seluruh insan PUPR, khususnya seluruh kerabat perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR. Selaku bagian dari kerabat perencanaan dan pemrograman tersebut,



“ Permen ini tidak hanya mengatur proses perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR yang dilaksanakan melalui proses teknis/teknokratis dengan instrumen RPIW, tetapi juga melalui proses praktis dialog antar K/L dan pemda terkait dalam mendukung prioritas-prioritas nasional atau target-target pemerintah. Dalam hal ini, ujungnya dituangkan dalam kesepakatan bersama, dimana hal-hal teknis berbasis pendekatan pengembangan wilayah sebagai landasannya. ”

kami siap melaksanakan amanat-amanat dalam Permen”, ujar Benny saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu yang lalu.

Permen ini tidak hanya mengatur proses perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR yang dilaksanakan melalui proses teknis/teknokratis dengan instrumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), tetapi juga melalui proses praktis dialog antar K/L dan pemda terkait dalam mendukung prioritas-prioritas nasional atau target-target pemerintah. Dalam hal ini, ujungnya dituangkan dalam kesepakatan bersama, dimana hal-hal teknis berbasis pendekatan pengembangan wilayah sebagai landasannya.

Secara umum, Permen ini mengatur dua hal utama. Pertama, amanat terkait perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR dilakukan berdasarkan RPIW yang disusun oleh BPIW. Kedua, amanat untuk menyiapkan program tahunan yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan koordinasi, yaitu forum Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional (Konreg), dan Penyusunan Renja (Rencana Kerja).

RPIW sebagai Platform Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR

Pada prinsipnya, Permen PUPR No. 6 Tahun 2022 mengamanatkan pembangunan infrastruktur PUPR dilaksanakan berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah guna menghasilkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR. Di tahap perencanaan, disusun RPIW yang berisi arah kebijakan, profil wilayah dan potensi daerah serta profil dan kinerja infrastruktur, permasalahan dan isu strategis, skenario pengembangan wilayah, analisis kebutuhan infrastruktur, dan rencana aksi pembangunan infrastruktur.

"RPIW meskipun ada kata "RENCANA", mohon dipahami bukan dimaksudkan MENAMBAH berbagai dokumen *plan plan plan plan* yang sudah ada" ujar Benny.

Penyusunan RPIW mengacu dan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan yang jumlahnya sangat banyak. Secara spasial, terdapat dokumen rencana tata ruang yang bersifat administratif seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota serta

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah RPIW

- a Arah Kebijakan
- b Profil Wilayah dan potensi daerah serta profil dan kinerja infrastruktur
- c Permasalahan dan isu strategis
- d Skenario pengembangan Wilayah
- e Analisis kebutuhan infrastruktur
- f Rencana aksi pembangunan infrastruktur

Pasal 4 PermenPUPR No. 6/2022

rencana tata ruang yang bersifat fungsional yaitu RTR kawasan strategis nasional untuk wilayah metropolitan, pariwisata nasional, dan sebagainya.

Selain itu, terdapat juga dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dari sisi sektoral, terdapat perencanaan sektoral yaitu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS), Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN), dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), dan sebagainya.



Menteri PUPR memberi kata sambutan pada pembukaan Rakorbangwil 17 Februari 2022
Sumber : Birkom PUPR

Di lingkungan Kementerian PUPR juga terdapat berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional, Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (RP2KP). Semua dokumen perencanaan tersebut tentunya selain menggunakan pendekatan teknis sektoral juga mempertimbangkan aspek kewilayahan.

Instrumen RPIW, menurut hemat kami, sejatinya menjadi *platform* yang menjembatani berbagai dokumen perencanaan tadi ke dalam rencana aksi pengembangan infrastruktur PUPR jangka menengah sampai tahunan. RPIW ini menjadi masukan kawasan-kawasan yang diprioritaskan dan memberikan rekomendasi fungsi kawasan yang didukung, dimana (lokasi), kapan (kerangka waktu), volume (indikasi), dan biaya (indikasi) intervensi infrastruktur PUPR yang paling memberikan manfaat. Dalam konteks ini, manfaat yang dimaksud sesuai Permen adalah dalam rangka mewujudkan infrastruktur PUPR yang handal dalam mendorong pengembangan wilayah dan percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur PUPR.

Pengenalan perilaku, prakiraan kecenderungan arah pengembangan wilayah berikut dinamika lingkungan strategis yang mempengaruhi wilayah menjadi kunci dalam RPIW ini. "Saya sering membayangkan bagaimana pengusaha terkenal seperti Ciputra, Jababeka, Sinarmas Land, dan lain-

lainnya memutuskan arah investasi mereka. Besaran investasi mereka sangat besar, tentunya mungkin mereka juga sudah hitung berbagai resiko dan mitigasinya agar investasinya dapat membangkitkan keuntungan perusahaan. Bahkan mungkin dalam beberapa hal, ada upaya-upaya mengelola prakiraan dan dinamika lingkungan strategis tersebut agar tujuan-tujuan investasi tercapai. Ini yang harapannya bisa di replikasi hanya dalam perspektif untuk kepentingan masyarakat secara luas yang terukur dan tujuan-tujuan pengembangan wilayah" ujar Benny.

RPIW sebagai *platform* keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR ini seyogyanya juga mempertimbangkan berbagai kecenderungan-kecenderungan yang sedang dan akan terjadi. Beberapa yang sering dibicarakan yaitu:

- a). Kecenderungan digitalisasi di berbagai bidang yang akan mempengaruhi pergerakan distribusi barang dan orang, termasuk di dalamnya *smart-smart development* yang mempengaruhi pengembangan permukiman;
- b). Kecenderungan untuk adopsi ekonomi sirkular seiring dengan prinsip-prinsip berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. serta;
- c). Kecenderungan jumlah penduduk di perkotaan yang semakin meningkat sementara kontribusi kawasan perkotaan sebagai mesin pertumbuhan belum sebaik kontribusi perkotaan di negara-negara tetangga.

Satu hal yang penting dari RPIW ini, bagaimana agar RPIW yang sejatinya komprehensif menjadi sesuatu yang tetap menarik, sederhana sehingga mudah



Menteri PUPR dan Menteri Investasi/Kepala BKPM berdiskusi bersama mengenai pembangunan infrastruktur mendukung pengembangan pusat-pusat ekonomi di Pembukaan Rakorbangwil awal Februari lalu.
Sumber : Birkom PUPR

RPIW ini menjadi masukan kawasan-kawasan yang diprioritaskan dan memberikan rekomendasi fungsi kawasan yang didukung, diimana (lokasi), kapan (kerangka waktu), volume (indikasi), dan biaya (indikasi) intervensi infrastruktur PUPR yang paling memberikan manfaat.

dipahami dan meyakinkan sehingga para pengambil kebijakan khususnya pimpinan di Kementerian PUPR setuju melakukan intervensi infrastruktur PUPR. Sebagai *input* Rakorbangwil, rekomendasi RPIW juga diharapkan dapat meyakinkan semua pemangku kepentingan agar mendukung keterpaduan pembangunan infrastruktur yang terpadu lintas K/L, lintas pemerintah daerah dan lintas wilayah.

Dalam konteks kebutuhan sampai tahun 2024, RPIW digunakan untuk mempertajam dan menyintesakan dokumen perencanaan-perencanaan yang sudah ada, agar PUPR secara maksimal berkontribusi pada pencapaian target-target pemerintah. Selain menjadi standar rekomendasi *input* intervensi program infrastruktur PUPR yang berbasis pengembangan wilayah, RPIW ini menjadi *platform* dari berbagai dokumen perencanaan yang ada untuk dijabarkan ke dalam program tahunan.

Untuk kebutuhan perencanaan pembangunan infrastruktur pada periode berikutnya, RPIW diharapkan menjadi *input* materi teknis penyusunan rencana pembangunan nasional jangka panjang dan menengah. Sementara penyusunan program tahunan dilakukan berdasarkan memorandum program yang berasal dari rencana aksi RPIW, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pembahasan dalam Rakorbangwil dan forum-forum perencanaan dan pemrograman lainnya. RPIW memiliki periode waktu

10 (sepuluh) tahun, sehingga diharapkan tidak hanya akan menjadi pedoman dalam merumuskan program pembangunan infrastruktur PUPR dengan skenario pengembangan wilayah yang ditetapkan, namun juga dapat memberikan masukan arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Renstra Kementerian PUPR berikutnya.

Dalam penyusunannya, Unor Teknis di lingkungan Kementerian PUPR memberikan masukan teknis terhadap RPIW sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, RPIW juga dibahas lintas Kementerian/Lembaga terkait.

"Ke depan, saya berharap hasil dari RPIW dapat merekomendasikan proyek-proyek utama (*major project*) Infrastruktur PUPR yang mampu mengukit pengembangan wilayah. Rekomendasi *major project* ini mungkin bisa menjadi cikal bakal tambahan peran Kementerian PUPR sebagai *developer* pemerintah di masa mendatang. Tentunya *developer* yang memperjuangkan kepentingan dan manfaat nilai tambah bagi publik secara luas," tambah Benny.

Di samping itu, tidak menutup kemungkinan juga ke depannya hasil RPIW akan turut mewarnai rencana pengembangan wilayah lainnya. Bahkan, implementasi RPIW berupa program pembangunan infrastruktur PUPR



dapat membentuk ruang wilayah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh *the founding fathers* PUPR dengan berbagai *initial development* yang menjadi embrio pembangunan wilayah, seperti di kawasan transmigrasi, IKN, dan sebagainya.

Pemrograman Tahunan melalui Rakorbangwil, Konreg, dan Penyusunan Renja

Penyusunan program infrastruktur PUPR tahunan dimulai dari Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil). Rakorbangwil dilaksanakan pada bulan Oktober (T-2) untuk membahas program tahunan N+1. Melalui pelibatan Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah provinsi dalam Forum tersebut, maka isu-isu strategis dan kebutuhan dukungan infrastruktur dapat diidentifikasi dan dipetakan sejak awal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak dan target-target yang ingin dicapai secara nasional.

Dalam Forum tersebut, Kementerian PUPR bersama-sama dengan K/L dan pemerintah daerah provinsi akan berkomitmen untuk memberikan dukungan program keterpaduan pada kawasan prioritas yang disepakati bersama. Untuk itu, Rakorbangwil Bidang PUPR akan menghasilkan kesepakatan kawasan prioritas yang memiliki dampak signifikan terhadap target-target pemerintah dan siap didukung oleh infrastruktur PUPR yang terpadu dengan sektor lain. Sasaran berikutnya yaitu program keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR yang merupakan program pembangunan infrastruktur PUPR N+1 yang terpadu dan sinkron dengan perencanaan serta

program Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah pengampu kawasan prioritas tersebut.

Hasil kesepakatan Rakorbangwil akan ditajamkan oleh Unit Organisasi (Unor) Teknis (Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan) sebagai bahan dalam Konreg Kementerian PUPR. Selain itu, hasil dari Rakorbangwil dan Konreg juga menjadi *input* dalam pembahasan forum-forum perencanaan dan pemrograman lainnya, seperti pada Rakor Gubernur yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Rakortekrenbang (Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pembangunan) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan Musrenbangnas (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional).

Ke depan, setelah RPIW ditetapkan, Rakorbangwil juga diharapkan membahas *major-major project* infrastruktur PUPR yang memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan nasional. *Major project* tersebut diharapkan dapat menggerakkan kegiatan perekonomian dalam suatu wilayah secara signifikan. *Major project* tersebut disepakati Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah terkait sebagai laboratorium pemrograman dengan infrastruktur PUPR sebagai pengungkit utama.

Tahapan penyusunan dan sinkronisasi program berikutnya yaitu Konsultasi Regional (Konreg) yang akan menghasilkan rancangan program pembangunan infrastruktur PUPR. Dalam penentuan rancangan program, *readiness criteria* merupakan indikator utama



Kepala BPIW saat memberikan pengantar dalam sosialisasi Permen No. 6 tahun 2022.
Sumber : Kompu BPIW

Ketentuan Penambahan Kegiatan pada program infrastruktur PUPR selama proses Pemrograman

Penambahan kegiatan pada program infrastruktur PUPR dapat disebabkan: kebijakan nasional baru dan/atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau direktif Menteri.

Skema Penambahan Kegiatan



Kriteria Usulan Penambahan Kegiatan

Pengkajian usulan dilakukan untuk memastikan usulan memenuhi kriteria:

- mendukung keterpaduan fungsi infrastruktur PUPR yang sudah terbangun.
- sesuai dengan sasaran prioritas pengembangan Kawasan.
- mendukung kebijakan strategis nasional.
- mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mendesak.

Penambahan Kegiatan akan ada pada saat pembahasan Rakorbangwi, Konsultasi Regional, Rapat Teknis Penyusunan Rencana Renja

yang memperhatikan kesiapan program/kegiatan untuk dianggarkan pada kawasan-kawasan prioritas (lahan, FS, DED, dokumen lingkungan, dsb). Rancangan program pembangunan infrastruktur PUPR tahunan sebagai hasil Konreg akan dijadikan dasar pengusulan Pagu Indikatif Kementerian PUPR yang disampaikan oleh Menteri PUPR kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja), Unor Teknis menyusun rancangan awal Renja menjadi Renja program infrastruktur Kementerian PUPR berdasarkan pagu indikatif Kementerian PUPR. Rancangan Renja tersebut kemudian dilakukan sinkronisasi dan rapat teknis yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal. Sinkronisasi dilaksanakan melalui pertemuan para pihak (*Multilateral Meeting*), Musrenbangnas, dan pertemuan tiga pihak (*Trilateral Meeting*). Rancangan Renja hasil sinkronisasi kemudian dimutakhirkan menjadi Renja sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas mengenai pagu anggaran K/L. Selanjutnya, program beserta alokasi anggaran diproses lebih lanjut hingga menjadi DIPA dan RKA-K/L.

Tindak Lanjut Ke depan

Permen PUPR No. 6 Tahun 2022 juga berupaya lebih adaptif terhadap kebutuhan perencanaan dan pemrograman yang sifatnya dinamis, yang dipengaruhi oleh dinamika kebijakan nasional dan perubahan lingkungan strategis.

Regulasi ini mengatur perubahan/penambahan kegiatan infrastruktur PUPR yang merupakan kebijakan nasional baru, kebijakan nasional yang sifatnya mendesak, dan direktif Menteri PUPR pada setiap tahapan penyusunan dan sinkronisasi program tahunan.

Penambahan/perubahan kegiatan tersebut dilakukan dengan mengikuti koridor-koridor yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan pencapaian target-target pemerintah.

Kriteria yang dijadikan dasar dilakukan penambahan/perubahan kegiatan tersebut yaitu:

a). mendukung keterpaduan fungsi infrastruktur PUPR yang sudah terbangun,

b). sesuai dengan sasaran prioritas pengembangan kawasan,

c). mendukung kebijakan strategis nasional, dan/atau

d). mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mendesak.

Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan dinamika pemrograman dapat diakomodasi sekaligus memenuhi target pembangunan di akhir periode pelaksanaan dengan mengedepankan pendekatan pengembangan wilayah dan keterpaduan lintas sektor di kawasan prioritas. **(Benny/Mangapul/Alis)**

Ketentuan Perubahan Kegiatan pada program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja)

Perubahan kegiatan pada program tahunan dalam Rencana Kerja dapat disebabkan: kebijakan nasional baru dan/atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau direktif Menteri.

Skema Perubahan Kegiatan



Kriteria Usulan Perubahan Kegiatan

Pengkajian usulan dilakukan untuk memastikan usulan memenuhi kriteria:

- mendukung keterpaduan fungsi infrastruktur PUPR yang sudah terbangun.
- sesuai dengan sasaran prioritas pengembangan Kawasan.
- mendukung kebijakan strategis nasional.
- mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mendesak.

dituangkan
Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Sesuai dengan ketentuan Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan

BPIW-Biro PAKLN Berbagi Peran Memastikan Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur PUPR



Ir. Edy Juharsyah, M.Tech.

Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri

Mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tidak akan terlepas dari peranan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN) Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Seperti apa pembagian peranan keduanya. Berikut wawancara Buletin Sinergi BPIW dengan Kepala Biro PAKLN Setjen Kementerian PUPR, Ir. Edy Juharsyah, M.Tech

Dengan adanya regulasi tentang perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR yang telah ditetapkan Permen PUPR No. 6 tahun 2022, seperti apa pembagian peran BPIW dengan Biro PAKLN?

Dalam tahapan perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR, BPIW memiliki peran sebagai penyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), yang pada gilirannya akan dijadikan sebagai acuan proses penyusunan program tahunan dan arahan prioritas Kawasan tahunan. Selanjutnya dalam tahapan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dilaksanakan penyusunan program tahunan, di mana BPIW memiliki peran sebagai penyelenggara Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) yang menghasilkan kesepakatan program keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR.

Kemudian, program keterpaduan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan bahan pembahasan Konsultasi Regional (Konreg) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro PAKLN. Pada akhirnya, Sekretariat Jenderal c.q. Biro PAKLN melakukan koordinasi dengan Unit Organisasi Teknis dalam rangka sinkronisasi penyusunan Rencana Kerja dan rapat teknis yang mengacu kepada hasil Konreg.

Bagaimana kolaborasi yang dilakukan BPIW dan Biro PAKLN dalam proses penyusunan program tahunan untuk mendukung prioritas alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR?

Konreg adalah forum konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi tahunan Kementerian PUPR dalam rangka pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR. Dalam pelaksanaan Konreg, Sekretariat Jenderal c.q. Biro PAKLN melibatkan BPIW, Unit Organisasi Teknis, dan pemerintah daerah provinsi. Di dalam Konreg, BPIW memiliki peran aktif sebagai moderator desk pembahasan yang dapat mengarahkan agar materi pembahasan tetap dalam lingkup program keterpaduan hasil Rakorbangwil.

Selain itu, BPIW, Biro PAKLN, dan Unit Organisasi Teknis secara bersama-sama mengikuti forum perencanaan pembangunan tahunan lintas sektor, seperti Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) dan Musyawarah Perencanaan

Mempertajam Analisis BPIW Untuk Efektifitas Pembangunan Infrastruktur dalam Mendukung Indonesia Sejahtera 2045



Prof. Dr. Ir. Anita Firmanti, M.T.

Aessor SDM Aparatur Ahli Utama Pusat Pengembangan Talenta
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian PUPR

BPIW punya peran untuk menjadi regional *planning* di Kementerian PUPR. Amanah ini sudah mulai dijalankan dan tentu saja menggeser tugas-tugas yang dulu diterjemahkan di tupoksi lama yang waktu itu berdasarkan beberapa hal seperti kawasan perkotaan dan kawasan strategis. Dalam pelaksanaannya tupoksi lama ini kadang terjadi irisan, yakni satu lokasi menjadi target pihak lain dan hal ini tidak efektif.

Namun sekarang, kawasan yang ditangani BPIW berlandaskan regional atau per area, jadi tidak ada satupun lokasi yang menjadi penanganan dua unit di BPIW. Misalnya Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I menangani perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

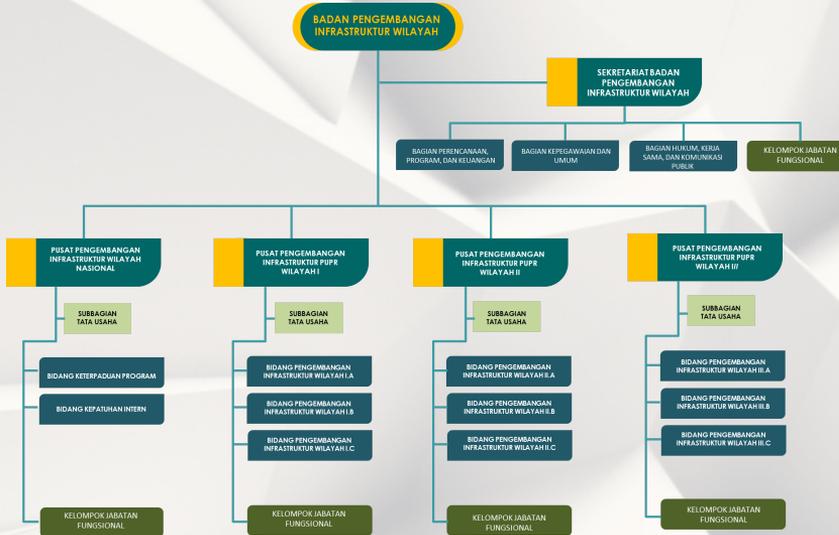
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I ini, ada tiga bidang yang menangani beberapa propinsi di Sumatera dan Kalimantan. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IA menangani Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IB menangani Provinsi Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Selanjutnya, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IC menangani lima provinsi di Pulau Kalimantan yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Setiap unit dibawahnya, ruang lingkup dari area yang ditangani lebih kecil.

Sedangkan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah Nasional tugasnya antara lain menghasilkan konsep-konsep kebijakan, norma, standar, pedoman, dan kriteria yang harus dihasilkan.

Lalu apa yang harus dilakukan teman-teman di BPIW?, tentu saja harus bisa mengenali karakter wilayahnya. Selain itu harus mengetahui yang dilakukan Kementerian/Lembaga lain atau pemerintah pada wilayah tersebut. Misalnya pemerintah pusat menetapkan kawasan itu untuk industri strategis nasional. Sehubungan dengan itu BPIW harus paham, bila dikembangkan industri strategis pada kawasan tersebut. Pemahaman itu terkait pra syarat dari industri strategis. Misalnya bahan bakunya didatangkan dari mana dan pekerjaanya seperti apa. Bukan berarti

“ BPIW harus bisa mengenali karakter wilayahnya. Selain itu harus mengetahui yang dilakukan Kementerian/Lembaga lain atau pemerintah pada wilayah tersebut. Misalnya pemerintah pusat menetapkan kawasan itu untuk industri strategis nasional. ”



Sumber : bpiw.pu.go.id

harus mengetahui secara detail, tapi paling tidak pemahaman tentang pengembangan wilayahnya semakin banyak diketahui para staf BPIW. Lalu, BPIW juga harus mengetahui kebijakan apa yang diperlukan untuk mendukung industri strategis tersebut.

BPIW dapat menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Jadi dari "BerAKHLAK" ini ada kolaborasi yang menjadi tugas yang harus dilakukan BPIW. Jadi BPIW tidak boleh hanya berpikir untuk Kementerian PUPR saja, tapi juga berkolaborasi dengan pihak lain seperti Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

BPIW sebagai penghubung semua Stakeholder pembangunan infrastruktur PUPR.

Saat ini telah diberlakukan Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Permen tersebut bukan

“ Pada dasarnya BPIW harus bisa menjadi *guidance unit organisasi (unor)* Kementerian PUPR yang membangun infrastruktur yakni Ditjen SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Melalui perencanaan dan pemrograman yang dibuat BPIW, maka dapat melibatkan empat sektor tersebut sesuai dengan kebutuhan di lapangan dari hasil analisis yang dilakukan BPIW.

untuk kementerian PUPR saja, tapi lebih luas lagi untuk seluruh *stakeholder* terkait infrastruktur. Kemudian, dengan adanya Permen itu, BPIW harus bisa menjadi penghubung semua *stakeholder* yang bekerja pada satu wilayah dengan Kementerian PUPR.

Jadi misalkan di sebuah kawasan ada kawasan industri strategis yang membutuhkan air yang tidak sedikit. Tentu saja dalam perencanaan, maka perlu keterlibatan Direktorat Sumber Daya Air (SDA). Tapi tidak hanya Ditjen SDA, perlu juga disinkronkan dengan Kementerian/ Lembaga lain, misalnya dengan Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah, perencanaan seperti apa yang mereka lakukan di kawasan tersebut.

Pada dasarnya BPIW harus bisa menjadi *guidance unit organisasi (unor)* Kementerian PUPR yang membangun infrastruktur yakni Ditjen SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Melalui perencanaan dan pemrograman yang dibuat BPIW, empat unor tersebut perlu dilibatkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan hasil analisis yang dilakukan BPIW. Peran sebagai *guidance* harus bisa dilakukan BPIW dan bila menjadi *guidance*, maka harus menjadi *leader*.

Untuk itu kompetensi sumber daya manusia (SDM) BPIW harus ditingkatkan untuk lebih memahami karakter suatu daerah. Caranya dengan melakukan training dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Melalui *training* yang dilakukan tersebut, dapat diketahui intervensi infrastruktur seperti apa yang akan dilakukan. Contohnya, bila kawasan suku Badui akan dibangun industri. Hal itu akan ada pengorbanan yang besar, karena di sana kawasan heritage. Karakter daerah seperti itu harus diketahui, karena tidak semua kawasan itu sama karakternya.

BPIW dapat memberikan masukan, bila suatu kawasan banyak dibangun jalan, maka melalui kajian

yang dilakukan, dapat dipertajam dengan memberikan intervensi infrastruktur lain seperti perbaikan sistem penyediaan air minum dan pengendalian air.

Dalam melakukan perencanaan dan pemrograman BPIW bisa melakukan kerja sama dengan beberapa pihak, salah satunya dengan Kementerian PPN/ Bappenas. Informasi

yang didapat dari hasil koordinasi dengan kementerian tersebut, dapat diinformasikan ke Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri (PAKLN) maupun ke unit organisasi (unor) yang melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Perkuatan Analisis BPIW Melalui Peningkatan Kapasitas SDM.

Insan BPIW harusnya memberikan "resep-resep" atau kajian yang bersifat regional pada suatu kawasan yang bisa menjadi acuan bagi Biro PAKLN maupun unor-unor. Output dari infrastruktur yang dibuat Ditjen Bina Marga misalnya, tidak hanya tanggung jawab unor tersebut saja, tapi juga jadi tanggung jawab BPIW, karena BPIW memperhitungkan semua kajiannya sebelum infrastruktur itu dibangun. Bila sudah dilakukan BPIW, maka perlu diperkuat kemampuan untuk melakukan kajian tersebut.

“Apalagi saat ini telah diberlakukan Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 6 tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Permen tersebut bukan untuk kementerian PUPR saja, tapi lebih luas lagi untuk seluruh stakeholder terkait infrastruktur dan dengan adanya Permen itu, BPIW harus bisa menjadi penghubung semua stakeholder yang bekerja pada satu wilayah dengan Kementerian PUPR.”

Bagi Peran dalam Pembangunan Infrastruktur



Pejabat Struktural

- Tugas Utama:

Memastikan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia berjalan sesuai dengan tugas yang diamanahkan oleh ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik yang efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya tujuan negara.

- Fokus Utama

Kepemimpinan dalam implementasi manajemen SDM serta penerapan *smart management*

Pejabat Fungsional

- Tugas Utama

Berperan aktif dalam pengelolaan kegiatan mulai dari perencanaan, perancangan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta memiliki kompetensi mumpuni yang ditunjukkan dengan pencapaian jenjang jabatan dan **sertifikasi keahlian** yang dimilikinya.

- Fokus Utama

Menjadi **Technical Assurance** dan **Quality Assurance** dalam pembangunan infrastruktur mulai dari tahapan survei, investigasi, *land acquisition*, konstruksi, operasi dan pemeliharaan.



07

Sumber : BPSDM

Dalam melakukan kajian, tidak hanya membutuhkan disiplin ilmu planologi semata, tapi juga ilmu lain seperti ekonomi dan geografi. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan semua hal yang bersifat teknis ditangani jafung. Sedangkan jabatan yang struktural bersifat manajemen. Pejabat struktural ini yang membagi tugas dan menerapkan disiplin pegawai.

Jabatan Fungsional di BPIW bertanggung jawab untuk membuat perencanaan yang sesuai kondisi riil dan dapat memastikan hasil perencanaannya tidak jauh dari kenyataan yang ada. Jadi, peranan jafung ini sangat diperlukan dan perlu konsistensi sehingga *output* dari kerja yang dilaksanakan jafung, benar-benar terlihat nyata.

Bila peranan jafung sudah konsisten dilaksanakan, maka kajian suatu wilayah dilakukan dengan melibatkan para jafung mulai dari Jafung Ahli Pertama hingga Ahli Utama. Contohnya, terkait perencanaan wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang, Jafung Pertama yang memiliki *background* pendidikan planologi, ekonomi, dan teknik sipil dapat dilibatkan. Kemudian untuk perencanaan wilayah Jawa Tengah dan Jogja, melibatkan jafung yang lebih tinggi, yakni Jafung Ahli Muda.

Namun bila analisisnya sudah sampai pada manfaat infrastruktur PUPR seperti manfaat jalan dan jembatan dalam mendongkrak perekonomian masyarakat, penyediaan air baku dengan kapasitas tertentu, penataan permukiman, dan penyediaan



Anita Firmanti saat menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR
Sumber : setjen.pu.go.id

perumahan, itu melibatkan Jafung Utama. Bila semua pembagian tugas jafung sudah jelas, maka akan timbul perencanaan yang *sustainable*.

BPIW Seharusnya Memberikan Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektifitas Pembangunan Infrastruktur Mendukung Indonesia Sejahtera 2045

Analisis yang dilakukan BPIW juga harus dapat membantu mengatasi daerah-daerah yang tertinggal. Dengan perencanaan dan pemrograman yang dibuat BPIW, daerah-daerah tertinggal seperti di Bengkulu, diberikan "suntikan" program pembangunan jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya.

Dalam membuat perencanaan dan pemrograman akan lebih baik memanfaatkan kemampuan SDM yang ada di BPIW, sehingga diharapkan output yang dihasilkan dapat lebih maksimal dan dapat mengefektifkan anggaran yang ada. Saya yakin hal itu bisa dilakukan, mengingat SDM di BPIW memiliki banyak tenaga handal dan dari disiplin ilmu yang berbeda-beda, sehingga dapat menunjang pekerjaan yang diberikan.

BPIW sudah seharusnya menciptakan suatu konsep untuk kebijakan Kementerian PUPR terkait pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Hal ini untuk mendukung Indonesia Sejahtera 2045. Bila banyak direktif yang diberikan misalnya dari Presiden dan DPR RI, maka dikembalikan pada "rohnya" dukungan Kementerian PUPR terhadap pencapaian Indonesia Sejahtera 2045 tersebut.

“*Saya sangat berharap BPIW dapat mengeluarkan “resep-resep” atau hasil rekomendasi atau konsep terkait perencanaan dan pemrograman infrastruktur yang memang cocok untuk diterapkan wilayah-wilayah yang sudah ditentukan. Selain itu “resep” dari BPIW dapat dipergunakan unor-unor. Dengan begitu akan terjadi efektifitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan nasional.*”

Saya sangat berharap BPIW dapat mengeluarkan “resep-resep” atau hasil rekomendasi atau konsep terkait perencanaan dan pemrograman infrastruktur yang memang cocok untuk diterapkan wilayah-wilayah yang sudah ditentukan. Selain itu “resep” dari BPIW dapat dipergunakan unor-unor. Dengan begitu akan terjadi efektifitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan nasional.

Bila BPIW sudah mengeluarkan “resep-resep” tadi, maka BPIW telah bekerja secara optimal, karena produk yang dihasilkan, terutama dipergunakan unor-unor di lingkungan Kementerian PUPR. Apalagi bila perencanaan dan pemrograman yang dibuat BPIW dapat menghemat anggaran.(**)

Regulasi Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR dalam Penyelenggaraan Perumahan



Ir. Edward Abdurrahman, M.Sc.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan

“*Penanganan kawasan permukiman kumuh tidak dapat berjalan apabila tidak dilakukan secara terpadu. Perlu adanya keterlibatan seluruh aspek, tidak hanya dari segi fisik dan lingkungannya saja, tetapi juga dari sisi sosial dan ekonomi.*”

A. Isu Penyelenggaraan Perumahan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, di samping sandang dan pangan. Oleh karena itu, penyediaan rumah untuk masyarakat memerlukan intervensi dari pemerintah dalam merealisasikannya. Saat ini, tingginya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau masih belum diimbangi kemampuan penyediaan, baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun oleh masyarakat sendiri. Secara nasional, kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak dan terjangkau masih relatif besar.

Sebagai gambaran, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau pada tahun 2021 baru sebesar 60,90 persen, walaupun meningkat dari tahun 2019 sebesar 56,51 persen dan tahun 2020 sebesar 59,54 persen.

Rumah tangga dikatakan memiliki akses dan menghuni rumah layak huni, didasarkan pada empat aspek berikut:



Ketahanan Konstruksi



Akses Air Minum



Akses Sanitasi



Luas per Kapita²

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Provinsi

Sumber : bps.go.id

Sesuai dengan Indikator SDGs, komponen luas lantai per kapita rumah layak huni adalah $\geq 7,2$ m² (Bappenas, 2020. Pedoman Pengukuran Capaian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berbasis Hasil (*Outcome*). Jakarta. Pokja PPAS Nasional)

Berdasarkan indikator tersebut dapat dilihat bahwa faktor kelayakan sebuah rumah tidak hanya dari kondisi fisik bangunan rumahnya saja, tetapi juga sebagai salah satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pendukungnya. Selain aspek luasan minimal yang telah disebutkan, perlu juga memperhatikan akses



Permukiman kumuh
Sumber : arsindo.com.

“ Dari target Sejuta Rumah pada tahun 2022, sepanjang periode Januari- Juni 2022 ini Program Sejuta Rumah telah tercapai sebesar 466.011 unit di seluruh Indonesia. Capaian ini terdiri dari 382.162 unit rumah untuk MBR dan 83.849 unit rumah non MBR. ”

jalan yang memadai, sistem drainase, pengolahan air limbah serta sistem persampahan.

Selanjutnya, salah satu permasalahan perumahan dan kawasan permukiman yang perlu segera ditangani adalah pengentasan kawasan permukiman kumuh. Penataan kawasan permukiman kumuh menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya bagi daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pesat.

Karakteristik permukiman kumuh antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/ tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharjo, 1997).

Penanganan kawasan permukiman kumuh tidak dapat berjalan apabila tidak dilakukan secara terpadu. Perlu

adanya keterlibatan seluruh aspek, tidak hanya dari segi fisik dan lingkungannya saja, tetapi juga dari sisi sosial dan ekonomi.

B. Perlunya Keterpaduan dalam Penanganan Kebutuhan Perumahan

Untuk mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau serta penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh, sangat dibutuhkan sinergi dan keterpaduan antar sektor. Dalam praktiknya, upaya penyediaan perumahan sangat terkait dengan sektor-sektor lainnya, seperti aspek pertanahan, tata ruang, kelembagaan, pembiayaan, serta infrastruktur lainnya. Selain itu, penanganan perumahan bukan hanya harus memperhatikan prinsip keterpaduan, melainkan juga perlu mempertimbangkan prioritas dan efektivitas pelaksanaan program penanganan.

Dalam rangka mewujudkan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan

“ Perencanaan melalui pendekatan pengembangan wilayah yang menerapkan prinsip-prinsip keterpaduan tentunya akan menjawab berbagai tantangan dalam penyelenggaraan perumahan. Perencanaan perumahan harus berdasarkan identifikasi yang telah tercantum dalam masterplan yang telah disusun oleh BPIW. ”

“Diharapkan penyusunan kebijakan atau Rencana Strategis Ditjen Perumahan dapat mengacu pada RPIW yang disusun oleh BPIW. Dalam penyusunan RPIW sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), Unit Organisasi Teknis memberikan masukan teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

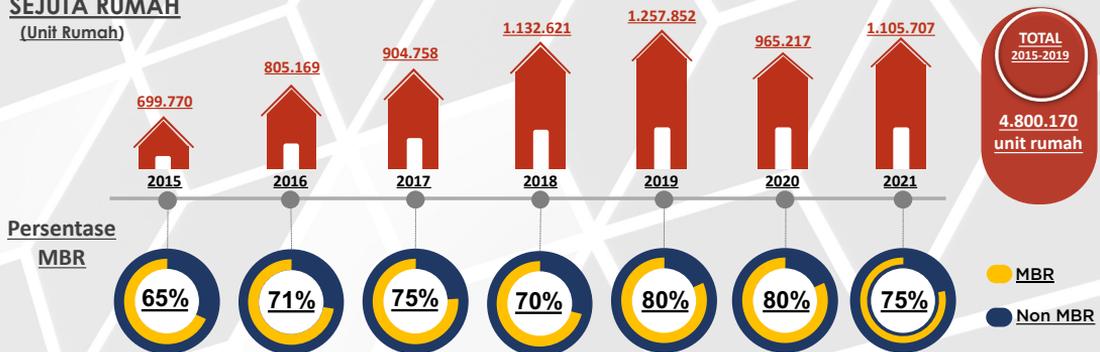
perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Program Sejuta Rumah. Dari target Sejuta Rumah pada tahun 2022, sepanjang periode Januari- Juni 2022 ini Program Sejuta Rumah telah tercapai sebesar 466.011 unit di seluruh Indonesia. Capaian ini terdiri dari 382.162 unit rumah untuk MBR dan 83.849 unit rumah non MBR.

yang telah diatur oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas secara nasional.

Untuk mewujudkan keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal melalui pendekatan pengembangan wilayah, telah diterbitkan Permen PUPR No. 6 tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pemrograman tahunan bidang infrastruktur PUPR.

Perencanaan melalui pendekatan pengembangan wilayah yang menerapkan prinsip-prinsip keterpaduan tentunya akan menjawab berbagai tantangan dalam penyelenggaraan perumahan. Perencanaan perumahan harus berdasarkan identifikasi yang telah

CAPAIAN PROGRAM SEJUTA RUMAH (Unit Rumah)



Terbitnya Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Perencanaan merupakan satu kesatuan yang utuh dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah, yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Perencanaan baik tingkat nasional maupun di daerah dimuat dan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana tahunan. Perencanaan juga termasuk di dalamnya pemrograman dan penganggaran tahunan yang sesuai dengan norma, tata cara, proses dan waktu

tercantum dalam *masterplan* yang telah disusun oleh BPIW.

Dengan demikian penyelenggaraan perumahan akan menjawab berbagai permasalahan yang terdapat pada setiap daerah sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Sebagai contoh keterpaduan antar sektor, dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) serta penanganan kumuh terpadu, Ditjen Perumahan melakukan kolaborasi dengan Ditjen Cipta Karya. Ditjen Perumahan menangani rumah tidak layak huni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sementara penyediaan sanitasi, jalan lingkungan dan air minum oleh Ditjen Cipta Karya.

Sumber : Ditjen Perumahan



Foto Rumah Hunian tetap warga terdampak bencana di Sulawesi Tengah
Sumber : Ditjen Perumahan

Kolaborasi penanganan juga dapat dilakukan dengan Lembaga non-pemerintah, misalnya dengan menggandeng badan usaha atau kerjasama dengan Baznas yang saat ini sedang dilakukan.

Sebagai payung hukum pelaksanaan pemrograman dan penganggaran tahunan di Ditjen Perumahan, telah diterbitkan SE Dirjen Perumahan No. 11 tahun 2011 tentang Pedoman Pemrograman dan Penganggaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan. Sehubungan dengan terbitnya Permen PUPR No. 6 tahun 2022, perlu dilakukan perubahan terhadap SE tersebut untuk mengakomodasi pendekatan pengembangan kewilayahan dan prinsip-prinsip keterpaduan.

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) sebagai Panduan Perencanaan Pembangunan Perumahan

Dalam RPIW telah memuat arah kebijakan, profil wilayah dan potensi daerah dengan penjabaran permasalahan dan isu strategis, skenario pengembangan wilayah, analisis kebutuhan dan rencana aksi pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian diharapkan penyusunan kebijakan atau Rencana Strategis Ditjen Perumahan dapat mengacu pada RPIW yang disusun oleh BPIW. Dalam penyusunan RPIW sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), Unit Organisasi Teknis memberikan masukan teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pemangku kebijakan di Ditjen Perumahan dapat senantiasa berkoordinasi dengan BPIW dan memberikan masukan teknis yang sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan perumahan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Usulan Direktif dalam Pembangunan Perumahan

Dalam alur proses perencanaan program dan anggaran, akan ada dinamika dan perubahan yang membutuhkan penyesuaian. Terutama, apabila ada kebijakan nasional baru dan/atau mendesak yang mengacu pada peraturan atau undang-undang, dan/ atau direktif Menteri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12.

Langkah antisipatif yang telah dilakukan oleh Ditjen Perumahan adalah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar usulan-usulan direktif dapat mengacu kepada arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya usulan-usulan direktif tetap mengikuti mekanisme pengajuan usulan di Ditjen Perumahan yaitu melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU). Sehingga walaupun usulan direktif baru muncul di tahun berjalan (tahun T), proses

“ Usulan-usulan direktif tetap mengikuti mekanisme pengajuan usulan di Ditjen Perumahan yaitu melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU). Sehingga walaupun usulan direktif baru muncul di tahun berjalan (tahun T), proses verifikasi usulan tetap dilakukan melalui SIBARU dan mengikuti prinsip-prinsip yang termuat dalam regulasi yang berlaku. **”**



Foto rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR
Sumber : Kompu BPIW

verifikasi usulan tetap dilakukan melalui SIBARU dan mengikuti prinsip-prinsip yang termuat dalam regulasi yang berlaku.

Percepatan Penyelenggaraan Perumahan

Dengan terbitnya Permen PUPR No. 6 tahun 2022 ini, harapannya seluruh proses perencanaan dan pemrograman di Ditjen Perumahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Penyelenggaraan Perumahan akan lebih tepat sasaran karena dapat menjawab berbagai tantangan dan permasalahan di masing-masing wilayah. Selain itu permasalahan penyelenggaraan perumahan juga akan terselesaikan melalui keterpaduan antar sektor yang menjadi poin utama dari pengaturan dalam Permen tersebut.

Ke depannya, Ditjen Perumahan dapat semakin meningkatkan *bargaining power* dalam proses pemrograman dan penganggaran nasional.

Harapannya, tentu saja sebagai dasar bagi Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam meningkatkan alokasi anggaran bidang perumahan yang selama ini masih kurang diperhatikan.

Dengan meningkatnya kegiatan penyelenggaraan perumahan maka akan meningkat juga keberhasilan Program Sejuta Rumah dan target pengurangan *backlog* serta rumah tidak layak huni. Semoga! (**)



Rumah Layak Huni untuk Masyarakat sebelum Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat
Sumber : Ditjen Perumahan



Rumah Layak Huni untuk Masyarakat sesudah pembangunan di Provinsi Sumatera Barat
Sumber : Ditjen Perumahan

“ Dengan terbitnya Permen PUPR No. 6 tahun 2022 ini, harapannya seluruh proses perencanaan dan pemrograman di Ditjen Perumahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Penyelenggaraan Perumahan akan lebih tepat sasaran karena dapat menjawab berbagai tantangan dan permasalahan di masing-masing wilayah. ”

Regulasi Infrastruktur PUPR Dorong Pemerataan Pengembangan Infrastruktur Permukiman



Oleh

Pandu Gunadi Atmosukarto, S.T., MUM

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman

Pelayanan infrastruktur permukiman merupakan kebutuhan dasar semua orang. Oleh karena itu, Ditjen Cipta Karya berupaya untuk melakukan pemenuhan terhadap infrastruktur permukiman secara universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Di samping itu, infrastruktur permukiman juga memiliki peran strategis dalam menunjang upaya peningkatan ekonomi wilayah, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan hunian. Oleh karenanya, Ditjen Cipta Karya kerap mendapatkan mandat untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional yang bersifat lintas-sektor.

Meskipun demikian, dalam membangun infrastruktur permukiman, kewenangan dan kapasitas pendanaan Ditjen Cipta Karya tidak tak terbatas. Penyelenggaraan infrastruktur permukiman merupakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren atau menjadi urusan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota dengan pembagian kewenangan berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyediaan infrastruktur permukiman merupakan bagian dari upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) daerah dan menjadi urusan wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Namun demikian pemerintah pusat dapat membantu dan memfasilitasi pemenuhan SPM daerah tersebut sepanjang menjadi lokus prioritas dan kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Dinamika penyelenggaraan infrastruktur permukiman yang terjadi sejak tahun anggaran 2020 hingga saat ini juga diwarnai dengan tren penganggaran yang mengalami deviasi cukup signifikan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR maupun Ditjen Cipta Karya akibat pandemi COVID-19.

Sebagian sumber daya dan alokasi anggaran dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman diarahkan untuk mendukung upaya penanganan pandemi sehingga dilakukan realokasi dan *refocusing* penganggaran pembangunan secara masif. Hal ini berdampak pada metode pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan infrastruktur permukiman/relaksasi pelaksanaan kegiatan serta pencapaian target dan *output* kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan infrastruktur permukiman berjalan secara dinamis dalam rangka mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 serta pemerataan pembangunan dalam rangka mengatasi disparitas antar wilayah. Penugasan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden) maupun berdasarkan arahan hasil rapat terbatas, rapat kerja maupun kunjungan kerja Presiden dan Wakil Presiden, yang



Pandu Gunadi Atmosukarto (kiri) memaparkan Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Permukiman TA 2023 pada Maret lalu
 Sumber : Kompu BPIW

pelaksanaannya berkolaborasi dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait serta pemenuhannya menggunakan pendanaan APBN. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi dukungan dan fasilitasi pemerintah pusat dalam pemenuhan terhadap SPM daerah maupun target yang telah direncanakan sebelumnya dalam dokumen Renstra.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan infrastruktur permukiman pada periode 2015-2019, terdapat beberapa infrastruktur permukiman yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat namun belum difungsikan dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan beberapa diantaranya menjadi tidak berfungsi akibat kondisi kelembagaan pengelola di daerah serta anggaran operasional dan pemeliharaan yang kurang memadai dalam mendukung keberfungsian dan keberlanjutan infrastruktur permukiman yang telah dibangun tersebut.

Dengan demikian, maka diperlukan suatu pendekatan yang efektif dan efisien dalam kegiatan perencanaan dan pemrograman yang dapat mengakomodasi dinamika penyelenggaraan infrastruktur permukiman sebagai bagian dari penyelenggaraan dan pengembangan infrastruktur berbasis kewilayahan. Dalam hal ini diharapkan dapat mensinergikan upaya penanganan kegiatan prioritas nasional dengan pengembangan wilayah serta pemenuhan terhadap SPM daerah melalui kolaborasi lintas K/L, lintas unor Kementerian PUPR, lintas pemerintah provinsi, kabupaten/kota, lintas pelaku/PHLN, swasta, dan masyarakat.

Dengan terbitnya Permen PUPR No 6 tahun 2022 tentang Perencanaan Dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka alur perencanaan dan pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR menjadi lebih jelas dan akuntabel khususnya dalam penyusunan program tahunan.

Regulasi ini menekankan proses perencanaan berbasis pengembangan wilayah sehingga diharapkan dapat menjadi acuan bagi Ditjen Cipta Karya dalam menterpadukan perencanaan dan pemrograman infrastruktur permukiman dengan kegiatan perencanaan dan pemrograman lintas K/L, lintas unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, lintas unit kerja di lingkungan Ditjen Cipta Karya, serta lintas pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Keterpaduan perencanaan dan pemrograman sesuai dengan Permen PUPR dimaksud akan dikoordinasikan oleh BPIW melalui dokumen RPIW (kebijakan dan strategi perencanaan pengembangan wilayah serta lokus prioritas penanganan) bersama Biro PAKLN-Setjen Kementerian PUPR (prioritas program dan penganggaran).

Guna mendukung kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program tersebut, Ditjen Cipta Karya telah melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan kegiatan yang dimulai sejak Triwulan III T-2, yang meliputi kegiatan *updating* basis data perencanaan sektoral (SIMSPAM, SIINSAN, SIM BG, SI-SPKP), dilanjutkan dengan penyusunan kerangka pendanaan (KPJM) dan konsolidasi program tahunan (Memorandum Program/

MP Provinsi) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan fasilitasi dan pendampingan dari Pemerintah Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis di masing-masing provinsi (Balai Prasarana Permukiman Wilayah/BPPW). Selanjutnya dilakukan konsolidasi dan koordinasi di tingkat pusat antara BPPW dengan Direktorat Teknis untuk memastikan kesiapan usulan daerah yang akan dibahas dan disepakati bersama dalam forum perencanaan dan pemrograman di tingkat Kementerian.

Selanjutnya, forum perencanaan dan pemrograman di tingkat Kementerian tersebut akan dilaksanakan pada awal Triwulan IV T-2, yang diawali dengan Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) yang merupakan forum komunikasi lintas K/L dan forum komunikasi antar Pemerintah Pusat–Pemerintah Provinsi (Rapat Koordinasi Gubernur/Rakorgub). Kedua forum tersebut menghasilkan kesepakatan Kawasan Strategis Prioritas Penanganan serta Program Infrastruktur PUPR Prioritas termasuk pembahasan terhadap pelaksanaan penugasan prioritas nasional baik yang bersifat lanjutan maupun usulan baru.

Kesepakatan Rakorbangwil akan menjadi masukan dalam pembahasan kegiatan perencanaan dan pemrograman lanjutan yang dilaksanakan pada T-1, yang diawali dengan Forum Konsultasi Regional Kementerian PUPR yang diikuti oleh unit organisasi dan unit kerja teknis beserta unit pelaksana teknis di daerah dan Pemerintah Provinsi. Agenda pembahasan dalam forum ini meliputi sinkronisasi lokus dan kegiatan prioritas nasional hasil Rakorbangwil dengan

hasil sinkronisasi memorandum program tahunan provinsi dan pemenuhan kriteria teknis hasil konsolidasi program pusat dan daerah, sehingga dihasilkan *draft* kesepakatan program tahunan.

Draft kesepakatan program tahunan tersebut selanjutnya akan disepakati bersama melalui forum pembahasan bersama antara *stakeholder* terkait dalam forum Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakortekrenbangda) yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan menghasilkan Dokumen Kesepakatan Program yang menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah/RKP pada T-0.

Kemudian masukan RKP tersebut akan dibahas kembali bersama *stakeholder* terkait yang difasilitasi oleh BAPPENAS dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Forum Musrenbangnas ini adalah sebagai tahapan akhir dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan pemrograman antara pusat–daerah, dimana masukan terhadap RKP tersebut dipertajam dan dilakukan sinkronisasi dengan hasil musrenbang berjenjang yang telah dilaksanakan dari tingkat desa hingga tingkat provinsi serta mengakomodasi dinamika program prioritas nasional yang berkembang dan belum terakomodasi pada forum program dan penganggaran sebelumnya. Adapun hasil dari kegiatan Musrenbangnas ini adalah *draft* Rancangan RKP T-0 yang selanjutnya akan dibahas bersama legislatif dalam menetapkan Rancangan APBN T-0.

k ideal perkotaan, untuk kawasan kumuh seberapa?
al Parking apakah memungkinkan dengan anggaran 200 M? A
P atau ada opsi lainnya?
2 dengan perencanaan BPIW se?



Pandu Gunadi Atmosukarto (kanan) saat menjadi narasumber pengayaan tema Pengembangan Infrastruktur Wilayah (PIW) di Jakarta.

Sumber : Kompu BPIW

Agar terjadi keterpaduan perencanaan dan pemrograman khususnya dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman, unit kerja teknis beserta unit kerja yang mengampu perencanaan dan penganggaran di lingkungan Ditjen Cipta Karya mengikuti dan berperan aktif dalam setiap tahapan perencanaan dan pemrograman infrastruktur Kementerian PUPR bersama mitra kerja di pusat dan di daerah sehingga dihasilkan dokumen perencanaan dan pemrograman kegiatan prioritas yang andal dan akuntabel.

Permen PUPR No. 6 tahun 2022 mengamanatkan penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) sebagai dokumen rencana pengembangan infrastruktur PUPR lingkup wilayah dan/atau kawasan. RPIW diharapkan dapat menjadi acuan yang andal dalam perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR, termasuk di dalamnya infrastruktur permukiman. Dokumen ini juga diharapkan dapat memberi panduan dalam perencanaan program para pemangku kepentingan lainnya seperti Pemda yang turut terlibat dalam pembangunan infrastruktur sesuai dengan kewenangannya. Penanganan infrastruktur permukiman terbagi dengan jelas antara kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga perlu diperjelas pembagian kontribusi antar pemangku kepentingan tersebut dalam rangka mendukung perwujudan sistem dan keterpaduan infrastruktur terbangun.

Hal lain yang perlu dijabarkan dalam dokumen RPIW tersebut adalah terkait kondisi kelembagaan pengelola dan kondisi fiskal daerah dalam rangka mendukung

keberlanjutan dan keberfungsian infrastruktur pasca konstruksi. Untuk itu, RPIW ini perlu disosialisasikan secara luas agar dapat menjadi pedoman keterpaduan lintas instansi.

Permen ini menjabarkan alur perencanaan dan pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR yang dilakukan melalui tiga tahapan: Rakorbangwil, Konreg, dan Penyusunan Renja. Disamping itu, ada forum koordinasi lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan BAPPENAS yang terkait dengan rangkaian kegiatan perencanaan dan pemrograman infrastruktur permukiman yaitu Rakortekbangda dan Musrenbangnas. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan harus melewati tahapan-tahapan tersebut yang berlangsung dua tahun sebelum tahun pelaksanaan. Meskipun demikian, Permen ini juga membuka peluang bagi penambahan kegiatan untuk mengakomodasi kebijakan nasional baru atau mendesak, direktif Presiden dan Wakil Presiden, serta direktif Menteri PUPR.

Dalam rangka mendukung usulan kegiatan prioritas maupun agenda kegiatan yang bersifat strategis secara nasional maupun internasional yang mendesak untuk dilaksanakan dan sesuai dengan arahan dalam Permen PUPR No. 6 tahun 2022, Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan kajian teknis terkait kesiapan pemenuhan kriteria teknis bersama BPIW dan Biro PAKLN (dikaitkan dengan arahan dokumen RPIW serta prioritas penganggaran), unit organisasi Kementerian PUPR terkait, unit kerja, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjen Cipta Karya setelah mendapatkan arahan/persetujuan dari Menteri PUPR.

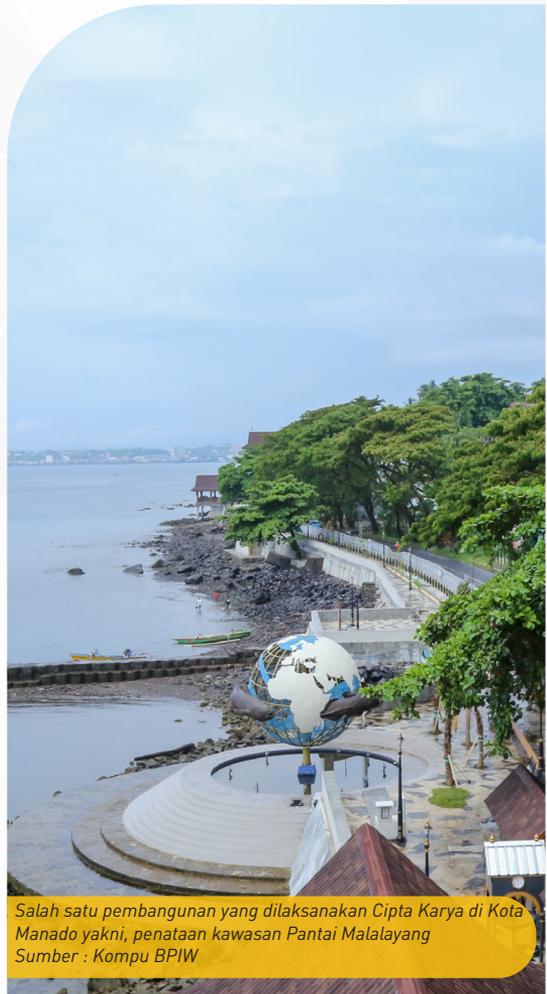


Jika kegiatan yang diusulkan tersebut berada dalam periode pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pemrograman di tingkat kementerian dan lintas K/L, maka akan langsung dibahas untuk masuk ke dalam kegiatan prioritas dan rancangan rencana kerja pemerintah yang akan dilaksanakan pada T-o. Namun demikian, jika penambahan usulan kegiatan direktif/prioritas tersebut diusulkan diluar dari periode tahapan/kegiatan perencanaan dan pemrograman dimaksud, maka akan dibahas dalam kegiatan sinkronisasi penyusunan rencana kerja/renja dan rapat teknis bersama BPIW dan Biro PAKLN, serta unit organisasi Kementerian PUPR terkait, yang pada akhirnya akan memberikan masukan juga pada dokumen RPIW yang telah disusun sebelumnya.

Adapun strategi prioritas program pembangunan infrastruktur permukiman yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya dalam periode 2020-2024 yang diarahkan untuk mengakomodasi penugasan direktif tersebut, dilaksanakan dengan mempertimbangkan urutan skala prioritas sebagai berikut: 1) penyelesaian kegiatan *committed*/PHLN/MYC Lanjutan, 2) Direktif Presiden, 3) Program Kerakyatan, 4) Arahan Menteri PUPR, dan 5) Pemenuhan SPM/Renstra.

Proses perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR tidak terlepas dari peran BPIW sebagai koordinator untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR. Dengan demikian BPIW perlu memperkuat perannya dalam upaya mengimplementasikan pembangunan yang telah direncanakan, diantaranya melalui kajian teknis maupun spasial dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur di suatu wilayah.

Diantaranya identifikasi kawasan strategis pengembangan wilayah dan dukungan kebutuhan infrastruktur wilayah sesuai hasil kajian kesesuaian dan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola aset infrastruktur yang dibangun. Diharapkan unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PUPR mendapatkan arahan dan masukan yang konstruktif dalam penyusunan prioritas program pembangunan infrastruktur untuk perencanaan program tahunan melalui dukungan data dan informasi yang akurat dan andal melalui sistem informasi manajemen yang saling terintegrasi antar unit organisasi.



Salah satu pembangunan yang dilaksanakan Cipta Karya di Kota Manado yakni, penataan kawasan Pantai Malalayang
Sumber : Kompu BPIW

Selain itu, BPIW diharapkan dapat menjadi unit organisasi penjuror dalam menterpadukan pembangunan infrastruktur baik antar sektor PUPR maupun dengan lintas K/L dan antar pemerintah pusat-daerah dalam mewujudkan upaya pengembangan wilayah. Keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dapat terwujud melalui kolaborasi dan sinergi yang dilaksanakan melalui proses sinkronisasi dan konsolidasi secara berjenjang dan berkesinambungan dengan berbagai pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Swasta dan masyarakat) termasuk dalam perencanaan program secara tahun jamak, maupun multi-pendanaan.**)

Kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Jalan dan Jembatan



Ir. Miftachul Munir, MT

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga

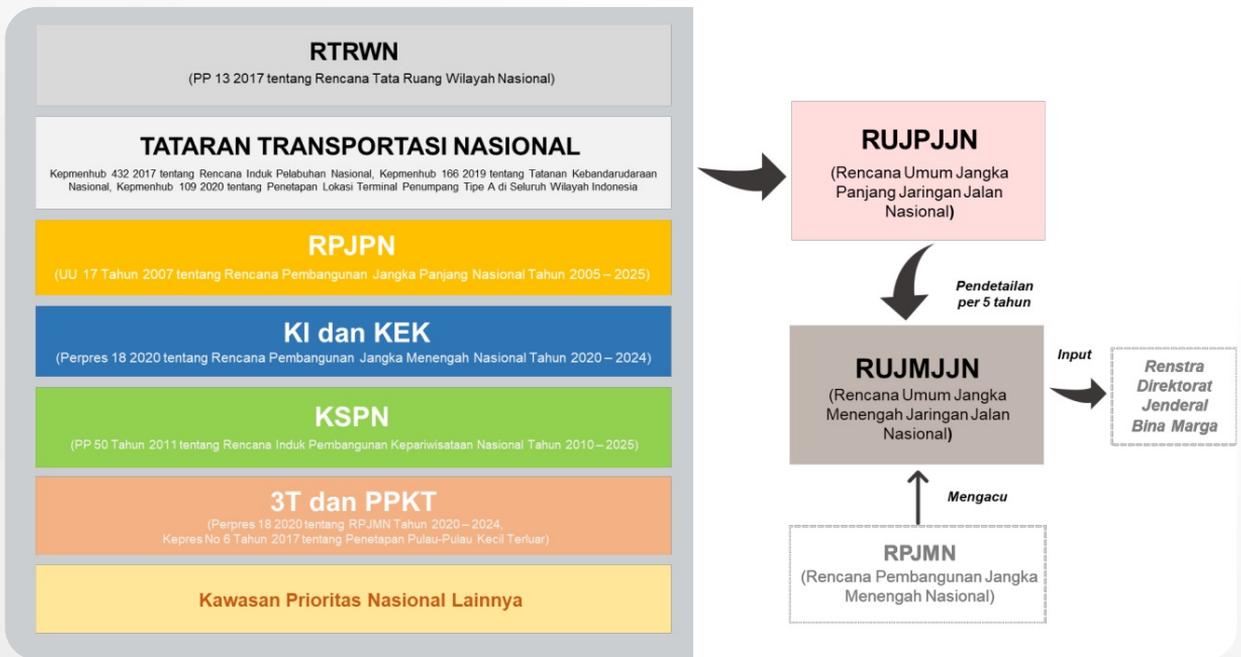
Beberapa isu dan tantangan global pada bidang jalan dan jembatan di Indonesia antara lain, peringkat Indonesia dalam *Global Competitiveness Index (GCI)* pada tahun 2019 pada peringkat 50, masih tertinggal dibandingkan negara tetangga di kawasan *The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*. Hal yang sama terjadi pada indeks kualitas jalan dimana Indonesia berada pada peringkat 60 pada tahun 2019.

Kemudian, daya saing Indonesia pada *Logistic Performance Index (LPI)* tahun 2018 yaitu peringkat 46, dengan nilai-nilai yang cukup baik berada pada indikator *Timeliness*, *Easy of Tracking* dan *International Shipment*. Sementara, nilai-nilai indikator *Customs*, *Infrastructure*, dan *Logistic Service* dinilai cukup rendah. Dibandingkan dengan peringkat negara-negara tetangga ASEAN, peringkat Indonesia dinilai cukup tertinggal.

Kemudian isu dan tantangan lain terkait penyelenggaraan jalan dan jembatan antara lain adalah, permasalahan dalam pengadaan tanah menyebabkan keterlambatan implementasi program penyelenggaraan jalan dan jembatan. Keterbatasan anggaran menyebabkan ketidaksesuaian kebutuhan dengan implementasi di lapangan, perlunya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan, serta kurangnya koordinasi antarsektor menyebabkan perencanaan dan pemrograman yang tidak terintegrasi. Untuk menjawab isu dan tantangan tersebut, maka dibutuhkan regulasi perencanaan dan pemrograman secara holistik, terintegrasi dan bersinergi.

Saat ini Kementerian PUPR telah memiliki Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 6 Tahun 2022. Dalam Peraturan Menteri PUPR No. 6 Tahun 2022 yang menjelaskan mengenai Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) sebagai dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dengan pendekatan pengembangan Wilayah serta tahapan penyusunan program tahunan. Sehingga pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, dapat memberikan nilai tambah (*added value*) yang lebih optimal pada suatu wilayah yang mengacu pada RPIW.

RPIW tersebut menjadi dasar Kementerian PUPR dalam menyediakan infrastruktur yang terpadu. RPIW disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) PUPR, dan Rencana Spasial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hal tersebut selaras dengan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional yang disusun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga.



Sumber : Bina Marga 2022

Keterkaitan antara UU No. 2 Tahun 2022 mengenai Perubahan Kedua atas UU No. 38 tahun 2004 mengenai Perubahan Kedua atas UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Menteri PUPR No. 6 Tahun 2022 yaitu pada penyusunan dokumen Rencana Umum Jaringan Jalan, di mana keduanya mengacu pada RPJMN dan rencana spasial. Dalam UU No.2 Tahun 2022 dalam Pasal 14 ayat 2, Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional RPJMN Rencana Umum Jaringan Jalan disusun dengan memperhatikan, RPJPN, RTRW, Tataran transportasi nasional dalam sistranas, implementasi pembangunan jalan berkelanjutan, dan rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor. Mengingat RPIW ditetapkan dalam jangka waktu 10 tahun, maka sebaiknya RPIW mengacu pada RPJP dan RTRWN.

Regulasi perencanaan dan pemrograman melihat beberapa aspek, yaitu: RPJPN, RPJMN, RTRWN, Tataran transportasi nasional dalam sistranas, implementasi pembangunan jalan berkelanjutan, dan rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor. Selain aspek-aspek tersebut, juga mempertimbangkan potensi wilayah secara

holistik dan terintegrasi agar tercapai sinergitas dalam pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, dalam jangka panjang pengembangan wilayah mempunyai target pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Regulasi perencanaan dan pemrograman diharapkan dapat melihat potensi dan indikator-indikator kawasan strategis untuk mempercepat perwujudan akses dan konektivitas di kawasan tersebut secara bersamaan pada semua sektor untuk mencapai *outcome* yang diharapkan. Oleh karena itu, Ditjen Bina Marga dalam menyusun Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional selain perlu mengacu kepada RTRWN; tataran transportasi nasional dalam sistranas; dan RPJPN, juga perlu mengacu kepada KEK; KSPN; 3T dan PPKT; dan Kawasan Prioritas Nasional lainnya. Dalam upaya menyelaraskan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dengan arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas, yaitu dengan menyesuaikan pentahapan atau indikasi program pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen rencana pengembangan kewilayahan berskala nasional.

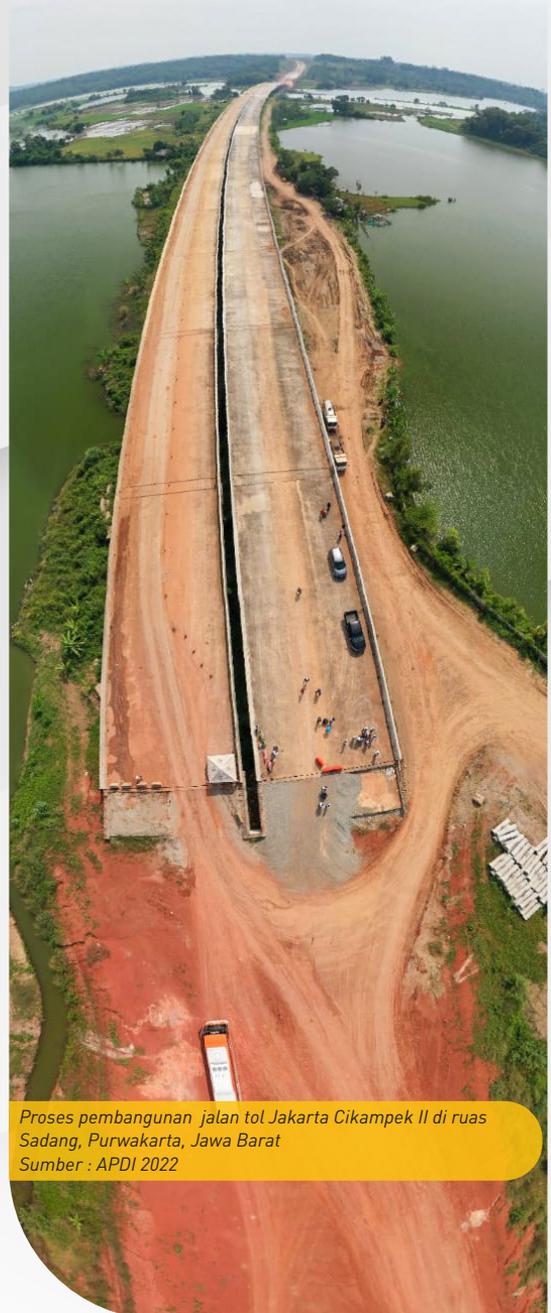
Dalam perencanaan dan pemrograman, Ditjen Bina Marga sesuai kewenangannya menyusun prioritas penanganan jalan dan jembatan sebagaimana tercantum dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020-2024 yaitu, preservasi jalan dan jembatan nasional, penuntasan pembangunan jalan perbatasan, Trans Papua, Pantai Selatan Jawa dan Lintas Tengah, Sumatera dan Kalimantan. Sementara, berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024, pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan analisis kebutuhan dan rencana pengembangan jaringan jalan nasional, serta dukungan jalan daerah, termasuk tugas direktif atau penugasan khusus.

Prioritasi utama pada fungsi Ditjen Bina Marga berdasarkan Renstra Ditjen Bina Marga 2020-2024 adalah penanganan jalan nasional sepanjang 47.017 km dan menuntaskan proyek strategis yang tercantum dalam renstra Ditjen Bina Marga.

Pemenuhan *readiness criteria* (RC) seringkali menjadi hambatan dalam prioritasasi program. Beberapa masalah yang sering ditemui dalam pemenuhan RC adalah penyusunan studi kelayakan, DED, dan dokumen lingkungan. Dalam penyusunan studi kelayakan, sering terjadi konflik dalam penentuan trase terpilih. Sementara itu, dalam penyusunan DED seringkali terjadi perbedaan trase pada studi kelayakan dengan trase hasil survei detail pada tahan penyusunan desain. Kemudian, dalam penyusunan dokumen lingkungan, izin Kementerian Lingkungan Hidup seringkali sulit diperoleh sehingga dapat menghambat rencana pelaksanaan konstruksi.

Isu paling krusial adalah pengadaan lahan, bahkan program pada kawasan prioritas tidak jarang terhambat karena adanya isu tersebut. Proses pengadaan lahan sendiri memiliki beberapa kesulitan, yaitu: hambatan pembebasan tanah dengan status tanah adat, proses negosiasi yang berlarut-larut hingga melebihi tahun anggaran, dan perlunya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam hal pembebasan lahan. Peran Pemerintah Daerah dapat membantu Ditjen Bina Marga memfokuskan kebutuhan pendanaan pada pembiayaan konstruksi. Kegiatan perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi umumnya dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga (penyedia jasa) baik sebagai konsultan atau kontraktor. Program pada kawasan prioritas tidak jarang terhambat karena adanya isu pembebasan lahan.

Dengan demikian, dalam penyusunan prioritasasi program Ditjen Bina Marga tidak hanya mengacu pada kemudahan pemenuhan RC namun juga mempertimbangkan arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas. Harapan kami, arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas khususnya bidang jalan dan jembatan dapat mempertimbangkan kelayakan dan implementasinya di lapangan.(**)



Proses pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek II di ruas Sadang, Purwakarta, Jawa Barat
Sumber : APDI 2022

Regulasi Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR Diharapkan Mempercepat Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air



Ir. Birendrajana, M.T.

Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air
Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR menyelenggarakan pembangunan infrastruktur SDA di seluruh Indonesia. Ada beberapa isu penyelenggaraan pembangunan infrastruktur SDA, terutama yang menjadi latar belakang terkait kebutuhan adanya regulasi perencanaan dan pemrograman, yakni :

- a. Keterkaitan Program dengan Sektor Lainnya
Pengelolaan SDA melibatkan banyak pihak, demikian pula dalam hal pembangunan infrastruktur sumber daya air, termasuk dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) lainnya, contohnya dalam hal pengembangan *food estate*, diperlukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, dalam hal pengembangan sumber air untuk pusat persemaian diperlukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Keterkaitan Program dengan Program Unit Organisasi Lainnya di Kementerian PUPR
Sektor SDA juga terkait dengan sektor lainnya di Kementerian PUPR, misalnya dalam hal pengendalian banjir yang berdampak pada jalan nasional (Ditjen Bina Marga), penyediaan air baku yang harus ditindaklanjuti dengan penyediaan air bersih (Ditjen Cipta Karya), dll. Diperlukan sinkronisasi dan integrasi program antar unit organisasi di Kementerian PUPR.
- c. Usulan Program dari Pemerintah Daerah Sangat Banyak dan Belum Semuanya Tersinergi dengan Rencana Program Ditjen SDA
Setiap tahunnya, Ditjen SDA menerima lebih dari 200 usulan program dari Pemerintah Daerah, yang dimintakan pelaksanaan dan anggarannya melalui APBN Ditjen SDA. Usulan disampaikan baik melalui surat kepada Menteri PUPR, surat kepada Dirjen SDA, ataupun melalui rapat konsultasi (kunjungan ke Kantor Ditjen SDA). Beberapa usulan bukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan tidak sejalan dengan prioritas jangka menengah Ditjen

“ Mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang terbatas, diperlukan sinkronisasi program serta penentuan prioritas dan urgensi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian PUPR. ”

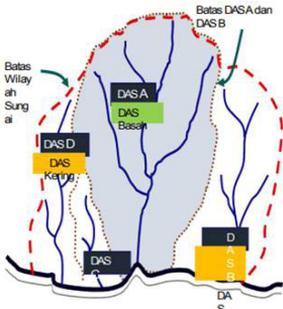
WILAYAH SUNGAI (WS) DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)



"Wilayah Sungai (WS): kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km²."

Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015

"Daerah Aliran Sungai (DAS): suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan."



Sumber : Ditjen SDA

e. Tindak Lanjut Arahan (Direktif) Baru

Beberapa program diusulkan atau diminta untuk dilaksanakan setelah rangkaian perencanaan, pemrograman dan penganggaran, baik dalam bentuk direktif (arahan) baru ataupun tindak lanjut pasca bencana. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, perlu ada wadah sinkronisasi antar sektor, terutama di lingkungan Kementerian PUPR, agar pelaksanaan program terintegrasi dan jelas siapa, berbuat apa, kapan.

SDA. Mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang terbatas, diperlukan sinkronisasi program serta penentuan prioritas dan urgensi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian PUPR.

d. Tindak Lanjut Arahan Presiden Bahwa Semua Program Sudah Selesai pada TA 2023 atau Selambat-lambatnya Semester I TA 2024

Sesuai dengan kebijakan tersebut, bahwa semua infrastruktur harus selesai dan dapat dimanfaatkan, maka prioritas pemrograman menjadi semakin fokus hanya pada penyelesaian program *on-going* dan pemanfaatannya. Sementara masih ada kebutuhan penanganan lainnya, yang kesiapan teknis dan pengadaan tanahnya masih dalam proses, sehingga diperkirakan tidak selesai hingga TA 2024. Untuk itu, diperlukan penentuan prioritas dan urgensi dari kebutuhan tersebut, disinkronkan dengan kebijakan prioritas program Kementerian PUPR, salah satunya terkait pengembangan wilayah (kawasan) strategis.

Strategi Perencanaan dan Pemrograman SDA

Dengan adanya Permen PUPR No. 6 tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR, strategi yang dilakukan Ditjen SDA dalam melakukan perencanaan dan pemrograman infrastruktur SDA agar ada sinergis dengan pengembangan kawasan dan sektor lainnya yakni:

- 1) Melakukan koordinasi intensif dengan sektor terkait, misalnya dalam hal pengembangan *food estate*, maka dilakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait masterplan *food estate*, kebutuhan air untuk *food estate*, serta potensi jenis tanaman pangan yang akan dikembangkan.
- 2) Mengikuti pembahasan-pembahasan rancangan rencana tata ruang di Kementerian ATR/BPN untuk mensinkronkan rencana tata ruang dengan dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pemerintah Pusat.
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur SDA sebagai tindak lanjut kebijakan pengembangan wilayah, terutama yang ditetapkan oleh Presiden, misalnya Perpres No. 79 tahun 2019, Perpres No. 80 tahun 2019, dan Perpres No. 87 tahun 2021.

Dengan terbitnya Permen ini, hal pertama yang dilakukan Ditjen SDA agar dapat berperan dalam menangani usulan pembangunan infrastruktur SDA yang bersifat direktif adalah melakukan identifikasi terhadap kesesuaian program dengan dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA serta kesesuaian dengan arah kebijakan Renstra Ditjen SDA.

Dengan adanya Permen PUPR No. 6 tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR, maka salah satu strategi yang dilakukan Ditjen SDA dalam melakukan perencanaan dan pemrograman infrastruktur SDA agar ada sinergis dengan pengembangan kawasan dan sektor lainnya adalah melakukan koordinasi intensif dengan sektor terkait, misalnya dalam hal pengembangan food estate.

Kedua, melakukan kesiapan teknis *feasibility study* atau FS, desain, dokumen lingkungan) dan kesiapan lahan, serta kemungkinan adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam pengadaan tanah. Ketiga, ketersediaan anggaran, apakah pada tahun berjalan atau pada tahun anggaran berikutnya.

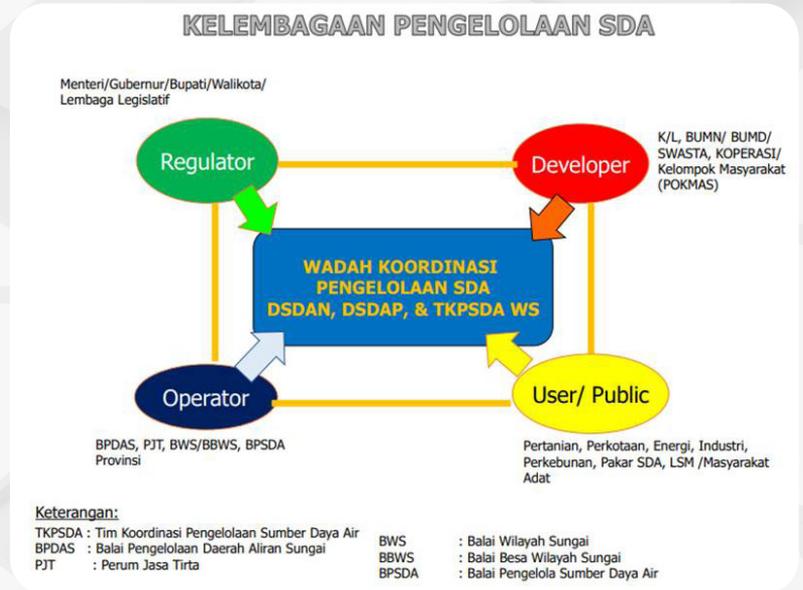
Terkait dengan hal ini, Ditjen SDA sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengusulan Program Non Reguler di Lingkungan Ditjen SDA yang ditetapkan melalui Surat Edaran Dirjen SDA No. 13 tahun 2021.

Dalam hal usulan program yang bersifat direktif bukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat atau tugas Kementerian PUPR cq Ditjen SDA, maka Direktur Jenderal SDA akan meminta arahan Bapak Menteri PUPR melalui Nota Dinas (tertulis).

Kemudian, pada Pasal 33 dan Pasal 37 Permen Nomor 6/PRT/M/2022, diatur tentang hal ini, namun masih dalam timeline perencanaan dan pemrograman, lalu bagaimana jika terjadi pada tahun berjalan?. Ini menjadi pertanyaan yang perlu dicari pemecahannya.

Harapan Direktorat Jenderal SDA

Salah satu yang diamanatkan Permen tersebut untuk dilaksanakan yakni Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). RPIW ini merupakan dokumen rencana yang akan menjadi panduan rencana dan program terutama terkait pembangunan infrastruktur SDA. Ada beberapa harapan terhadap RPIW, pertama, RPIW yang disusun dapat menjadi



Sumber : Ditjen SDA

panduan prioritas rencana program hingga 5-10 tahun mendatang dikaitkan dengan pengembangan wilayah.

Terkait rencana program yang disusun, harapannya betul-betul yang memberikan daya ungkit bagi pengembangan wilayah tersebut, bukan karena lokasinya berada di wilayah tersebut, namun signifikansinya terhadap pengembangan wilayah juga perlu dipertimbangkan. RPIW diharapkan dapat mengidentifikasi isu pembangunan 10 tahun ke depan dan bagaimana menyikapinya di lingkungan Kementerian PUPR.

Kedua, rencana program yang disusun pada RPIW diharapkan bersifat program menyeluruh, bukan merupakan rincian paket-paket pekerjaan yang sudah menyebutkan jenis infrastruktur dan volumenya, sehingga dapat disesuaikan dengan kelayakan teknis penanganannya. Misalnya, program menyebutkan pengendalian banjir Kawasan

X, bukan menyebutkan pembangunan tanggul dan kolam retensi di Kawasan X.

Harapan ketiga, RPIW sudah sinkron dengan rencana tata ruang dan rencana pengembangan wilayah lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan kebijakan pemrograman infrastruktur PUPR di kawasan tersebut.

Harapan lain atau harapan keempat bahwa RPIW ini tidak hanya menjadi daftar panjang proyek saja, akan tetapi sudah mempertimbangkan kemampuan pelaksanaannya, termasuk dalam hal ketersediaan anggaran dan pemanfaatan sumber pendanaan alternatif. Hal ini dapat disinkronkan juga dengan Rencana Umum KPBU PUPR yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.

Kelima, RPIW diharapkan dapat menjadi *bridging* penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR. Harapan

keenam adalah arah kebijakan pada RPIW diharapkan dapat menjadi kerangka makro (payung) bagi proyek-proyek produktif.

Dengan terbitnya Permen PUPR No. 6 tahun 2022 diharapkan agar regulasi perencanaan dan pemrograman Infrastruktur PUPR dapat mempercepat peningkatan pembangunan infrastruktur SDA, perencanaan dan pemrograman Kementerian PUPR lebih terarah dan terpadu, serta lebih fokus lagi dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Kami juga berharap, BPIW dapat menjadi garda terdepan terkait penyusunan program di lingkungan Ditjen SDA, dapat mengawal hingga penyusunan DIPA, termasuk mengawal jika ada program yang diusulkan setelah proses penyusunan Renja (setelah Bulan Agustus tiap tahunnya).

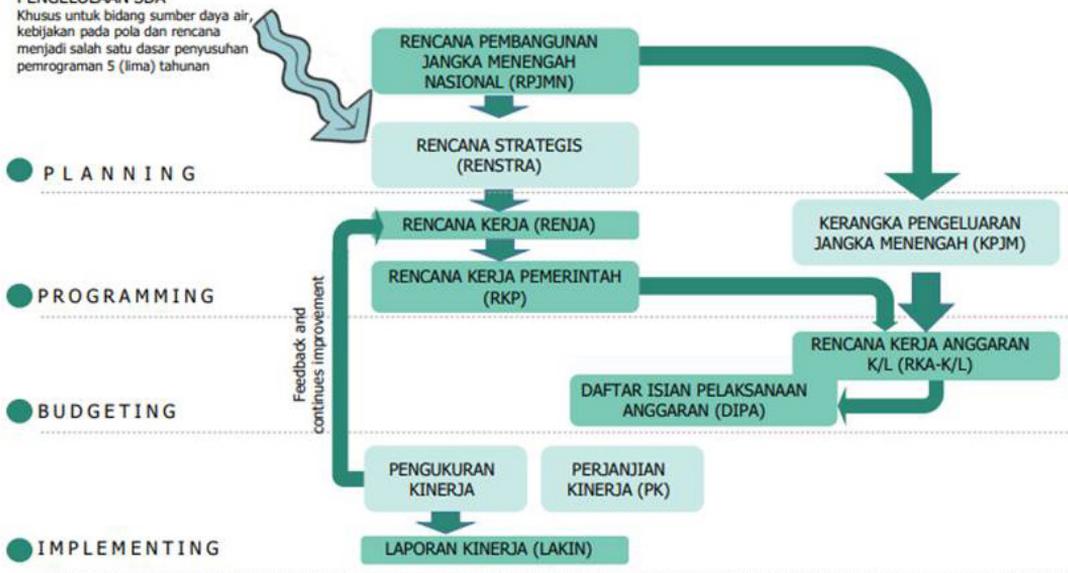
Dalam hal penyusunan RPIW, diharapkan BPIW juga dapat lebih menggali informasi aktual, tidak hanya berdasarkan kebutuhan dan informasi dari Pemerintah Daerah, namun juga dari unit organisasi terkait. Kesesuaian kewenangan, tugas dan fungsi diharapkan menjadi filter awal pada saat menerima informasi, terutama dari Pemerintah Daerah. Dengan demikian, program yang diusulkan dan pada akhirnya dianggarkan, dapat tepat guna dan tepat sasaran.

Ditjen SDA juga memiliki dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA di masing- masing Wilayah Sungai (WS) yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Harapannya, RPIW yang disusun mempertimbangkan juga program-program yang diamanatkan pada dengan kedua dokumen tersebut. (**)

PERENCANAAN (PLANNING), PEMROGRAMAN (PROGRAMMING), DAN PENGANGGARAN (BUDGETING)

POLA DAN RENCANA PENGELOLAAN SDA

Khusus untuk bidang sumber daya air, kebijakan pada pola dan rencana menjadi salah satu dasar penyusunan pemrograman 5 (lima) tahunan



Sumber : Ditjen SDA

Permen PUPR No.6 Tahun 2022 Mengatur Tanggung Jawab BPIW Mengenai RPIW dan Rakorbangwil



Rahindro, S.Sos, M.Eng., MURP

Sub Koordinator Hukum

Bagian Hukum Kerja Sama Komunikasi Publik
Sekretariat BPIW Kementerian PUPR

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No. 6 tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan pada tanggal 28 April 2022 dan diundangkan kurang lebih satu bulan kemudian pada tanggal 24 Mei 2022.

Peraturan Menteri dimaksud merupakan bagian dari dokumen kesepakatan Rencana Aksi Tindak Lanjut Kajian Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan antara Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ditjen Bina Marga, Ditjen Bina Kontruksi, dan BPIW berupa penyusunan dan legalisasi pedoman perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR. Di sisi lain, dengan alokasi dana APBN yang besar setiap tahunnya, kebutuhan adanya pengaturan terkait perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR menjadi mutlak diperlukan agar pembangunan infrastruktur PUPR terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Permen PUPR No. 6 tahun 2022 terdiri dari 6 Bab dan 44 pasal, yaitu Ketentuan Umum (Bab I), Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bab II), Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bab III), Pengelolaan Data dan Informasi (Bab IV), Ketentuan Peralihan (Bab V), dan Ketentuan Penutup (Bab VI).

Pembangunan infrastruktur PUPR sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah guna menghasilkan keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Penekanan pada dua kata kunci, yaitu pengembangan wilayah dan keterpaduan. Menurut hemat penulis, menggambarkan apa yang akan dituju dalam pembangunan infrastruktur PUPR dan melalui cara apa tujuan tersebut akan dicapai.

Dari segi pengaturan, Permen PUPR No. 6 tahun 2022 melengkapi pengaturan yang sebelumnya sudah ada terkait perencanaan dan penganggaran

“ Peraturan Menteri dimaksud merupakan bagian dari dokumen kesepakatan Rencana Aksi Tindak Lanjut Kajian Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan antara Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ditjen Bina Marga, Ditjen Bina Kontruksi, dan BPIW berupa penyusunan dan legalisasi pedoman perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR. ”

KRONOLOGI PENYUSUNAN

- 2019** RAN KPK yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Aksi Kajian Perencanaan dan Pembangunan Jalan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR
- 2020** Penyusunan materi teknis dan draft Rapermen
- 2021** Pembahasan dan tahap legalisasi
- 4 Januari 2021 Pembahasan dengan Biro PAKLN, Sekretaris Jenderal
 - Februari 2021 Pembahasan dengan Unit Organisasi Teknis
 - 21 April, 7 dan 10 Mei Persiapan Harmonisasi
 - 8 Juni 2021 Finalisasi Rapermen
 - 30 Juni – 2 Juli 2021 Harmonisasi Rapermen dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Bappenas
 - Juli – Oktober 2021 Penyiapan substansi Rapermen setelah Harmonisasi (Penyesuaian/penyederhanaan output dokumen perencanaan dari yang semula: RPIJP, RPIJM dan RPIJMK menjadi Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah)
 - 11 November 2021 Penetapan Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah oleh Kepala BPIW melalui Surat Edaran Kepala BPIW Nomor 20 Tahun 2021
- 2022**
- 10 Januari 2022 Penyampaian laporan kepada Menteri PUPR
 - 15 Februari 2022 Permohonan Harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM
 - 15 Maret 2022 Harmonisasi Rapermen dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Bappenas

Sumber : BPIW 2022

pembangunan pada tingkat nasional. Sampai saat ini, kalender pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional beserta peraturan turunannya, antara lain Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 9 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2017 beserta peraturan pelaksanaannya secara sistematis mengatur agenda dan *time frame* proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, di mana Kementerian PUPR sebagai salah satu pemangku kepentingan berpartisipasi aktif dalam berbagai agenda/forum koordinasi dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional.

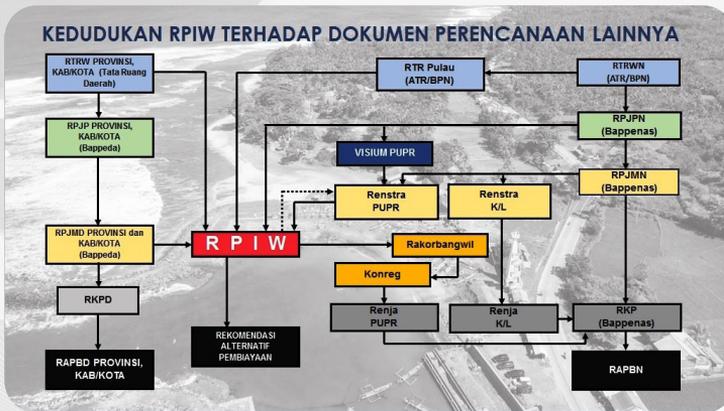
Namun demikian, untuk mengelola anggaran pembangunan infrastruktur PUPR yang demikian besar dan kompleksnya pembangunan infrastruktur PUPR di lihat dari banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat (internal Kementerian PUPR, K/L, dan pemerintah daerah), diperlukan adanya mekanisme atau forum koordinasi perencanaan dan pemrograman tersendiri yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR di luar forum koordinasi yang sudah ada dalam agenda pembangunan nasional.

Forum koordinasi seperti Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) dan Konsultasi Regional (Konreg) perlu dibakukan dalam peraturan agar mempunyai daya ikat dan dipedomani bersama sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.

Dari segi substansi, Permen PUPR No. 6 tahun 2022 mengatur perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR yang diawali dengan penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) sampai dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Kementerian PUPR.

Permen PUPR No. 6 tahun 2022 tidak mengatur proses setelah Renja Kementerian PUPR disusun sampai dengan penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) karena hal tersebut sudah diatur dalam peraturan yang dikeluarkan Kementerian PPN/Bappenas. Setelah RPIW ditetapkan, memorandum

“ Dari segi substansi, Permen PUPR No. 6 tahun 2022 mengatur perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR yang diawali dengan penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) sampai dengan tersusunnya Rencana Kerja Kementerian PUPR (Renja Kementerian PUPR). ”



Sumber : BPIW 2022

program dalam RPIW dibawa ke dalam forum Rakorbangwil untuk disepakati dan dibahas kembali dalam forum Konreg untuk menghasilkan rancangan program pembangunan infrastruktur PUPR.

Selanjutnya, rancangan program tahunan dibawa ke dalam forum koordinasi pembangunan tingkat nasional sampai dengan tersusunnya Renja Kementerian PUPR. Terdapat dua *output* yang menjadi tanggung jawab BPIW sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No. 6 tahun 2022, yaitu RPIW dan Rakorbangwil.

Output pertama yaitu RPIW sebagai dokumen perencanaan paling sedikit memuat arah kebijakan, profil wilayah dan potensi daerah serta profil dan kinerja infrastruktur, permasalahan dan isu strategis, skenario pengembangan wilayah, analisis kebutuhan infrastruktur, dan rencana aksi pembangunan infrastruktur. RPIW sebagai dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur berbasis wilayah menjadi penting peranannya dalam menentukan arah pembangunan infrastruktur PUPR 10 tahun yang akan datang. RPIW ditetapkan pertama kali paling lambat satu tahun setelah Permen PUPR No. 6 tahun 2022 ditetapkan (April 2023).

Output kedua adalah Rakorbangwil yang merupakan forum koordinasi perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dengan Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah provinsi. Dalam forum ini, tujuannya untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR bersama K/L dan pemerintah daerah provinsi

terkait menyepakati kawasan yang akan didukung, kebutuhan pembangunan infrastruktur PUPR untuk mendukung kawasan dan, kebutuhan dukungan pemerintah daerah provinsi.

Penyelenggaraan Rakorbangwil diharapkan mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur PUPR dapat terpadu, tidak *scattered*, sehingga dapat memberikan dampak optimal bagi pengembangan wilayah/kawasan.

Dengan demikian, RPIW dan Rakorbangwil sebagai *output* perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR yang relatif baru, dan menjadi tanggung jawab BPIW, sesuai dengan fungsi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PUPR No. 6 tahun 2022. Permen ini diharapkan menjadi *game changer*, sehingga pembangunan infrastruktur PUPR dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sebagaimana dicita-citakan. (**)





Rombongan Kepala BPIW meninjau pembangunan jembatan dan Oprit Boulevard di Kota Manado
Sumber : Kompu BPIW

Infrastruktur Dorong Pengembangan Pariwisata

BPIW Pacu Percepatan Pembangunan di KSPN

Pada era normal baru hidup berdamaian dengan Covid-19, salah satu sumber ekonomi yang dapat cepat pulih adalah sektor pariwisata. Dengan begitu, Kementerian PUPR terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur PUPR mendukung kawasan pariwisata. Salah satunya di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Manado-Bitung-Likupang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di KSPN Manado-Bitung-Likupang, Sulawesi Utara (Sulut). "Pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia salah satunya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra saat kunjungan kerja ke DPSP Manado-Bitung-Likupang, Sulut, Kamis-Jumat, 21-22 April 2022 lalu.

Arief menyatakan, pada tatanan normal baru hidup berdamaian dengan Covid-19, salah satu sektor ekonomi yang dapat pulih cepat adalah sektor pariwisata. Dengan begitu, ujarnya, Kementerian PUPR terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur PUPR di KSPN Manado-Bitung-Likupang untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Manado-Bitung-Likupang dan sekitarnya.

Pada kunjungan kerja hari pertama, rombongan BPIW dan jajaran meninjau progres Penataan Kawasan Pantai Malalayang di Kota Manado. Penataan kawasan wisata

tersebut bertujuan untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata dan berwawasan lingkungan.

Kemudian peninjauan dilanjutkan pada lokasi pembangunan Manado *Outer Ring Road* (MORR III) atau Jalan Lingkar Manado III (*Ring Road* Manado) Tahap I dan Tahap II. Diharapkan ruas jalan yang menghubungkan Kalasey-Winangun sepanjang 11,39 kilometer ini akan membagi arus lalu lintas menuju dan keluar Kota Manado, sehingga dapat mengurangi kemacetan di ruas jalan dalam kota.



Pantai Paal di KSPN Manado-Bitung-Likupang
Sumber : Kompu BPIW



Infrastruktur pengaman Pantai Pulisan
Sumber : Kompu BPIW

Kemudian, peninjauan berlanjut pada pembangunan Jembatan dan Oprit *Boulevard II* Kota Manado. Jembatan tersebut menghubungkan Jalan *Boulevard II* melintasi sungai hingga ke jalan utama untuk kemudahan konektivitas masyarakat dari bagian selatan ke utara Kota Manado. Di lokasi pembangunan Jembatan dan Oprit *Boulevard II*, Arief menghimbau, seluruh jajaran yang bertugas melaksanakan pembangunan untuk senantiasa berkerja semangat. "Terus bekerja yang baik," ungkap Arief di tengah-tengah tim pelaksana pembangunan.

Selain itu, dilakukan juga peninjauan pada pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Mamitarang di Kabupaten Minahasa Utara. Pembangunan TPA Regional Mamitarang bertujuan meningkatkan layanan sanitasi pada KSPN Manado-Bitung-Likupang. TPA Regional tersebut direncanakan mampu memproses limbah rumah tangga skala regional dari 4 kota/kabupaten di Sulut yakni, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Bitung.

Sementara itu, pada kunjungan kerja hari kedua dilaksanakan peninjauan ke lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung serta akses masuk KEK Likupang. Kemudian, peninjauan dilanjutkan ke lokasi drainase dan *intake* air baku KEK Likupang. Rombongan juga menyempatkan meninjau lokasi Pelabuhan Samudera Bitung melalui kendaraan, untuk memastikan akses pelabuhan memadai. Sebelum mengakhiri kunjungan kerja, rombongan BPIW mengunjungi Kantor Walikota Bitung.

Arief kepada Walikota Bitung, Maurits Mantiri menyatakan, Kementerian PUPR komitmen mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan Bitung dan sekitarnya. Menurutnya, Kementerian PUPR akan merasa antusias melakukan pembangunan ajuan perintah daerah, apabila lahan sudah disediakan pemerintah daerah.

Sementara itu, Maurits Mantiri mengaku mengapresiasi rombongan BPIW dengan kunjungannya ke Kota Bitung. Ia berharap, Pemkot Bitung dapat semakin bersinergi dengan Kementerian PUPR dalam pengembangan infrastruktur di Kota Bitung.

Pada kunjungan kerja tersebut, hadir antara lain Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, BPIW, Zevi Azzaino, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulut, Kementerian PUPR, Komang Raka Maharthana, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulut, Kementerian PUPR, Hendro Satrio, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I, Kementerian PUPR, Recky Walter Lahope serta Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Kementerian PUPR, I Komang Sudana.(**)



Kepala BPIW bertemu dengan Walikota Bitung Maurits Mantiri
Sumber : Kompu BPIW

Infrastruktur PUPR Mendukung Industri Renewable Energy, Kunci Bangkitnya Quaternary Activity di Indonesia



Oleh

Dr. Aji Noor Muhammad dan Gita Tridhiasa Putri Prahutami, S.PWK.

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III
BPIW Kementerian PUPR

Infrastruktur di Indonesia selama hampir satu dekade ini telah menjadi sektor utama yang mendorong peningkatan konektivitas dan merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di tanah air. Pembangunan infrastruktur yang terkait dengan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengalami peningkatan dan tersebar di seluruh Indonesia, bahkan hingga kawasan-kawasan tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar. Berdasarkan neraca infrastruktur Sumber Daya Air tahun 2022 diperoleh capaian pembangunan 63 Bendungan pada 2014-2021 dan telah selesai 19 bendungan pada tahun 2021.

Selain itu, sesuai dengan neraca infrastruktur Bina Marga tahun 2021 telah dibangun jalan nasional sepanjang 47.090 km, dan 19.135 jembatan nasional sepanjang 539.477 meter (Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR, 2021). Selain program reguler tersebut, amanat pembangunan infrastruktur melalui PSN juga telah mendukung berbagai kawasan pengembangan ekonomi di 19 Kawasan Industri (Permenko Perekonomian 7/2021) dan 18 Kawasan Ekonomi Khusus (kek.go.id). Beberapa data tersebut dapat menjadi informasi yang mempresentasikan bahwa pembangunan infrastruktur secara nyata dilakukan untuk menumbuhkan perekonomian wilayah dan negara.

“Pembangunan infrastruktur secara nyata dilakukan untuk menumbuhkan perekonomian wilayah dan negara.”

Hal yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah infrastruktur yang dibangun di Negara Indonesia ini dapat menjadi kunci lompatan ekonomi sehingga mengantarkan Indonesia menjadi negara maju di dunia?. Tentu ada banyak sektor yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan PDRB Indonesia secara signifikan, salah satunya adalah sektor industri yang dapat meningkatkan arus investasi pihak swasta. Namun industri seperti apa perlu diprioritaskan dukungan infrastrukturnya, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap pemasukan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Saat ini, negara-negara maju berlomba-lomba untuk mengembangkan berbagai industri yang mendukung pengembangan energi ramah lingkungan. Hal tersebut menjadi kebutuhan, karena penggunaan energi oleh manusia dari tahun ke tahun semakin meningkat secara drastis. Namun dari sebagian besar energi



Kawasan Industri Pulau Obi, Halmahera Selatan
Sumber : Aji Noor, BPIW

yang digunakan berasal dari sumber bahan bakar fosil yang tidak terbarukan, sehingga lama kelamaan akan habis. Di Indonesia, tanpa adanya penemuan cadangan yang baru, minyak bumi di Indonesia akan habis dalam sembilan tahun ke depan, gas bumi akan habis 22 tahun lagi, dan batubara akan habis 65 tahun mendatang (Menteri ESDM, 2022).

Indonesia berpotensi menjadi *lead actor* energi ramah lingkungan

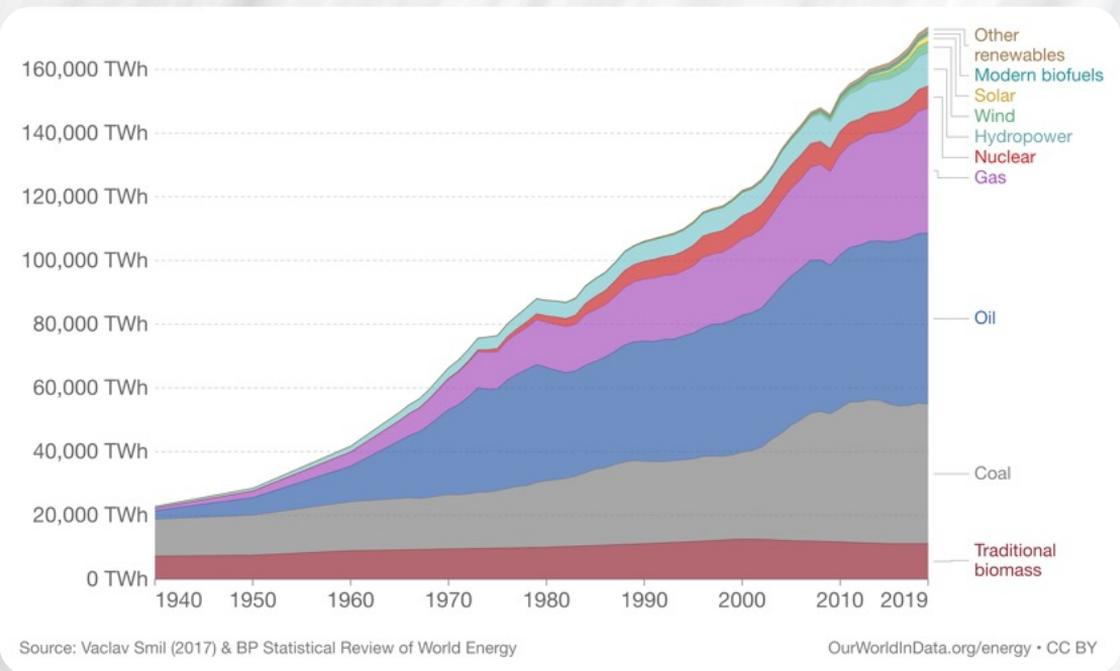
Isu ini mengantarkan sektor energi masuk dalam bagian dari *quaternary sector*, dimana informasi dan ilmu pengetahuan digunakan sebagai basis dalam menciptakan inovasi dalam industri melalui kegiatan *Research and Development* (R&D), dalam konteks ini adalah *renewable energy*. *Renewable energy* sedang menjadi hal yang banyak dituju oleh negara maju. Mereka berlomba menjadi pemimpin untuk memecahkan solusi dari krisis energi global, dan di sisi lain berupaya menguasai *quaternary activity*.

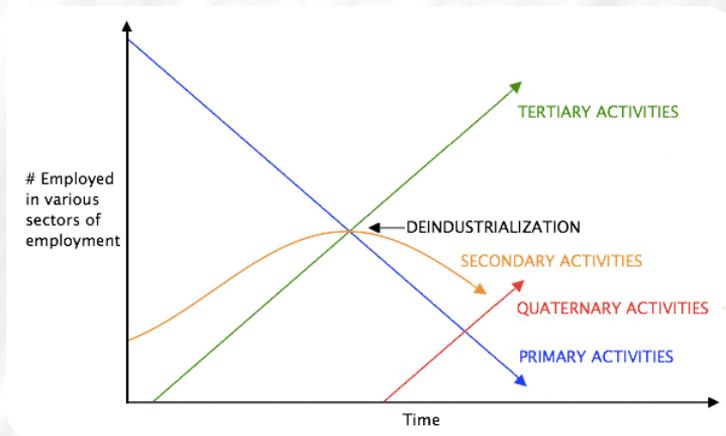
Indonesia berada di garis khatulistiwa, merupakan negara kepulauan, serta diapit oleh dua samudra sehingga mendapatkan limpahan cahaya matahari, angin, maupun kandungan sumber daya alam melimpah yang belum tentu dimiliki negara lain dan

menjadi kunci penggunaan energi yang lebih efisien. Indonesia, sebagai penghasil nikel terbesar di dunia, memegang kunci utama dalam sistem rantai pasok global industri kendaraan listrik dan perangkat yang menggunakan baterai. Tercatat di tahun 2021 produksi olahan nikel nasional mencapai 2,47 juta ton dengan tren produksi yang meningkat tiap tahunnya. Kepulauan Maluku, meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara, menjadi tempat tersimpannya 40% cadangan nikel di Indonesia. Diperkirakan terdapat 1,4 Miliar Ton cadangan bijih nikel terkandung di Kepulauan Maluku sebagai bahan baku utama pembuatan baterai.

Penulis melihat ada suatu peluang bahwa Indonesia menjadi *lead actor energi* ramah lingkungan sekaligus berpotensi menguasai *quaternary sector* dunia di sektor energi. Hal ini terlihat dari mulai adanya *concern* dari Pemerintah Indonesia dalam penggunaan energi dan kendaraan ramah lingkungan, mulai dari kebijakan hingga dukungan konkrit mendorong industri energi dalam negeri yaitu pembuatan baterai listrik.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, melalui kebijakan *Major Project* RPJMN 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional (PSN), berkembangnya kawasan industri berbasis dasar nikel didukung untuk tumbuh di Kepulauan Maluku, yaitu KI Teluk Weda, KI Pulau Obi, dan Smelter Nikel Buli. Nilai ekspor





Quaternary sector of the economy

Sumber : .wikipedia.org

“
 Infrastruktur PUPR
 menjadi kunci bangkitnya
 quaternary activity
 di sekitar energi di
 Indonesia”

nikel dalam bahan mentah pada tahun 2014 hanya mencapai USD 1 Miliar atau Rp 15 Triliun. Begitu ekspor bahan mentah dihentikan oleh pemerintah pada tahun 2017, nilai ekspor nikel pada tahun 2021 mencapai lebih dari Rp 300 Triliun (Widodo, 2022). Pengembangan kawasan industri tersebut bukan hanya mengenai kegiatan industri di dalam kawasannya, namun juga perlu dukungan infrastruktur sehingga dampak kerusakan lingkungan dapat lebih diantisipasi, kegiatan industri menjadi lebih produktif, investor menjadi lebih tertarik untuk berinvestasi, sehingga dapat memberikan devisa negara lebih maksimal.

Namun penciptaan iklim kondusif pengembangan industri itu pun baru dapat dimulai ketika insentif cukup besar sehingga investor tertarik untuk masuk. Salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan investor untuk berinvestasi di suatu kawasan adalah ketika dukungan infrastruktur dasar tercukupi, meliputi

air baku untuk kebutuhan kegiatan industri, jalan akses ke perkotaan dan simpul transportasi terdekat, air minum dan sanitasi permukiman, serta perumahan bagi pekerja.

Kepastian dan ketepatan infrastruktur untuk mendukung industri dapat diwujudkan melalui perencanaan yang tepat dan pembangunan yang nyata dibutuhkan oleh investor. Dengan demikian, infrastruktur PUPR menjadi kunci bangkitnya *quaternary activity* di sektor energi di Indonesia. (**)

**Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan pendapat/kebijakan institusi.*

Referensi

Menteri ESDM. (2020, October 20). *Transisi Energi Mutlak Diperlukan*. Retrieved from Ditjen EBTKE Kementerian ESDM: <https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/10/22/2667/menteri.arifin.transisi.energi.mutlak.diperlukan?lang-en>

CNBC Indonesia. (2022, Juli 03). *Situasi Makin Horor, 5 Negara Eropa Ini Sudah 'Teriak' Krisis*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220703164254-4-352539/situasi-makin-horor-5-negara-eropa-ini-sudah-teriak-krisis>

Widodo, J. (2022, Agustus 05). *Jokowi*.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).

Menteri Perindustrian. (2021, October 2016). *Siaran Pers: Siap Masuki Era Kendaraan Listrik, Indonesia Fokus Bangun Ekosistem*. Retrieved from: <https://kemenperin.go.id/artikel/22865/Siap-Masuki-Era-Kendaraan-Listrik,-Indonesia-Fokus-Bangun-Ekosistem>

Investing News Network. (2022, June 08). *Top 9 Nickel-producing Countries*. Retrieved from <https://investingnews.com/daily/resource-investing/base-metals-investing/nickel-investing/top-nickel-producing-countries/>

Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2021. (2021, November). Retrieved from: <https://data.pu.go.id/>.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Peta Sebaran KEK. (2022). Retrieved from: <https://kek.go.id/peta-sebaran-kek>.



Jajaran BPIW saat melaksanakan workshop dan sharing knowledge manajemen risiko
Sumber : Kompu BPIW

Bulan Kepatuhan, Wujud Komitmen BPIW dalam Menjaga Kualitas Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR



Riska Rahmadia, S.T., M.P.P.M.

Kepala Bidang Kepatuhan Intern
Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
BPIW Kementerian PUPR

Kepatuhan intern merupakan sebuah pendekatan yang diambil organisasi/instansi khususnya instansi pemerintahan agar patuh dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai regulasi/peraturan yang berlaku. Sedangkan manajemen risiko merupakan mekanisme pengawasan dan pengelolaan risiko pelaksanaan tugas organisasi yang dapat mengganggu pencapaian sasaran organisasi. Kepatuhan intern dan manajemen risiko digunakan sebagai kesatuan pendekatan dalam mengawal dan mengawasi pencapaian sasaran organisasi dengan tetap memperhatikan regulasi/standar yang telah ditetapkan.

Bidang Kepatuhan Intern sebagai garda terdepan dalam pengendalian dan pembinaan kepatuhan intern dan manajemen risiko di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) berperan dalam meningkatkan pemahaman, komitmen, efektivitas dan maturitas penerapannya. Manfaat dari diterapkannya kepatuhan intern dan manajemen risiko adalah terciptanya **proteksi bagi pimpinan maupun organisasi** terhadap kemungkinan yang dapat mengganggu organisasi dalam mencapai sasarnya.

Dalam rangka melaksanakan amanat di atas, Bidang Kepatuhan Intern menginisiasi kegiatan internalisasi, sosialisasi, *workshop*, *sharing knowledge* dan *benchmarking* melalui sebuah rangkaian acara Bulan Kepatuhan. Acara yang dikemas dalam rangkaian tanpa jeda tersebut diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman, kesadaran, serta kapasitas pelaksanaan kepatuhan intern dan manajemen risiko bagi pegawai di lingkungan BPIW. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 17 Juni hingga 6 Juli 2022, melibatkan

“ pemetaan titik rawan gratifikasi merupakan salah satu kunci keandalan kualitas produk BPIW, yang dapat mengawal program pengembangan infrastruktur PUPR benar-benar berlandaskan pada objektivitas dan kekuatan analisis pengembangan wilayah ”



Kepala Bidang Kepatuhan Intern, Pusnas BPIW saat menyampaikan pendapat dalam sesi diskusi
Sumber : Kompu BPIW

narasumber yang mewakili pemangku kebijakan, pelaksana lapangan, pakar, dan diikuti oleh seluruh insan BPIW.

Salah satu kegiatan dalam Bulan Kepatuhan adalah internalisasi dan sosialisasi yang berkaitan dengan praktek anti gratifikasi kepada petugas kesatkeran dan juga seluruh pegawai BPIW, dengan mengundang Inspektorat Jenderal dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada acara tersebut disampaikan bahwa selama tahun 2021, 19,9 persen dari seluruh praktek korupsi berakar dari gratifikasi.

Di Kementerian PUPR sendiri, data dari Inspektorat Jenderal menyebutkan bahwa sebanyak 17 laporan terkait gratifikasi disampaikan kepada KPK yang dikategorikan dalam beberapa bentuk diantaranya uang (senilai Rp 353.254.000, USD 500, dan SGD 100), barang (senilai Rp 11.417.380), serta makanan dan minuman (senilai Rp 1.100.000). Dari kegiatan tersebut diperoleh pembelajaran terkait pengembangan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), seperti pentingnya pemetaan titik rawan gratifikasi di unit kerja, serta pelaporan gratifikasi.

Penulis berpendapat bahwa **pemetaan titik rawan gratifikasi** merupakan salah satu kunci keandalan kualitas produk BPIW, yang dapat mengawal program pengembangan infrastruktur PUPR benar-benar berlandaskan pada objektivitas dan kekuatan analisis pengembangan wilayah. Selain itu, tersedianya mekanisme **pelaporan gratifikasi** mampu menjawab keresahan pegawai BPIW dalam menyikapi praktik gratifikasi yang sangat berpotensi muncul di lingkungan kerja sehari-hari.

Kegiatan lain yang menjadi bagian dari rangkaian pelaksanaan Bulan Kepatuhan yaitu *workshop* dan *benchmarking* manajemen risiko bekerja sama dengan praktisi dan organisasi yang lebih matang dalam penerapan manajemen risiko. Kegiatan ini sangat membantu seluruh peserta untuk memahami penerapan manajemen risiko di lingkungan kerjanya, lebih jauh lagi membantu meningkatkan kapasitas Bidang Kepatuhan Intern sebagai pembina penerapan manajemen risiko di BPIW.

Terdapat dua pembelajaran dalam rangka pengembangan penerapan manajemen risiko di BPIW, yang pertama adalah **kuantifikasi risiko** pada aktivitas identifikasi risiko. Saat ini, penerapan manajemen risiko di BPIW masih menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil pengukuran risiko masih sebatas memberikan *warning* atau peringatan kepada pimpinan organisasi, dan belum memperlihatkan nilai potensi kerugian yang terukur.

Penerapan manajemen risiko berbasis kuantitatif diharapkan dapat memberi manfaat lebih bagi organisasi, khususnya dalam memberikan proteksi terhadap kegagalan pencapaian sasaran yang dapat merugikan organisasi. Pendekatan kuantitatif mampu menggambarkan valuasi dampak keuangan untuk satu risiko dan sasaran organisasi yang tidak tercapai, serta kebutuhan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menanganinya, sehingga bentuk pengendaliannya lebih spesifik dan mampu melindungi organisasi dari nilai kerugian tertentu di luar toleransi organisasi. Hal ini merupakan inovasi pendekatan manajemen risiko di lingkungan pemerintahan yang dapat mulai diterapkan

Penerapan manajemen risiko berbasis kuantitatif diharapkan dapat memberi manfaat lebih bagi organisasi, khususnya dalam memberikan proteksi terhadap kegagalan pencapaian sasaran yang dapat merugikan organisasi.

untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko dan mendorong pencapaian tujuan organisasi BPIW.

Pembelajaran kedua dalam rangka pengembangan manajemen risiko adalah dengan melakukan penilaian **efektivitas dan maturitas manajemen risiko** di BPIW. Sesuai Surat Edaran Inspektur Jenderal No. 5/SE/IJ/2021 tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR, efektivitas penerapan manajemen risiko merupakan tingkatan suatu organisasi dalam memahami dan mengelola risiko, dan tingkat efektivitasnya adalah kondisi penerapannya pada saat evaluasi dilakukan.

Sedangkan maturitas manajemen risiko merupakan tingkat kematangan organisasi dalam menerapkan manajemen risiko. Dari sudut pandang penulis, penilaian efektivitas dan maturitas manajemen risiko diperlukan sebagai alat ukur dalam melihat bagaimana kinerja penerapan manajemen risiko di BPIW. Berdasarkan penilaian ini, Bidang Kepatuhan Intern dapat memetakan tingkat efektivitas dan maturitas penerapan manajemen risiko pada setiap unit kerja, untuk kemudian menentukan pendekatan dan pembinaan yang tepat bagi masing-masing unit

kerja sehingga dapat tercapai kesetaraan pemahaman, kompetensi dan kapasitas pengelolaan risiko.

Dari pelaksanaan diskusi pada rangkaian kegiatan Bulan Kepatuhan, penulis mencoba mengidentifikasi salah satu risiko utama BPIW, yaitu dokumen RPIW sebagai produk utama BPIW tidak diacu dalam proses pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR. Dalam mengelola risiko ini, pendekatan kuantitatif diharapkan dapat memperlihatkan *value* potensi kerugian yang akan dihadapi, seperti nilai pagu kegiatan penyusunan RPIW, nilai infrastruktur yang mangkrak ataupun tidak optimal, karena tidak adanya keterpaduan, nilai potensi wilayah atau kawasan strategis yang tidak dapat dikembangkan, dan kerugian lainnya.

Lebih lanjut dalam kaitannya dengan praktik anti gratifikasi, pelaksanaan PPG diharapkan mampu menjaga keandalan RPIW yang bersih dari intervensi yang tidak seharusnya, sehingga pembangunan infrastruktur benar-benar menyelesaikan isu strategis di lapangan. Dari sudut pandang internal, kepatuhan intern dan manajemen risiko mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi insan BPIW.

Kementerian PUPR telah mengeluarkan beberapa inovasi pengendalian sebagai wujud perlindungan terhadap kualitas perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PUPR No. 6 tahun





Roni Kountur ketika menyampaikan materi terkait manajemen risiko
 Sumber : Kompu BPIW

2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 28 April 2022, setelah sebelumnya dikeluarkan Surat Edaran Kepala BPIW Nomor 20/KPTS/KW/2021 tentang Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) pada 11 November 2021 yang operasionalisasinya ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis RPIW.

Peraturan Menteri PUPR terkait perencanaan dan pemrograman tersebut mengatur penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur yang mengacu pada RPJMN, Renstra PUPR dan rencana spasial yang ada, serta memperhatikan kebijakan dan strategi serta RPJMD yang berlaku. Dokumen yang sama juga mengatur mekanisme pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR yang dilaksanakan melalui tahapan pelaksanaan Rakorbangwil, Konreg, dan penyusunan Renja. Pengelolaan data dan informasi mendukung penyusunan perencanaan dan pembangunan infrastruktur juga dimuat dalam peraturan ini.

Lebih jauh pada ranah perencanaan, Pedoman Muatan RPIW disusun untuk menjaga dokumen perencanaan yang sistematis dan terstandarisasi untuk menghindari perbedaan pandangan dan kesetaraan terkait muatan materi RPIW. Hadirnya peraturan dan pedoman serta petunjuk teknis ini diharapkan menjadi instrumen pengendali yang mampu melindungi Kementerian PUPR terutama BPIW dari risiko kegagalan dalam perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR.

“ Untuk itu, Bulan Kepatuhan akan dilaksanakan secara periodik dan diharapkan dapat menjadi “titik tinggal landas” BPIW yang berbudaya patuh dan berbudaya sadar risiko dalam mengemban tugas sebagai institusi perencana sekaligus penjuror pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR.

Bulan Kepatuhan yang digagas Bidang Kepatuhan Intern Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan. Kepatuhan merupakan salah satu indikator yang membuktikan bahwa suatu organisasi berkomitmen atas sebuah sistem yang mengatur atau mengendalikan proses bisnis organisasi tersebut dalam mencapai keluarannya.

Proses bisnis yang digunakan sebagai acuan alur komunikasi dan alur bekerja, merupakan kumpulan aktivitas yang perlu dijaga metode dan rangkaiannya sehingga terlindungi kualitasnya sejak tahap perencanaan hingga pemanfaatan produk akhir. Penulis memahami bahwa penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di BPIW masih memiliki ruang yang luas dalam perbaikan dan pengembangannya.

Untuk itu, Bulan Kepatuhan akan dilaksanakan secara periodik dan diharapkan dapat menjadi “titik tinggal landas” BPIW yang berbudaya patuh dan berbudaya sadar risiko dalam mengemban tugas sebagai institusi perencana sekaligus penjuror pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR.(**)

Antara Papua, Rengganis, dan Pemberdayaan

Karya : Dr. Doedoeng Zenal Arifin, ST, MT

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

*Rengganis cintaku, berjarak ribuan mil aku
sampaikan indah matahari timur, yang
ditatap melalui celah kaca jendela Aston Niu
Manokwari.*

*Bayanganku menggambarkanmu tergugah dari
lelap dengan rona pipi merahmu. Membuka
tirai jendela kamar ditemani secangkir teh
sehangat pelukan kasih. Dekat di belakangmu,
Vina Panduwinata mengajak mengawali
hari dengan gagasan rejuvenation, spirit baru
“September Ceria”.*

*Di tanah Parahiyangan daun-daun jati
bergesekan dihembus angin kemarau, suara
lirihnya melarutkanmu dalam kehangatan
musim pancaroba khatulistiwa.*

*Perjalanan jauh dari Wasior hingga
Pegunungan Arfak yang menakjubkan,
membuka kenangan saat awal kita bertemu.
Kuperhatikan anak-anak Papua yang kumal
berlarian di luar jam sekolah, tetiba aku
teringat kembali keteguhan dan pengabdianmu
pada sesama. Kepedulianmu pada anak-anak
dan pendidikan membuatmu rela mengajar di
tempat terpencil dan meninggalkanku dalam
kesendirian.*



*Masih terbayang di ingatan ketika kamu
mengatakan, “cintaku pada pemberdayaan
mungkin dapat mengalahkan cintaku padamu.
Kalau kamu mencintaiku, cintailah mereka
yang terbelakang...” Ucapmu datar. Aku tidak
mampu menjawab, respon spontan muncul
dari bulir hangat di sudut mata mendegradasi
kelelakianku yang membayangkan bahwa
perempuan seusiamu menginginkan
kenyamanan hidup.*

*Karena keteguhanmu itulah aku begitu
mencintaimu dan selalu menjaga asa untuk
menghabiskan sisa umurku denganmu. Karena
keteguhanmu itulah yang membajakan
semangat pengabdianku pada Papua.*

*Satu hal yang aku yakin.... Kamu pasti lebih
cantik hari ini...tetiba Aku terjaga dari imajinasi
yang merona akibat guncangan 4WD menapaki
jalanan Pegaf yang rusak parah.....*

Anggi Pegaf, 230722



Su. fiber - Kontipw BPIW

bpiw.pu.go.id

Ulusan Dina Rachmayati, ST, MT.

Sub Koordinator Daerah Istimewa Yogyakarta, Jateng, dan Jatim, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II



Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang kaya akan tempat wisata. Provinsi ini memiliki 5 KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), dan 10 KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional). Pusat pariwisata Jawa Tengah berada di KSPN Borobudur. KSPN Borobudur dikenal sebagai situs warisan dunia yang ditetapkan oleh Unesco sejak tahun 1991. Pada tahun 2019, KSPN Borobudur menyumbang 6,66% dari PDRB Pariwisata Jawa Tengah. Sebelum pandemi (2018) pengunjung Borobudur mencapai 3,99 Juta orang dimana 242 ribu diantaranya merupakan wisatawan asing. KSPN Borobudur masih digunakan sebagai tempat ibadah umat Budha, yang sebelum pandemi (2018) diadakan setiap tahun dengan pengunjung mencapai 20 ribu orang saat perayaan Waisak. Titik balik kunjungan wisata diprediksi tahun 2022 dimana kurva pandemi sudah mulai turun. Sehingga saat libur lebaran 4 Mei 2022 terdapat 27.332 orang pengunjung candi Borobudur.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, menetapkan Borobudur - Yogyakarta dan sekitarnya sebagai Destinasi Pariwisata Nasional. Deliniasi DPN Borobudur

-Yogyakarta tersebut meliputi KSPN Borobudur bersama KSPN Yogyakarta, KSPN Prambanan, KSPN Merapi-Merbabu, dan KSPN Dieng. Hal ini searah dengan dokumen ITMP atau yang dikenal juga sebagai Rencana Induk Pariwisata Terpadu Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (RIPT BYP) yang mengamanatkan bahwa sebagai salah satu situs budaya dunia, kunjungan wisatawan di candi Borobudur harus dibatasi sesuai Daya Dukung dan Daya Tampungnya.

Berdasarkan RIPT BYP daya dukung wisatawan maksimum perhari adalah sebagai berikut Candi maksimum 1792 orang per hari, Teras 7.322 orang per hari dan Taman 20.616 orang per hari. Oleh karena itu terdapat beberapa Strategi Penyebaran Pengunjung pada Kawasan Borobudur dilakukan pada:

1. Zona 1 & 2 (Zona Inti Candi Borobudur) melalui :Sistem Tiket dan Waktu Kunjungan, Pengaturan Sirkulasi Pengunjung, dan Perbaikan/Penambahan Fasilitas Zona 2
2. Zona 3-5 (Zona Teras dan Sekitar Candi) melalui: Pembangunan panggung kesenian rakyat dan pusat souvenir Borobudur, Pengembangan Balkondes, Pengembangan Desa dan Atraksi di Sekitar Kawasan Borobudur
3. Dalam jangka waktu 25 tahun ke depan dilakukan perluasan pengembangan dari

Pengembangan DPSP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung terwujudnya percepatan pengembangan pariwisata di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (BYP) guna percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hal itu terungkap dalam kunjungan lapangan Tim Kementerian PUPR ke Kawasan DPSP BYP dan Jawa Tengah yang dilakukan Senin, 30 Mei 2022-Rabu, 1 Juni 2022.

Kunjungan Tim Kementerian PUPR dipimpin langsung Kepala *Central Project Management Unit* (CPMU) Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) Kementerian PUPR, Ir. Achmad Gani Ghazaly Akman, M. Eng.SC yang juga merupakan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan. Hadir juga mendampingi pada kunjungan tersebut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR (Kapuswil II) BPIW, Kuswardono serta jajaran. (**)

TDA Borobudur - Yogyakarta - Prambanan ke Joglosemar, yaitu: KSPN Dieng dsk (wisata alam dan budaya), KSPN Sangiran dsk (wisata edukasi kepurbakalaan), KSPN Karst Gunung Sewu dsk (wisata alam geopark), KSPN Karimunjawa dsk (wisata alam), dan PKN Surakarta (wisata budaya).

Terdapat 17 *Major project* Dukungan Infrastruktur PUPR untuk mendukung KSPN Borobudur, KSPN Prambanan, dan Perkotaan Yogyakarta sebagai pusat layanan, serta dukungan layanan aksesibilitas darat dan udara. Sedangkan untuk pengembangan KSPN Dieng, KSPN Karimunjawa, KSPN Sangiran, KSPN Merapi-Merbabu, dan KSPN Pansela sebagai lokasi sebaran kunjungan wisatawan dari KSPN Borobudur juga harus mulai diprogramkan. Oleh karena itu saat ini sudah selesai disusun dokumen MADA *BYP Extension* (Dokumen Perluasan *Market Analysis* dan *Demand Assessment BYP*). Berdasarkan hasil analisis dari Dokumen Perluasan MADA BYP tersebut, dari 5 KSPN di Jawa Tengah tersebut yang paling potensial untuk dikembangkan adalah KSPN Dieng, KSPN Karimunjawa, KSPN Gunung Sewu, dan KSPN Sangiran. (**)

BPIW Lakukan Kunjungan Lapangan ke IKN Nusantara

BPIW Kementerian PUPR melakukan kunjungan lapangan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu, 15 Juni 2022. Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk memberikan gambaran pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR di IKN Nusantara. Hal ini menurutnya penting terutama bagi generasi muda BPIW.

Beberapa tempat yang dikunjungi antara lain Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN). Titik Nol IKN adalah sebuah monumen di kawasan IKN Nusantara atau tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Titik Nol difungsikan sebagai titik panduan utk merencanakan lokasi pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara. (**)

BPIW tengah memperkuat perannya sebagai integrator dan kolaborator dalam pembangunan infrastruktur PUPR baik pada lingkup internal Kementerian PUPR maupun dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penyusunan dan penetapan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), sebagai dokumen perencanaan infrastruktur yang salah satunya memuat rencana aksi pembangunan infrastruktur PUPR dapat menjadi input dalam proses pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR. Penyusunan RPIW antara lain dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek antara lain aspek tata ruang, lintas sektor, dan lintas kewenangan serta memperhatikan perkembangan isu-isu strategis. Isu - isu strategis pembangunan infrastruktur saat ini salah satunya adalah pembangunan IKN Nusantara. Kunjungan IKN Nusantara merupakan salah satu agenda dalam rangkaian Kegiatan Rapat Evaluasi Kegiatan TA 2021, Percepatan Kegiatan TA 2022, dan Persiapan Kegiatan TA 2023 di Balikpapan pada 13-15 Juni 2022 yang lalu.

Dalam rangka percepatan kegiatan di tahun 2022 dan persiapan kegiatan di tahun 2023, BPIW fokus pada penyusunan RPIW Provinsi dengan memperhatikan isu-isu strategis yang tengah berkembang. IKN Nusantara, sebagai salah satu kawasan strategis yang akan difungsikan sebagai kawasan inti pemerintahan Indonesia di masa depan, merupakan agenda nasional yang perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan pemrograman di Kementerian PUPR.

Kunjungan lapangan ke IKN Nusantara ini antara lain mengunjungi Titik Nol IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai titik panduan dalam perencanaan lokasi pembangunan infrastruktur PUPR. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur Ditjen Cipta Karya Rozali Indra Saputra menyampaikan mengenai pembangunan IKN Nusantara yang akan dimulai dengan pembangunan Sumbu Kebangsaan, Istana Presiden, dan Istana Negara sebagai simbol eksekutif, yudikatif, dan legislatif negara. Selanjutnya dijelaskan

rencana pembangunan Perumahan ASN berupa Rumah Susun dan Rumah Pejabat Negara yang dibiayai oleh APBN saat ini masih dalam tahap penyusunan *basic design* untuk dilanjutkan dengan konstruksi pada akhir 2022. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) XII Kalimantan Timur Ditjen Bina Marga, Junaidi menyampaikan bahwa konektivitas di wilayah IKN akan didukung antara lain dengan rencana pembangunan jalan KIPP IKN, rencana jalan *freeway* dan jaringan jalan tol IKN.

Selanjutnya kunjungan juga dilakukan ke lokasi Bendungan Sepaku Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto menjelaskan tentang penyediaan air baku, dengan target pada 2024 akan terbangun bendungan dan *intake* Sepaku berkapasitas total tiga ribu liter. Dengan adanya kegiatan kunjungan lapangan ke IKN Nusantara ini, diharapkan akan memberikan gambaran pembangunan infrastruktur PUPR di kawasan strategis pemerintahan, terutama bagi para Generasi Muda BPIW. (**)



Ulasan

Dea Mustika Mufarrihah, ST

Perencana Ahli Pertama Sekretariat BPIW



SOSIALISASI PENGGUNAAN APLIKASI **ArcGIS Survey123**



Ulasan
Nabiatul Arifah, S.PWK.
Perencana Ahli Pertama Sekretariat BPIW

BPIW Gelar Pelatihan Pelaksanaan Survei Kolaborasi Tahap II

BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I menggelar Pelatihan Pelaksanaan Survei Kolaborasi Tahap II dalam Rangka Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting, Kamis, 12 Mei 2022. Pelatihan tersebut dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan Survei Kolaborasi Tahap II tersebut di 82 kabupaten/kota.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono saat membuka kegiatan itu mengatakan pelatihan ditujukan kepada tim dari pusat maupun balai yang akan melaksanakan survei. Pada survei tahap I sudah dilakukan di 35 kabupaten/kota di Indonesia dan dipilih lima kecamatan dan masing-masing kecamatan dipilih lima desa. Agar pelaksanaan survei berjalan efektif dan efisien menurut Hari telah dibuat *Standard Operating Procedure (SOP)* yang menjadi pedoman pelaksanaan survei.**)

BPIW Kementerian PUPR melakukan survei kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan dalam rangka Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022. Survei kolaborasi pada Tahap II dan III yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei dan 30 Mei 2022 ini memanfaatkan ArcGIS Survey123 untuk mengefektifkan pelaksanaan survei kolaborasi. Survei Kolaborasi Tim Balai terdiri dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)-BKKBN, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), dan Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan (BKPP).

Pelatihan Pelaksanaan Survei Kolaborasi Tahap II dalam Rangka Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting diselenggarakan BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I sebagai persiapan pelaksanaan Survei

Kolaborasi. Pada survei tahap I, penggunaan aplikasi ArcGIS Survey123 telah dimanfaatkan oleh BPIW, yang kemudian pada tahap selanjutnya akan disosialisasikan untuk Balai dari Cipta Karya maupun Perumahan untuk pelaksanaan Tahap II dan III.

Pemanfaatan aplikasi ArcGIS Survey123 yang disosialisasikan pada pelatihan ini mengefektifkan proses pengamatan dengan pendekatan integrasi informasi spasial. Hal ini dapat mempercepat proses verifikasi dan validasi data lokus survei yang telah diolah dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Melalui pemanfaatan aplikasi ini, data yang dikumpulkan lengkap dengan fitur *tagging* yang menjelaskan informasi lokasi dari data yang disurvei. Informasi lokasi ini membantu proses pelaporan hingga skenario penanganan bidang Perumahan dan Cipta Karya. Dari hasil

tagging lokasi dapat diketahui lokasi RTLH *eligible* yang mengelompok yang potensial untuk ditangani melalui infrastruktur permukiman.

Tim Pelaksana Tugas Data dan Informasi BPIW yang memfasilitasi aplikasi ArcGIS Survey123 berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal, untuk mengelola database survei. Database ArcGIS Survey123 ini yang akan menampung seluruh hasil pendataan berupa data teks, foto/gambar hasil survei, dan koordinat lokasi dari pelaksanaan survei kolaborasi yang mengikuti pelatihan, yaitu dari Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, dan BPIW, serta balai-balai dari Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan.**)

BPIW Dorong Percepatan Pembangunan di DPSP Manado-Bitung-Likupang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Manado-Bitung-Likupang, Sulawesi Utara (Sulut). Demikian terungkap dalam kunjungan kerja Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra beserta jajaran ke DPSP Manado-Bitung-Likupang, Sulut, Kamis-Jumat, 21-22 April 2022.

Arief menyatakan, pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia salah satunya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Pada tatanan normal baru hidup berdamaian dengan Covid-19, salah satu sektor ekonomi yang dapat pulih cepat adalah sektor pariwisata," ungkap Arief. Dengan begitu, ujarnya, Kementerian PUPR terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur PUPR di DPSP Manado-Bitung-Likupang untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Manado-Bitung-Likupang dan sekitarnya.**

Arah Pembangunan Wilayah Sulawesi RPJMN 2020-2024 menyebutkan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Manado-Bitung-Likupang sebagai salah satu proyek prioritas strategis (*Major Project*), diharapkan DPSP Manado-Bitung-Likupang dapat membantu percepatan pertumbuhan ekonomi paska pandemi Covid-19 di Pulau Sulawesi khususnya di Sulawesi Utara, terutama dari sektor pariwisata. Guna melaksanakan amanat RPJMN 2020-2024 tersebut pada tahun 2020 yang lalu Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III melakukan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pertumbuhan Kawasan Permukiman dan Kawasan Strategis di Metropolitan Bimindo.

Dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2020-2024 serta merespon

dinamika pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur PUPR di Wilayah Metropolitan (WM) Bimindo diperlukan strategi agar target pengembangan WM Bimindo berikut infrastruktur PUPR didalamnya bisa terwujud dan memberikan manfaat bagi warga di WM Bimindo. Salah satu strategi tersebut yaitu Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW melakukan kunjungan lapangan (kunlap) WM Bimindo pada tanggal 21-22 April 2022.

Tujuan dari pelaksanaan kunlap tersebut yaitu melakukan pengkajian terhadap rencana dan program yang telah disusun kajian perencanaannya pada tahun 2020. Selain daripada itu bertujuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan DPSP Manado-Bitung-Likupang serta pembangunan infrastruktur PUPR DPSP Manado-

Bitung-Likupang. Program-program infrastruktur PUPR yang menjadi target kunjungan lapangan yaitu Kawasan Pantai Malalayang, *Manado Outer Ring Road* (MORR) 3 (Tahap I dan II), jembatan dan oprit Boulevard 2, TPA regional Mammitarang, main roundabout KEK Likupang, drainase KEK Likupang, sarana hunian pariwisata (Sarhunta) mendukung KEK Likupang, air baku KEK Likupang, Kawasan Pantai Paal, Jalan Bitung-Girian- Likupang (Akses Likupang dari Bitung), dan Pelabuhan Samudera Bitung.

Diharapkan sesudah dilaksanakannya kunjungan lapangan bisa mendapatkan gambaran utuh dan terkini terkait isu, tantangan, dan permasalahan pengembangan WM Bimindo sebagai bahan baku dalam menyusun rekomendasi perencanaan dan pemrograman WM Bimindo kedepannya.**



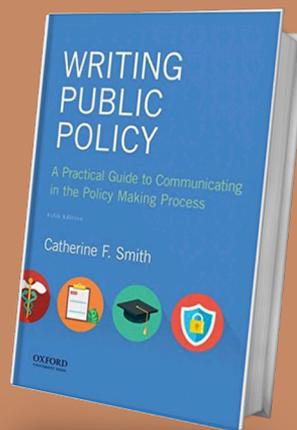
Ulasan

Raden Dady Indratmo

Subkoordinator Pelaksana Tugas Pengembangan Infrastruktur Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III

Komunikasi Kebijakan Publik

Judul Buku	: <i>Writing Public Policy: A Practical Guide to Communicating in The Policy Making Process</i>
Pengarang	: Catherine F. Smith
Penerbit	: Oxford University Press
Tempat Terbit	: USA
Tahun Terbit	: 2019
ISBN	: 978-0-19-085423-2



Buku panduan ini dibuat untuk membangun pengetahuan, kompetensi, dan pemikiran kritis yang dibutuhkan untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan publik. Dalam proses pembuatan kebijakan publik, sangat dibutuhkan pengetahuan yang meliputi proses pembuatan sebuah kebijakan, situasi saat suatu kebijakan dikomunikasikan, dan kekuatan bahasa dalam penyampaian kebijakan.

Pengetahuan kebijakan publik akan memandu kita untuk mengetahui apa yang harus dilakukan? kapan harus melakukannya? Dan mengapa harus melakukan hal itu?. Kompetensi membimbing kita bagaimana melakukan sesuatu, sedangkan pemikiran kritis memandu kita untuk mempertimbangkan beberapa pilihan yang dihadapi.

Buku ini mengambil sudut pandang seorang praktisi tentang apa yang harus dilakukan sebagai profesional dalam mengkomunikasikan kebijakan di tempat kerjanya, khususnya komunikasi tertulis formal. Buku ini juga memaparkan jenis dokumen yang biasa digunakan di lembaga pembuat kebijakan sektor pemerintah dan non pemerintah.

Tujuan panduan di dalam buku ini adalah membantu para komunikator kebijakan dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk dalam edisi ini diangkat pula pengaruh diskursus politik dalam pembuatan kebijakan publik.

Bagian paling sulit dalam proses kebijakan publik adalah saat mengkomunikasikannya, dan itulah mengapa buku ini menjadi penting. Apalagi saat ini dengan berkembangnya zaman, maka berubah pula budaya komunikasi publik. Majunya teknologi

yang merubah pola analisa algoritma "big data", meningkatnya akses ke data pemerintahan, dan komunikasi robot. Semuanya berpengaruh menjadikan komunikasi kebijakan menjadi ambigu. Belum lagi berbicara konteks aliran seperti populisme ekstrim, radikal konservatif, anti-pemerintah dan lain-lain. Hal-hal tersebut bukan sesuatu yang baru tetapi berpengaruh pada diskursus politik dan proses pembuatan kebijakan publik. Dan secara tidak langsung pun hal tersebut membuat pekerjaan komunikasi kebijakan menjadi pekerjaan yang cukup berat.

Buku ini disajikan dengan fitur-fitur spesial, antara lain:

1. Ilustrasi dan skenario dari pengalaman penulis dan organisasi
 2. Sampel tulisan dari professional, pelajar, dan masyarakat
 3. Komentar pada masing-masing sampel
 4. Metode umum dalam mengkomunikasikan kebijakan
 5. Petunjuk khusus untuk jenis-jenis dokumen
 6. Teknik menulis dengan tegas dan jelas
- Dan semua ilustrasi, skenario, dan sampel yang ada di buku ini, diambil dari pekerjaan asli (real policy work).

Pemaparan dalam buku ini terbagi dalam 10 bab. Dua bab pertama membahas tentang proses, sedangkan sisanya membahas praktiknya. Pada tahap kesimpulan dibahas mengenai etika para komunikator kebijakan, dan ada satu bab tambahan yaitu bagaimana teknik menulis memo kebijakan yang baik dan jelas.

Buku panduan ini ideal bagi mereka yang mempersiapkan karir di bidang politik, pemerintahan, hubungan masyarakat, hukum, kebijakan publik, jurnalisme, pekerjaan sosial, atau dalam peran apa pun yang terkait dengan urusan publik.

(Mutri Batul Aini, Tiara Titi Kartika)

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim melalui Pembangunan Infrastruktur



Isma Aini, S.T

Perencana Ahli Pertama
Sekretariat BPIW Kementerian PUPR

Emisi gas rumah kaca terus meningkat secara drastis sejak revolusi industri. Hal tersebut menjadi penyebab utama akselerasi perubahan iklim global. Aktivitas manusia pada sektor energi, industri, agrikultur, dan pengembangan infrastruktur berkontribusi atas sebagian besar emisi gas rumah kaca di seluruh dunia.

Baru-baru ini, Jakarta menjadi salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia akibat tingginya emisi dari aktivitas transportasi, permukiman dan kawasan industri. Tingginya polutan di Jakarta bahkan terlihat secara kasat mata. Intergovernmental Panel on *Climate Change* (IPCC) pada tahun 2021 melaporkan bahwa suhu rata-rata dunia akan meningkat hingga 1,5°C pada tahun 2030 jika emisi yang dihasilkan terus sama seperti kondisi saat ini.

Pada beberapa tahun terakhir, Indonesia telah merasakan perubahan suhu ekstrem dan suhu harian lebih tinggi dari suhu maksimum rata-rata. Sesuai dengan pengamatan BMKG, anomali suhu pada Maret 2022 ini merupakan anomali tertinggi ke-9 sepanjang periode data pengamatan sejak 1981. Meningkatnya suhu ekstrem ini juga telah dirasakan di berbagai belahan dunia lainnya.

Kenaikan suhu bumi dalam jangka panjang akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer bumi dikenal sebagai perubahan iklim. Perubahan iklim lambat laun mengubah pola keseimbangan alam yang mengakibatkan perubahan cuaca sulit diprediksi, seperti terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan atau peningkatan curah hujan pada waktu lainnya. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman bencana alam seperti peningkatan gelombang panas, kekeringan dan kebakaran hutan, banjir, serta kenaikan muka air laut akan terus meningkat. Risiko ancaman bencana dapat diperparah dengan tingginya tingkat kerentanan dan rendahnya kapasitas masyarakat terdampak dalam menghadapi ancaman.

Salah satu ancaman bencana akibat perubahan iklim bagi Indonesia adalah banjir rob di kawasan pesisir. Dengan garis pantai sepanjang 81.000 Km dan tingginya populasi masyarakat

Ilustrasi Perubahan Iklim
Sumber : nusantics.com

pesisir, Indonesia menjadi negara peringkat ke-5 di dunia yang rentan terhadap ancaman bencana tersebut. Banjir rob merupakan akumulasi dari kenaikan muka air laut, peningkatan intensitas curah hujan, serta diperparah dengan penurunan muka air tanah. Risiko kerugian secara sosial dan ekonomi tidak dapat dipungkiri, terutama pada kawasan-kawasan pesisir penggerak ekonomi seperti metropolitan Jakarta dan kota-kota Pantai Utara Jawa.

Perubahan iklim di Indonesia juga sangat berdampak pada berbagai sektor lainnya. Perubahan pada pola musim panas dan hujan berdampak pada pengurangan produksi pertanian dan perikanan yang dapat mengancam ketahanan pangan serta secara langsung berdampak bagi ekonomi masyarakat. Selain itu, perubahan iklim berdampak pula pada ketersediaan air bersih untuk kebutuhan domestik akibat penurunan kualitas dan kuantitas air serta penurunan kesehatan masyarakat terutama akibat peningkatan penyakit *waterborne diseases* (penyakit yang penularannya melalui air) seperti malaria dan demam berdarah.

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan tantangan nyata dan dampaknya akan semakin parah apabila tidak ada upaya mengurangi atau menghentikannya. Penanganan perubahan iklim dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu melalui mitigasi serta adaptasi. Mitigasi merupakan upaya menekan dan menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer sementara adaptasi adalah upaya penyesuaian untuk dapat mengurangi dampak negatif atas perubahan iklim.

Berdasarkan Paris *Agreement* tahun 2015, mitigasi perubahan iklim dengan menurunkan kadar emisi gas rumah kaca hingga separuh emisi global perlu

dilakukan agar kenaikan suhu bumi rata-rata tetap di bawah 20C pada tahun 2030. Target tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan laju dekarbonisasi hingga 12,9 persen atau delapan kali lebih cepat dari rata-rata upaya penurunan emisi global yang telah dilakukan saat ini. Namun, pada wilayah Asia Pasifik laju dekarbonisasi masih jauh di bawah target yaitu 0,9 persen. Berbeda dengan mitigasi, adaptasi dilakukan agar dapat meningkatkan daya tahan atau resiliensi dalam menghadapi risiko iklim. IPCC pada tahun 2022 menjabarkan bahwa adaptasi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan; perlindungan sosial untuk menurunkan kerentanan masyarakat terhadap ancaman iklim, adaptasi berbasis ekosistem melalui pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan, dan penerapan teknologi serta infrastruktur yang mengurangi dampak risiko iklim.

Mitigasi dan adaptasi memiliki tujuan yang berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan positif dalam penanganan perubahan iklim. Mitigasi dan adaptasi perlu dilakukan secara simultan dan perlu dilakukan secara menyeluruh oleh setiap pemangku kepentingan dari semua sektor. Dalam memerangi perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi perlu dilakukan lebih cepat dari laju perubahan iklim untuk segera mengurangi dampak negatif dari kerugian iklim dan agar dapat mencapai target global terkait penanganan perubahan iklim.

Infrastruktur dan Penanganan Perubahan Iklim

Sektor infrastruktur dimulai dari proses pembangunan hingga pengoperasiannya ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi menjadi salah satu penyumbang emisi karbon, namun di sisi lain infrastruktur yang dibangun dapat akselerasi pengendalian iklim apabila ditujukan untuk upaya mitigasi dan adaptasi. Selain

BENCANA IKLIM



- Peningkatan frekuensi gelombang panas
- Kekeringan dan risiko kebakaran
- Peningkatan banjir hingga 19%-37% pada 2030
- Kenaikan muka air laut hingga 10 cm pada 2030 dan dapat diperparah dengan penurunan muka tanah

SUMBERDAYA ALAM



- Penurunan ketersediaan air untuk domestik dan agrikultur, terutama pada musim kemarau
- Peningkatan salinisasi pada air tanah pesisir dan mata air
- Penurunan potensi produksi ikan tangkap serta ancaman terhadap biodiversitas laut
- Kerusakan terumbu karang akibat peningkatan suhu dan pengasaman air laut
- Hilangnya habitat flora dan fauna hutan

SEKTOR EKONOMI



- Penurunan produksi pertanian akibat perubahan cuaca serta penurunan kualitas air dan tanah
- Peningkatan gagal panen, terutama pada pertanian tadah hujan
- Ancaman terhadap penurunan produktivitas pekerja dan peningkatan biaya ekonomi untuk adaptasi akibat peningkatan suhu (peningkatan penggunaan pendingin ruangan)

MANUSIA



- Peningkatan korban akibat bencana banjir dan longsor
- Peningkatan penyakit *waterborne* dan *vector diseases* (diare, typhoid, kolera, malaria, DBD)
- Peningkatan risiko pada *food security*



Alokasi Anggaran Kementerian PUPR 2020-2024 terkait Ketahanan Iklim dan Penanganan Bencana
 Sumber : Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

semakin parahnya dampak perubahan iklim, kejadian pandemi Covid-19 yang berdampak langsung pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat merupakan momentum yang mengingatkan kembali bahwa seharusnya pembangunan infrastruktur dibangun untuk dapat berkelanjutan dalam menghadapi segala kemungkinan risiko saat ini maupun di masa depan.

Kementerian PUPR berperan dalam penanganan perubahan iklim nasional melalui pada 4 empat sektor, sumber daya air (SDA), sektor perumahan, permukiman, serta sektor jalan dan jembatan. Sejak beberapa tahun terakhir Kementerian PUPR telah menunjukkan langkah konkret dalam mendukung baik agenda nasional maupun internasional untuk mendorong pengurangan dampak perubahan iklim. Langkah nyata yang dilakukan Kementerian PUPR untuk mendukung pengurangan dampak iklim dan penanganan bencana adalah dengan pengalokasian anggaran sebesar 72,6 T atau 8 persen dari total APBN berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024.

Pada sektor SDA, pembangunan infrastruktur PUPR bidang sumber daya air dilakukan untuk dapat meningkatkan ketahanan air serta beradaptasi dalam menghadapi bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Pengelolaan infrastruktur sektor SDA perlu dilakukan mulai hulu hingga hilir. Pada kawasan hulu dilakukan optimalisasi pengoperasian bendungan dengan meningkatkan kapasitas asupan dan menyediakan gerbang tambahan untuk mengamankan ruang penyimpanan debit masuk

agar dapat menyimpan air lebih banyak pada musim penghujan dan menjamin ketersediaan air pada musim kemarau untuk kepentingan domestik maupun kepentingan domestik maupun kepentingan pertanian. Adapun penanganan kawasan hilir diantaranya dilakukan dengan normalisasi sungai, pengelolaan drainase perkotaan, dan pembangunan tanggul untuk melindungi kota-kota pesisir dari berbagai ancaman bencana iklim.

Pada sektor perumahan, penanganan perubahan iklim dilakukan dengan menerapkan prinsip desain bangunan yang hemat energi. Bangunan dirancang sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pemanfaatan cahaya dan sirkulasi alami, penggunaan material lokal, penyediaan ruang 70% ruang terbuka hijau, serta penyediaan resapan air pada bangunan. Prinsip bangunan tersebut telah diterapkan dalam pembangunan rumah susun di Politeknik PUPR Semarang dan rumah susun Rendah Energi di Tegal. Penyediaan 700 rumah khusus akibat bencana badai Siklon Tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur pada awal tahun 2022 juga merupakan salah satu langkah yang Kementerian PUPR dalam menangani bencana akibat perubahan iklim. Pembangunan rumah khusus dilakukan dengan menerapkan teknologi RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) yang memiliki konstruksi *knock down* yang cepat dibangun dan berketahanan terhadap bencana.

Pada sektor permukiman, Kementerian PUPR melalui mendukung penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau dalam penataan bangunan dan permukiman dengan menerbitkan Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung





Penyediaan Rumah Khusus bagi Masyarakat Terdampak badai Siklon Tropis Seroja
Sumber : Kementerian PUPR, 2022

Hijau. Melalui peraturan tersebut, diharapkan dapat mendorong implementasi pemenuhan persyaratan bangunan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Implementasi bangunan gedung hijau yang telah dilakukan, antara lain: Pasar Renteng di NTB, IAIN di Palangkaraya, Pasar Legi di Surakarta, Pasar Sukawati di Bali, Pasar Kota Pariaman di Sumatera Barat, Pasar PON Trenggalek di Jawa Timur; dan Gedung Kementerian PUPR. Selain penerapan bangunan gedung hijau, sektor permukiman juga mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) serta modernisasi TPA yang dikonstruksi dengan sistem pengelolaan gas *landfill* menggunakan teknologi *flaring* serta penyediaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) untuk dapat menekan penggunaan air tanah dan mengatasi krisis air bersih.

Dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, Kementerian PUPR telah menerapkan konsep infrastruktur yang mendukung upaya terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan memperhatikan aspek akses, kelayakan, pelayanan,

efisiensi material, dan konstruksi. Pemanfaatan teknologi *recycling asphalt* untuk pemeliharaan perkerasan aspal yang telah rusak merupakan salah satu alternatif untuk mempertahankan geometrik jalan tanpa perlu bergantung akan material baru. Pada pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, diterapkan penguatan struktur konstruksi dasar jalan dengan menggunakan konstruksi matras bambu serta pemasangan material pengalir vertikal pra-fabrikasi. Metode tersebut dilakukan untuk menyediakan infrastruktur jalan yang tidak hanya handal tetapi juga dapat berkelanjutan.

Kementerian PUPR hingga saat ini telah memberikan berkontribusi dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di

Indonesia. Namun, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi untuk dapat terus mengawal agar target terkait pengendalian iklim tercapai. Diperlukan perencanaan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi saat ini, namun juga dapat memproyeksikan segala perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan kajian yang mendalam. Selanjutnya, perlu disusun standar pembangunan serta penyesuaian pada pembiayaan infrastruktur PUPR yang dapat mendukung implementasi pembangunan infrastruktur yang berketahanan serta berkelanjutan. Pada akhirnya, segala upaya yang dilakukan Kementerian PUPR juga memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik K/L lainnya, pemerintah daerah, swasta dan akademisi. (**)

Sumber:

1. *Ekstrem Perubahan Iklim (2022)* : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika <<https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-perubahan-iklim>>
2. *Code Red-Asia Pacific's Time To Go Green (2021)*: Pricewaterhousecoopers
3. *Climate Risk Country Profile (2021)*: The World Bank Group and Asian Development Bank
4. *Infrastructure for Climate Action (2021)*: United Nations Office for Project Services.



Revitalisasi TPA dengan Konsep 3R dan Sanitary Landfill
Sumber : Kementerian PUPR, 2022

KUIS

Kuis Edisi 58 Mei-Juni 2022

**Peraturan apakah yang mengatur terkait
Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan
Infrastruktur Berbasis Pengembangan Wilayah ?**

- a. Permen PUPR No. 7 tahun 2021**
- b. Permen PUPR No. 18 tahun 2022**
- c. Permen PUPR No. 6 tahun 2022**
- d. Permen PUPR No. 15 tahun 2022**

Jawaban Kuis Edisi 57 Januari-Februari 2022
d. Bendungan Sepaku Semoi

Pemenang Kuis Edisi 57 Maret-April 2021
Dyta Puspitasari - Bandung
Diana Rika - Bekasi

Dua orang pemenang akan mendapatkan souvenir menarik dari BPIW. Jawaban disampaikan melalui email : hkkompu.bpiw@pu.go.id Jawaban juga dapat disampaikan melalui WhatsApp No: 0838-0874-7276 paling lambat tanggal 31 Agustus 2022 disertakan scan KTP, nomor kontak, dan alamat pengiriman souvenir. Jawaban dan nama pemenang akan diumumkan pada edisi 59, Juli-Agustus 2022



Djuang Fadjar Sodikin S.T., M.T., Ph.D.

Koordinator Evaluasi, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Kementerian PUPR

Bekerja dalam Tim Harus Saling Dukung

Pindah tugas dan mendapatkan pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda merupakan hal yang biasa bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu juga yang dialami Koordinator Evaluasi pada Pusat Pengembangan infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW Kementerian PUPR, Djuang Fadjar Sodikin, S.T., M.T., Ph.D.

Sebelum bergabung dengan BPIW pada awal 2022 lalu, pria kelahiran Cirebon, 12 Februari 1982 ini selalu ditempatkan di unit kerja yang menangani program dan anggaran. Hal itu dilakukannya sejak masuk Kementerian PU (sebelum menjadi Kementerian PUPR,red) pada tahun 2005 hingga akhir 2021, baik menjadi staf di Ditjen Cipta Karya maupun ketika ditempatkan di Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal.

Sejak Mei 2022, bapak dari tiga orang anak ini mendapat tugas baru di BPIW untuk menangani bidang evaluasi. Bidang pekerjaan tersebut tentunya sangat berbeda dengan lingkup pekerjaan sebelumnya. Saat mengurus anggaran, ia banyak disibukkan dengan

pengaturan pembagian alokasi anggaran berdasarkan pertimbangan kebutuhan dalam mencapai target-target sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Namun ketika harus mengurus bidang evaluasi, ia merasakan tugas dan peran yang berbeda.

Menurut Djuang, evaluasi biasanya merupakan kegiatan di belakang atau melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan atau *ex-post*, yang akan menjadi masukan bagi perencanaan di tahun berikutnya. Ke depan, evaluasi juga akan lebih banyak dilakukan pada saat pelaksanaan berjalan (*on-going*) untuk memberikan masukan tindakan korektif yang diperlukan, dan pada saat penyiapan kegiatan atau evaluasi *ex-ante*, terutama pada tahap perencanaan, untuk menjaga kualitas perencanaan agar benar-benar relevan dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan terkini.

Dari sisi mitra kerja di luar kementerian, pria yang hobi membaca buku ini menuturkan bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan anggaran, dalam kesehariannya lebih banyak bermitra dengan Kementerian Keuangan dan Kedeputan Pendanaan Pembangunan Bappenas. Ketika bergabung dengan BPIW lebih banyak berhubungan dengan Kedeputan Regional Bappenas yang lebih banyak menangani kebijakan kewilayahan.

“*Saya pribadi mencoba memosisikan diri lebih sebagai mitra kerja yang bekerja bersama-sama, bukan sebagai bos yang memberikan perintah dan tugas tanpa memberikan arahan jalan keluar untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut,”* ucap Djuang.

“Selain bertugas di urusan evaluasi, saya juga diminta pimpinan di BPIW untuk mendukung penyelenggaraan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil), terutama dalam menyiapkan konsepsi, perencanaan, dan aplikasi pendukungnya. Kepercayaan tersebut diberikan, kemungkinan karena pertimbangan pengalaman saya dalam menyelenggarakan Konsultasi Regional (Konreg) di



Foto Djuang saat menjadi moderator di acara Genmud BPIW 20 Januari 2022
Sumber : Kompu BPIW

Sekretariat Jenderal pada tahun 2021," ungkapnya saat dibincangi "Buletin Sinergi" beberapa waktu lalu.

Menurutnya, organisasi BPIW masih berusia muda, sehingga masih diperlukan banyak pengaturan yang perlu ditetapkan agar pekerjaan dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis, dan juga memiliki dasar pengaturan yang jelas. Bagi Djuang, hal itu merupakan tantangan tersendiri dan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian untuk diprioritaskan, termasuk dalam bidang evaluasi.

Dengan pengaturan yang baik, maka menurutnya tugas-tugas yang perlu dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, akan dapat terdefinisi dengan lebih jelas, termasuk hubungan antar unit kerja dan antar personil. Dalam melaksanakan kerja sehari-hari di BPIW, ia tidak mengalami kendala yang berarti, karena sudah mengetahui tugas dan fungsi BPIW sebelum ditempatkan di organisasi tersebut. Tidak hanya itu, ia juga telah mengenal banyak staf dan pimpinan BPIW sebelumnya, sehingga hal itu membantu pekerjaannya sehari-hari dan memudahkan proses adaptasi.

Dengan ditugaskan sebagai Koordinator Evaluasi, Djuang mendapatkan kepercayaan mengampu dua sub-koordinator dan sembilan orang staf. Baginya, mereka merupakan anak-anak muda potensial dengan etos kerja yang baik, karena sudah terseleksi dengan begitu ketat pada saat pendaftaran CPNS maupun saat seleksi sebagai konsultan individu.

"Di tengah-tengah mereka, saya pribadi mencoba memosisikan diri lebih sebagai mitra kerja yang bekerja bersama-sama, bukan sebagai bos yang memberikan perintah dan tugas tanpa memberikan arahan jalan keluar untuk menyelesaikan pekerjaan

tersebut," ucap Djuang. Baik berperan sebagai pribadi, pimpinan, maupun bawahan, prinsip yang dipegangnya adalah harus selalu menjadi bagian dari solusi, bukan justru menjadi beban. "Itu filosofi saya dalam bekerja dan itu saya terapkan sejak dulu," ungkapnya.

“Komunikasi internal yang terus dijaga dengan baik untuk membangun saling percaya dan saling dukung, juga untuk membuat suasana dalam tim menjadi menyenangkan untuk bekerja.”

Bicara soal adaptasi, menurut Djuang, adaptasi tidak hanya berlaku bagi dirinya kedalam tim, tapi timnya juga harus beradaptasi dengan ritme dan tuntutan kualitas kerja yang biasa ia jalani. Kualitas tinggi dari pelaksanaan tugas harus dipegang oleh semua anggota tim. Ritme kerja juga harus diselaraskan dengan tuntutan urgensi pekerjaan. Hal yang penting adalah komunikasi internal yang harus terus dijaga dengan baik untuk membangun rasa saling percaya dan saling dukung, juga untuk membuat suasana dalam tim menjadi menyenangkan untuk bekerja.

"Kesehatan mental sangat saya utamakan. Teman-teman di evaluasi harus menikmati pekerjaan dan jangan berlama-lama dalam keresahan dan kebingungan. Saya menekankan kepada teman-teman staf dengan kalimat "bingung itu tidak boleh lebih dari 10 menit!," tegasnya. Namun bukan 10 menitnya yang menjadi patokan, tapi pesan tersebut menekankan agar berani bertanya dan jangan sampai keresahan bertumpuk-tumpuk dan menjadi beban mental bagi pegawai. "Nikmati pekerjaan, maka pekerjaan itu akan menghadirkan energi tersendiri untuk mendukung kita menyelesaikannya," ujarnya.

Rutinitas Pekerjaan Tidak Bertambah Setelah Berlakunya Peraturan Menteri PUPR No.6 Tahun 2022

Menyinggung mengenai telah diberlakukan Peraturan Menteri (Permen) PUPR No.6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR.

Menurutnya, legalitas terkait perencanaan dan pemrograman sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Rakorbangwil dan RPIW yang dilakukan BPIW sudah sejalan dengan ketentuan, karena selama ini kegiatan tersebut merupakan rutinitas yang belum terlembagakan secara formal.

Namun lebih jauh lagi, Permen tersebut menuntut pemangku perencanaan untuk lebih disiplin dalam memastikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR selaras dan sejalan dalam mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan yang dihadapi. Ditetapkannya Permen tersebut menjadi momentum yang sangat baik untuk melakukan pembenahan, baik dari sisi substansi maupun teknis pelaksanaan Rakorbangwil dan penyusunan RPIW.

Bagi penyelenggaraan Rakorbangwil, selain memberikan legalitas, Permen tersebut memberikan arah yang lebih jelas dan lebih kuat dalam menyusun rencana penyelenggaraan Rakorbangwil kedepan. Dari "kacamata" Djuang, Permen itu memberikan gambaran hubungan Rakorbangwil dengan forum-forum perencanaan lain, juga ada arahan dokumen-dokumen yang harus menjadi masukan, pihak-pihak yang harus dilibatkan, hingga pada tanggung jawab penyepakatan hasil Rakorbangwil.

"Amanat Permen perencanaan dan pemrograman bagi BPIW untuk menyusun RPIW memberi arahan yang tegas dalam menentukan bentuk dokumen rencana yang harus disiapkan. Selama ini jenis dokumen rencana yang beredar di lingkungan BPIW cukup beragam, baik dalam bentuk MPDP, RIPI, RPIJM, dan

lain-lain," ujarnya. Dengan adanya penyeragaman dalam bentuk RPIW tersebut menurutnya akan menjamin kepastian dan keselarasan substansi antar dokumen rencana, baik secara hirarki perencanaan maupun antar wilayah/kawasan.

“ Dengan terbitnya Permen tersebut tugas sehari-hari tidak akan terlalu banyak bertambah, hanya memerlukan pembenahan agar lebih terstruktur. ”

Keselarasan atau konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan menjadi salah satu tujuan diterapkannya Permen tersebut. Oleh karena itu harus ada perangkat yang dapat menilai dan mengawal keselarasan tersebut, antara lain melalui pengembangan sistem informasi yang tepat. Konsistensi yang perlu dilihat tidak hanya secara tabular, namun harmonisasi secara spasial juga tidak boleh dilupakan mengingat BPIW memiliki tugas dalam menerapkan pendekatan pengembangan wilayah.

Hal yang lebih penting dan menjadi prasyarat agar sistem informasi tersebut dapat berjalan dengan baik adalah mendapatkan kesepahaman dan kesepakatan di tingkat operasionalisasi dari Permen tersebut. Misalnya dalam mengawal konsistensi antara hasil Rakorbangwil, Konreg, Renja-K/L, dan RKA-K/L, maka yang harus terlebih dahulu dilakukan adalah membangun pemahaman bersama dan kesepakatan antara BPIW, Biro PAKLN, dan Unit Organisasi terkait untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat saling terhubung, sehingga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan akan dapat terlacak dengan lebih mudah.

Dengan terbitnya Permen tersebut, menurutnya tugas sehari-hari tidak akan terlalu banyak bertambah, hanya memerlukan pembenahan agar lebih terstruktur. Sebagai contoh penyusunan RPIW, yang sebenarnya pekerjaan ini bukan pekerjaan yang benar-benar baru yang harus dimulai dari nol. Sebagian substansinya bisa jadi hanya memerlukan penyesuaian dari hasil-hasil studi atau perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya.



Djuang Sodikin saat menerangkan mengenai pekerjaan yang dilakukannya sehari-hari
Sumber : Kompu BPIW



Djuang Sadikin foto bersama dengan para pejabat di BPIW dan Ditjen Bina Marga setelah kegiatan Internalisasi Pemahaman Infrastruktur PUPR
 Sumber : Kompu BPIW

Selebihnya, Permen tersebut mengatur pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah rutin dilakukan setiap tahunnya, misalnya Rakorbangwil. Hanya memang perlu dilakukan penyesuaian agar sejalan dengan amanat Permen tersebut. Jadi menurutnya, tidak ada pekerjaan yang benar-benar baru ada sebagai akibat dari ditetapkanya Permen tersebut.

"Untuk menunjang kinerja di BPIW, pada intinya kita harus terus meningkatkan kapasitas diri, terus belajar banyak hal yang terkait dengan bidang tugas BPIW. Selain itu, kita juga harus meningkatkan kemampuan dalam hal komunikasi, baik untuk keperluan internal Kementerian PUPR maupun untuk keperluan koordinasi lintas kementerian/lembaga," tuturnya.

Berusaha Membuat Terobosan

Tidak sekedar melaksanakan pekerjaan secara rutin, Djuang pun berupaya membuat terobosan yang akan bermanfaat bagi BPIW. Salah satu terobosan yang akan dilakukan adalah membuat sistem informasi yang membantu bidang tugas Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional yang mengkoordinir perencanaan infrastruktur PUPR di seluruh Indonesia. "Begitu banyaknya bidang tugas yang dilakukan jadi harus punya sistem informasi yang bagus, terutama untuk melihat kesesuaian dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Kita akan bekerja sama dengan Sekretariat BPIW dan kita siapkan aplikasi yang memantau itu," ucapnya.

“ Salah satu terobosan yang akan dilakukan adalah memperbarui sistem informasi yang membantu bidang tugas Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional yang mengkoordinir perencanaan infrastruktur PUPR di seluruh Indonesia. ”

Dengan adanya sistem informasi yang terkoneksi dalam satu aplikasi, maka akan terjalin sistem perencanaan yang terpantau *real time* dan proses koreksi bisa langsung dilakukan baik pada tahap penganggaran maupun pelaksanaan. "Misalnya ada satu tugas yang wajib dilakukan tapi di anggaran tidak ada alokasinya, itu bisa langsung kita koreksi," imbuhnya.

Dengan sekian banyak pekerjaan yang harus dilakukan, Djuang selalu mengedepankan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. "Di kantor, ada pekerjaan yang harus dituntaskan dengan penuh tanggung jawab, dan di rumah juga ada istri dan anak-anak yang harus diperhatikan," ucapnya.

Ketika mendapat kesempatan untuk cuti, Djuang selalu pergunkan untuk menjalin kebersamaan dengan keluarga. Baginya, kebersamaan dengan keluarga merupakan sumber energi yang memberinya semangat tersendiri yang sangat berguna saat kembali bekerja, sehingga produktivitas bekerja semakin meningkat. **(Hendra Djamal)**



Delapan Tips Sehat Kerja Lama di Depan Komputer

Sumber : unsplash.com

Terkadang pekerjaan menuntut untuk duduk depan laptop atau komputer selama berjam-jam. Hal itu bahkan menjadi rutinitas banyak kalangan.

Dirangkum dari berbagai sumber, ingatlah jika terlalu lama di depan komputer atau laptop dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Mulai dari risiko penambahan berat badan karena kurang gerak, sakit kepala atau pusing, pegal di area leher, pinggang dan bahu hingga mata lelah.

Radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh layar komputer atau laptop dapat menyebabkan mata mengalami kelelahan dan gangguan mata lainnya. Agar bisa tetap sehat meski harus bekerja di depan laptop atau komputer sehari-hari, coba delapan tips sehat ini.

1

Atur Kecerahan Layar Monitor

Aturlah posisi dan kecerahan layar monitor sesuai dengan posisi yang paling nyaman. Jangan mengatur tampilan layar menjadi terlalu cerah atau terlalu gelap agar tidak kesulitan dalam melihat monitor.



Sumber : unsplash.com



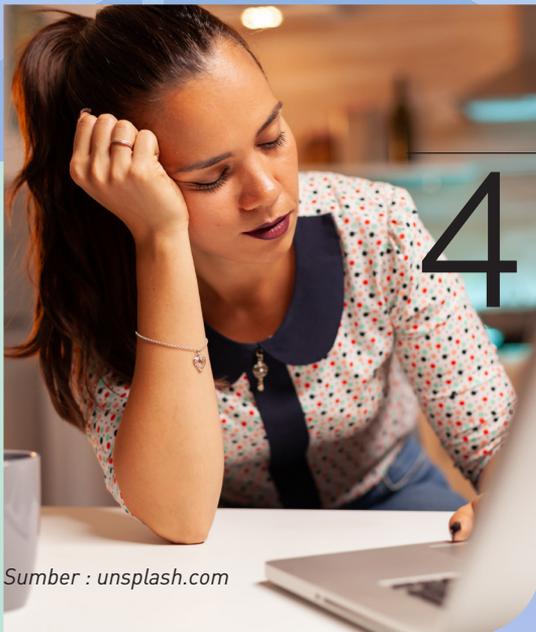
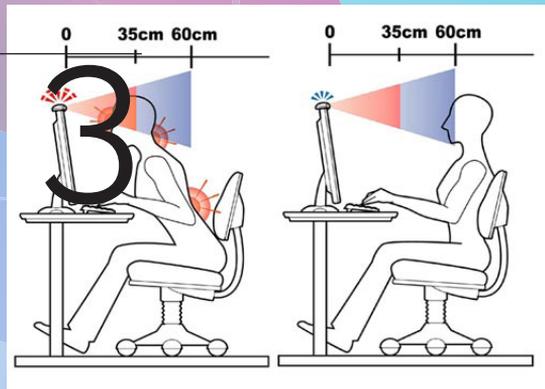
Sumber : aliexpress.com

Atur Jarak Pandang Mata

Aturlah jarak antara mata dengan monitor, idealnya jarak mata dengan monitor yang aman adalah 50 - 100 cm. Jangan memasang monitor terlalu dekat dengan mata kita karena akan membuat mata cepat lelah.

Gunakan Screen Protector

Usahakan untuk memasang screen protector untuk mengurangi pancaran radiasi dari layar monitor ke mata. Dengan memasang pelindung layar, mata Anda jadi tidak cepat lelah saat melihat layar monitor.



Sumber : unsplash.com

Istirahatkan Mata

Secara normal manusia akan berkedip sebanyak 18 kali selama satu menit, namun saat menatap layar monitor, mata kita akan lebih jarang berkedip. Maka dari itu usahakan setiap 1 jam sekali istirahatkan mata. Cukup 5 menit saja tidak melihat monitor agar mata tidak mudah iritasi atau mudah lelah. Cobalah olahraga mata (menggerakkan bola mata ke atas, bawah, samping) sebagai stimulasi otot mata.

Sumber : kompasiana.com

Alihkan Pandangan

Saat menatap monitor mata hanya akan tertuju pada satu objek saja. Usahakan untuk mengalihkan pandangan sejenak dari monitor. Misalnya, melihat pemandangan di sekeliling, bahkan lebih baik jika ada pepohonan hijau di sekitar. Lakukan hal ini agar mata tidak lelah sekaligus untuk mengusir kepenatan yang membuat kepala pusing.



Sumber : elemen.envato.com

Periksa Mata Rutin

Lakukan pengecekan mata (*check up*) dan konsultasi kepada dokter spesialis mata untuk mengetahui kondisi kesehatan mata yang paling akurat. Usahakan periksa setiap 3 bulan sekali supaya jika suatu saat ada keluhan, bisa segera mendapat penanganan yang tepat dari ahlinya.



Sumber : elemen.envato.com

Konsumsi Buah dan Sayur

Buah-buahan yang memiliki kandungan vitamin A sangat bagus dan baik bagi kesehatan mata. Perbanyaklah mengonsumsi buah dan sayur yang kaya akan kandungan vitamin A sebagai investasi untuk kesehatan mata di masa depan.



Sumber : elemen.envato.com

Gunakan Kursi Lipat dengan Sandaran saat Lesehan di Lantai

Ini dia salah satu tempat favorit untuk kerja atau nonton di laptop yaitu lesehan di lantai. Namun kalau berlama-lama duduk di lantai apa lagi tanpa meja atau penopang laptop yang pas, dijamin punggung hingga tulang ekor akan terasa sakit. Solusinya, gunakan kursi lipat lesehan lantai yang empuk.**)

Selamat Hari Lahir **PANCASILA**

1 Juni 2022

*“Bangkit Bersama
Membangun Peradaban Dunia”*



BIDIK LENSA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR terpadu guna pengembangan suatu kawasan dan wilayah di Tanah Air.

Rencana dan program yang disiapkan antara lain pembangunan jalan nasional, rehabilitasi jalan, pembangunan jembatan, pembangunan sarana dan prasarana penunjang, pembangunan rumah khusus serta pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur permukiman.

Pada edisi ini rubrik Bidik Lensa memotret pembangunan yang dilakukan jajaran Kementerian PUPR yang akan diresmikan pemanfaatannya pada Juli 2022. (**)



Renovasi Arena Para Games 2022
Kementerian PUPR saat ini sudah menyelesaikan renovasi berbagai sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan ASEAN Para Games 2022 di Kawasan Stadion Manahan, Surakarta.



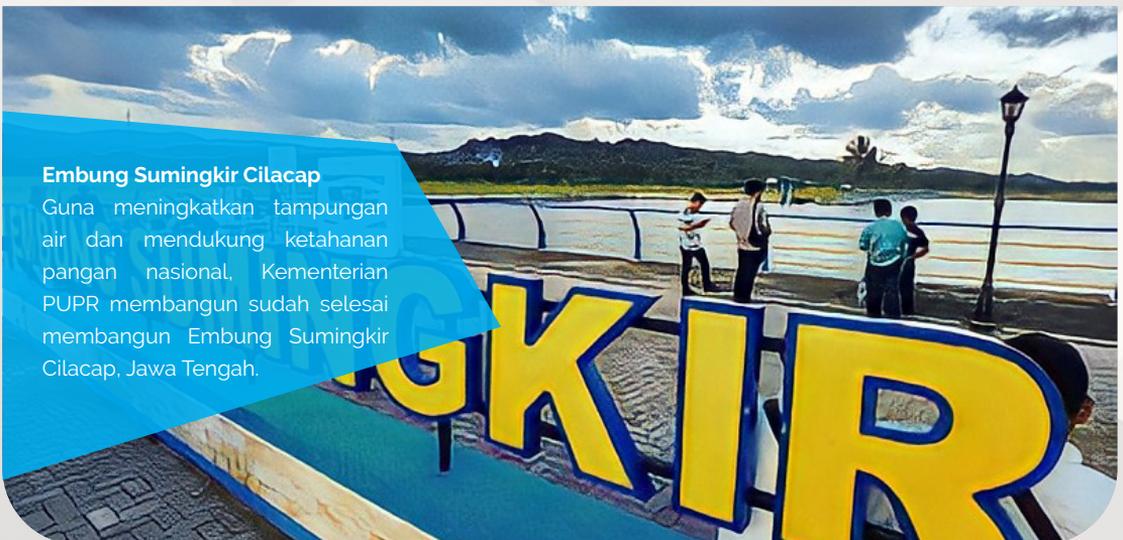
Asrama Mahasiswa Nusantara

Kementerian PUPR saat ini telah menyelesaikan pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) di Kota Surabaya, Jawa Timur yang menjadi hunian bersama bagi mahasiswa penerima beasiswa pendidikan dari berbagai daerah yang berkuliah di Surabaya dan sekitarnya.



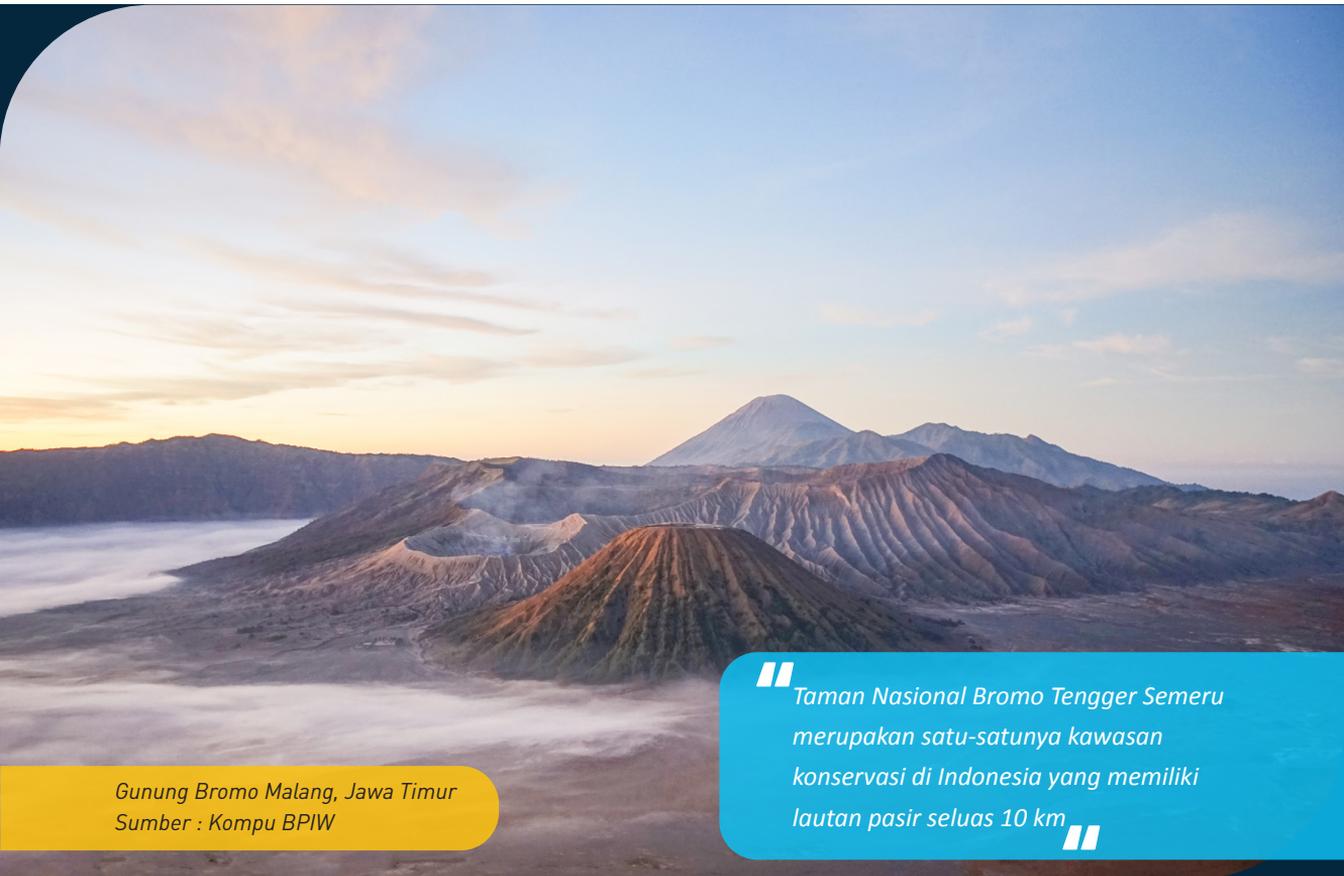
Jalan Lingkar Timur Kuningan

Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan sepanjang 7,24 kilometer di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.



Embung Sumingkir Cilacap

Guna meningkatkan tampungan air dan mendukung ketahanan pangan nasional, Kementerian PUPR membangun sudah selesai membangun Embung Sumingkir Cilacap, Jawa Tengah.



Gunung Bromo Malang, Jawa Timur
Sumber : Kompu BPIW

“Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan satu-satunya kawasan konservasi di Indonesia yang memiliki lautan pasir seluas 10 km”

Panorama Indah Bromo Tengger Semeru

Sebagai daerah vulkanik terbesar di provinsi Jawa Timur, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan salah satu bagian Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas. Destinasi wisata ini menawarkan perpaduan kekayaan lanskap dan budaya yang khas.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan satu-satunya kawasan konservasi di Indonesia yang memiliki lautan pasir seluas 10 km yang disebut Tengger, yang memiliki empat anak gunung berapi yakni Gunung Batok (2.470 m), Gunung Kursi (2.581 m), Gunung Watangan (2.661 m), dan Gunung Widodaren (2.650 m). Namun, hanya Gunung Bromo lah satu-satunya yang masih aktif. Temperatur di puncak Gunung Bromo berkisar 5-18 derajat Celcius. Bila Anda menuju ke arah Selatan, maka Anda akan menemukan dataran terjal yang terbelah oleh lembah

dan dihiasi dengan danau-danau yang indah hingga mencapai kaki Gunung Semeru.

Untuk mencapai kawasan tersebut dapat menggunakan pesawat terbang, kereta, maupun dengan kendaraan roda empat. Perjalanan dari Jakarta ke Bromo misalnya, berjarak ± 880 km bila melalui jalur darat dan dapat menggunakan mobil pribadi lewat jalan tol Trans Jawa yakni Jakarta – Surabaya – Pasuruan – Probolinggo yang memakan waktu sekitar 11-12 jam. Demikian juga bila ke Bromo dari Jakarta

melalui Malang dengan jalan darat, maka tidak banyak selisih waktu yang dibutuhkan.

Alternatif lain, dengan menggunakan kereta api dengan pemberhentian di stasiun Kota Malang atau Surabaya. Jika dari Jakarta ke Malang turun di Stasiun Kota Lama/Kota Baru. Sedangkan kereta Jakarta – Surabaya bisa turun di Stasiun Pasar Turi atau Stasiun Gubeng. Sedangkan untuk yang memilih naik pesawat dari Jakarta ke Bromo bisa turun di Bandara Abdul Rahman Soleh Malang atau Bandara Internasional Juanda Surabaya. Selanjutnya dapat menyewa mobil ke Bromo atau *booking* paket wisata ke Bromo untuk lebih mempermudah perjalanan Anda.

Terdapat 3 jalur masuk menuju Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jalur pertama melalui Desa Ngadisari. Jalur kedua Anda dapat mengambil jalur timur laut melalui Pasuruan, tepatnya melalui Desa Tosari. Jalur ketiga yang cukup menantang adalah melalui Ngadas.

Jalur paling populer dan yang paling mudah adalah melalui Probolinggo, terutama bagi Anda yang menggunakan moda transportasi bus umum. Rute Wonogiri adalah rute terdekat dan termudah jika Anda berangkat menggunakan kendaraan pribadi dari arah Surabaya berkisar lima jam perjalanan.

Sebagian besar grup wisata dari Surabaya menginap di sejumlah hotel di Tretes. Selain pilihan hotelnya cukup banyak, tempat ini juga dekat dengan bandara. Atau Anda dapat menghubungi agen perjalanan untuk mengatur rencana perjalanan wisata. Banyak turis memilih untuk berjalan kaki ketika mereka berada di wilayah Taman Nasional. Terdapat jalur yang telah ditandai untuk memudahkan Anda melintasi lautan pasir menuju ke kaki Gunung Bromo. Anda juga dapat menyewa mobil Jeep atau Kuda dari Cemoro Lawang untuk berkeliling.

Berikut tujuh destinasi yang wajib dikunjungi jika berwisata ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru:

1. Semeru

Gunung Semeru merupakan gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa. Puncaknya yang bernama Mahameru berada di ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl). Karakter Gunung Semeru yaitu setiap 10 sampai 15 menit sekali meletupkan material abu dan

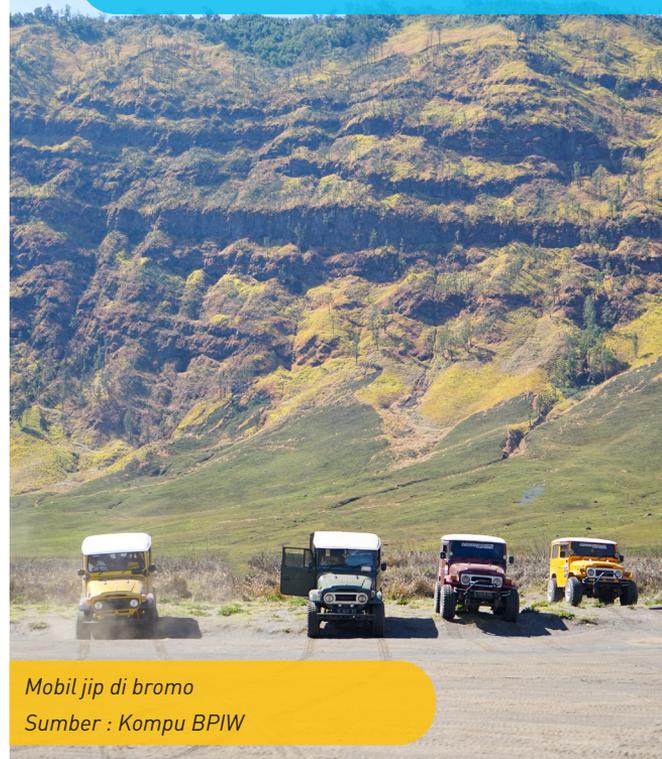
pasir. Menjadi puncak tertinggi Jawa, gunung dengan julukan Puncak Para Dewa ini selalu menjadi sasaran pendakian dari berbagai daerah, bahkan pendaki mancanegara.

2. Puncak Penanjakan

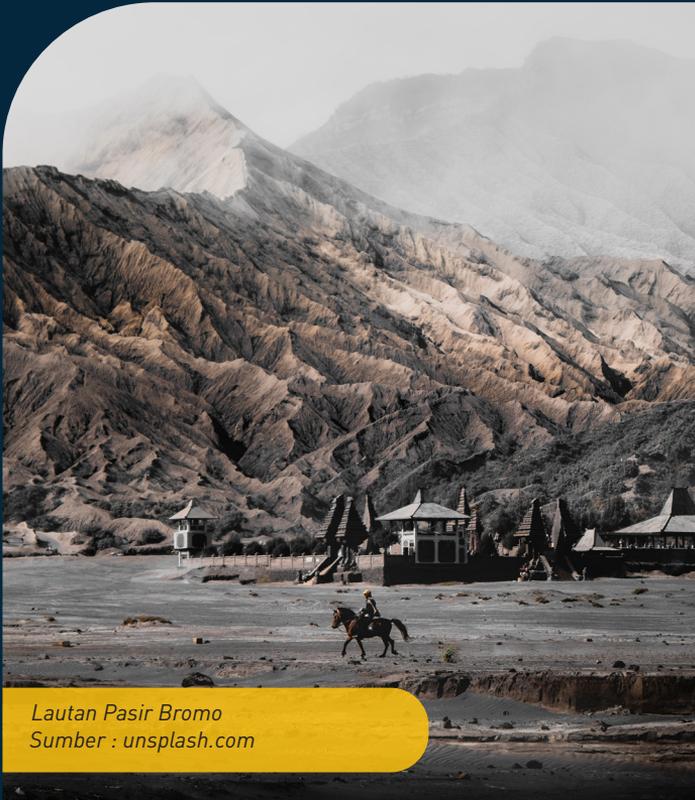
Puncak Penanjakan berada pada ketinggian 2.700 mdpl. Puncak Penanjakan merupakan tempat tertinggi di kompleks Pegunungan Tengger.

Tempat itu diburu oleh wisatawan untuk menikmati matahari terbit atau *sunrise*. Dari tempat itu, wisatawan juga bisa menikmati lanskap Gunung Bromo dari atas dengan latar Gunung Semeru di belakangnya.

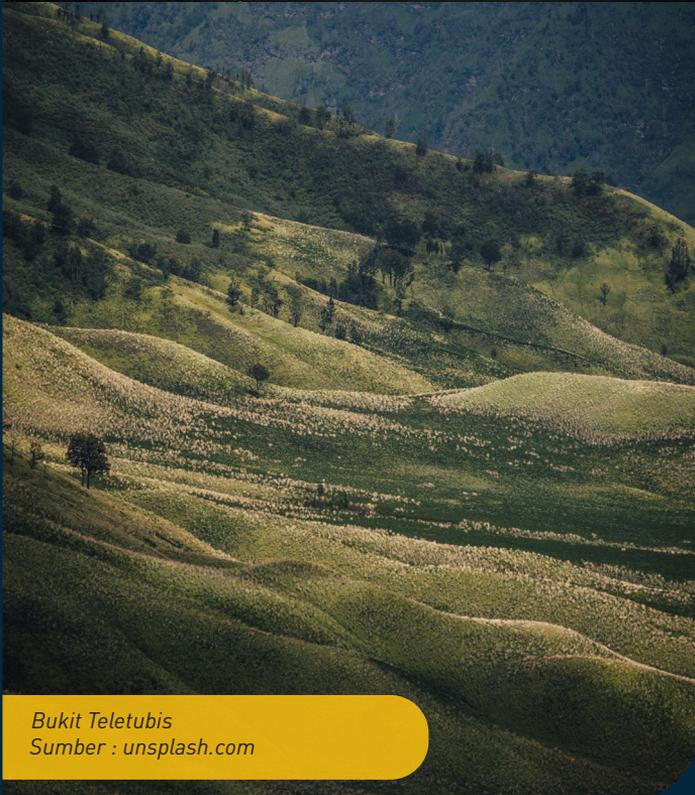
“ Untuk mencapai kawasan tersebut dapat menggunakan pesawat terbang, kereta, maupun dengan kendaraan roda empat. ”



Mobil jip di bromo
Sumber : Kompu BPIW



Lautan Pasir Bromo
Sumber : unsplash.com



Bukit Teletubis
Sumber : unsplash.com

“
Banyak turis memilih untuk berjalan kaki ketika mereka berada di wilayah Taman Nasional. Terdapat jalur yang telah ditandai untuk memudahkan Anda melintasi lautan pasir menuju ke kaki Gunung Bromo.
”

3. Lautan Pasir Bromo

Salah satu keindahan lainnya di kawasan Bromo adalah Lautan Pasir. Lautan Pasir Bromo merupakan hamparan pasir yang berada di sekitar kaldera Tengger Gunung Bromo. Di kaldera itu terdapat lima gunung, yaitu Gunung Bromo, Kursi, Batok, Watangan, dan Widodaren. Lautan Pasir menjadi perlintasan wisatawan saat mengunjungi masing-masing destinasi di kawasan itu. Lautan Pasir di Bromo dikenal dengan pasir berbisik. Sebab saat angin bertiup, butiran pasir terbang seakan menyerukan bisikan.

4. Bukit Teletubbies

Bukit Teletubbies adalah salah satu padang rumput yang terletak di sebelah selatan Kawah Gunung Bromo. Tempat itu mempunyai daya tarik besar bagi wisatawan. Bukit Teletubbies dengan keindahannya memiliki pemandangan bukit bergelombang yang diselubungi oleh rumput hijau seperti dekat dengan awan putih dan warna langit yang biru nan indah yang jarang dijumpai di tempat lain.

5. Bukit Kedaluh

Bukit Kedaluh berada di bawah atau sebelum Puncak Penanjakan. Di tempat ini, wisatawan dapat menyaksikan pemandangan ke arah Lautan Pasir sama seperti di Puncak Penanjakan. Tempat itu sebagai alternatif destinasi jika Puncak Penanjakan penuh dengan wisatawan. Obyek ini berkembang sebagai upaya pengalihan pengunjung yang padat di Penanjakan.

6. Bukit Cinta

Bukit Cinta berada di bawah Bukit Kedaluh, pada ketinggian 2.680 mdpl. Saat berkunjung ke lokasi ini, wisatawan bisa melihat lanskap Lautan Pasir dan Gunung Bromo lebih dekat. Keberadaan Bukit Cinta dapat menambah poin untuk menikmati *sunrise* dan menyaksikan keindahan alam ke arah Lautan Pasir seperti dari Penanjakan maupun Bukit Kedaluh.

7. Pura Agung Poten

Pura Agung Poten yang berada di tengah-tengah Lautan Pasir. Pura ini merupakan salah satu pusat peribadatan umat Hindu Tengger. Keberadaan Pura Agung dekat dengan lokasi Kawah Gunung Bromo.

Pesona Budaya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Selain semua keindahan alamnya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga memiliki pesona kebudayaan. Desa Ngadas yang tenang di lereng Gunung Bromo, akan memberikan Anda pengalaman kebudayaan yang menyenangkan dan sayang untuk dilewatkan. Terletak di dataran tinggi, yang hanya berjarak 6,5 km dari Gunung Bromo, suhu rata-rata di desa tersebut sekitar 0 - 25 derajat Celcius, dengan udara yang menyegarkan. Penduduk desa yang sebagian besar adalah penduduk asli Tengger, masih mempraktikkan ritual dan upacara tradisional yang diyakini akan membawa keamanan, nasib baik, dan kemakmuran.

Hal ini terjadi, karena sebagian besar penduduk asli Tengger menganut agama Hindu. Oleh karena itu, Anda dapat dengan mudah menemukan sejumlah Pura Hindu di sekitar wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk menyaksikan keindahan sejarahnya. Selain Pura Agung Poten juga ada Pura Kidal, Pura Agung Mandara Giri Semeru, dan Pura Jago. **(Hendra/berbagai sumber)**



Pura Agung
Sumber : unsplash.com

“*Selain semua keindahan alamnya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga memiliki pesona kebudayaan. Ngadas desa yang tenang di lereng Gunung Bromo, akan memberikan Anda pengalaman kebudayaan yang menyenangkan*”



Embung Imogiri
Sumber : PUPR 2021

Destinasi Wisata Embung Imogiri, Infrastruktur Penampungan Air Unik

Embung sejatinya dibangun dengan tujuan utama menyediakan sarana yang mampu menampung air sebagai upaya perlindungan dan pelestarian sumber air. Sehingga, embung bermanfaat untuk pengawetan air yang dapat dimanfaatkan pertanian dan kebutuhan warga sekitar. Hanya saja, pembuatan embung juga dapat menambah nilai estetika dan bermanfaat untuk destinasi wisata.

Hal itu terjadi seperti pada pembangunan Embung Imogiri di Dusun Karang Kulon, Kelurahan Wukirsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Embung ini mampu menambah destinasi wisata di Yogyakarta Selatan, tepatnya di Kabupaten Bantul. Sebab, Embung Imogiri cocok untuk rekreasi dengan keluarga.

budaya lokal dengan desain berbentuk gunung wayang. "Embungnya menurut saya bagus dengan desainnya yang artistik melambangkan gunung wayang," ujarnya. Embung Imogiri dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak Ditjen Sumber Daya Air pada tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp 7,9 miliar.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau Embung Imogiri di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, waktu lalu menyampaikan, pembangunan embung yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) merupakan upaya untuk terus meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia. Penyediaan sarana dan prasarana air untuk ketahanan air dan ketahanan pangan.

Basuki mengapresiasi pembangunan Embung Imogiri yang mengadopsi unsur



Warga menabur benih ikan di Embung Imogiri
Sumber : bantulkab.go.id

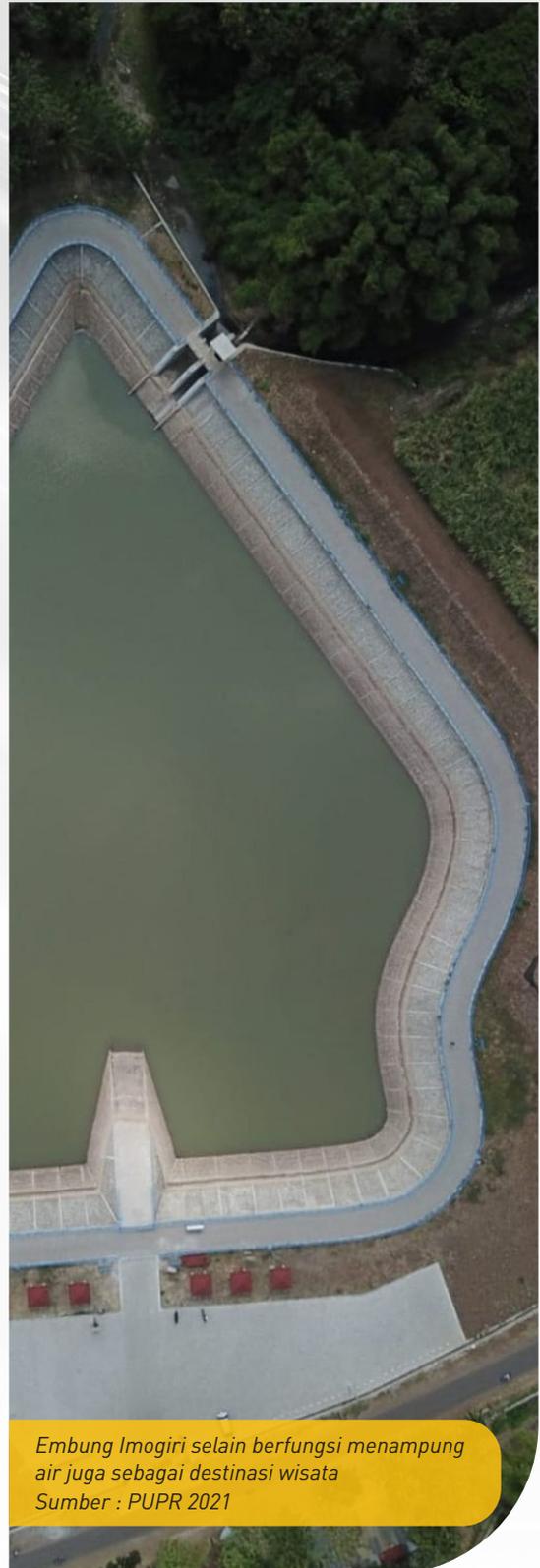
Memiliki kapasitas tampung sebesar 64.099 meter kubik dengan luas genangan 1,13 hektar, dan manfaat utama untuk konservasi air dan pengendalian banjir, serta menjadi destinasi wisata baru. Selain Embung Imogiri, di Provinsi DIY juga telah selesai dibangun Embung Imogiri II di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 dengan biaya Rp 12 miliar dengan kapasitas tampung 26.848 meter kubik dan luas genangan 0,685 hektar. Embung selanjutnya yang juga telah dibangun di Provinsi DIY adalah Embung Mualimin di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 dengan biaya Rp 6,1 miliar dengan kapasitas tampung 1.200 meter kubik dan luas genangan 0,0578 hektar. Terakhir, di Kabupaten Sleman terdapat Embung Sendangtirto yang juga telah dibangun pada 2020 dengan biaya Rp 8,6 miliar dengan kapasitas tampung 9.716 meter kubik dan luas genangan 0,485 hektar.

Salah satu alasan dibuatnya embung di Bantul ini yaitu untuk mengantisipasi banjir seperti yang pernah terjadi di Imogiri tahun 2019. Awalnya lokasi tersebut digunakan sebagai tampungan air yang dapat terjadi akibat meluapnya Kali Celeng.

Sementara itu, dikutip dari bantulkab.go.id terdapat beberapa komunitas yang menebar benih ikan di embung tersebut. Ikan tersebut nantinya diharap dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Pengunjung tak hanya bisa menikmati suasana Embung Imogiri. Saat ini, Embung Imogiri juga menjadi tujuan bagi orang-orang yang ingin melakukan aktivitas olahraga seperti jogging karena memang ada jogging track mengelilingi embung.

Pengunjung bakal menemukan sarana kuliner menarik. Peralnya di sekitar Embung Imogiri, banyak sekali kuliner yang diujakan pada pagi dan sore hari. Para pedagang akan berjualan mulai dari makanan zaman dulu hingga makanan kekinian.

Nah, khusus Minggu pagi, terdapat juga makanan tradisional yang mulai jarang ditemui. Pengunjung bisa bernostalgia dengan jajanan tempo dulu seperti gatot, tiwul, jenang, jamu, dan kuliner khas Yogyakarta lainnya. Makanan tersebut sangat cocok dimakan sambil menikmati suasana Imogiri yang dikelilingi pegunungan serta kabut yang menambah suasana sejuk di pagi hari.**(ris/berbagai sumber)**



*Embung Imogiri selain berfungsi menampung air juga sebagai destinasi wisata
Sumber : PUPR 2021*



Pesan Pembaca

Perwakilan Pemuda Kecamatan Geumpang

Kabupaten Pidie, Aceh

Kami segenap warga Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Aceh berharap Kementerian PUPR dapat memperhatikan kondisi jalan antar Desa Pucok - Lupu mulai dari Dusun Toklo sampai ke Dusun Lhok Meleuweuk, Desa Lupu. Selain itu ada bendungan irigasi yang tidak berfungsi di daerah Geumpang Pucok padahal irigasi tersebut sumber air besar bagi pertanian di wilayah Geumpang, sampai saat ini belum tersentuh atau ditangani oleh pemerintah daerah setempat. Besar harapan kami agar aspirasi masyarakat Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie Aceh dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Wassalam

Tanggapan dari BPIW

Kementerian PUPR selalu terus berupaya untuk menyediakan infrastruktur yang andal dan memenuhi standar, terutama untuk mendukung kebutuhan masyarakat secara umum. BPIW sesuai dengan tugas dan fungsinya, mendukung pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur melalui penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Aduan yang Saudara sampaikan akan kami teruskan kepada unit terkait yaitu Direktorat Bina Marga dan Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.

Bagi sahabat Sinergi yang ingin menyampaikan saran dan masukan dapat di kirim ke email hkkompu.bpiw@pu.go.id atau Whatsapp **0838-0874-7276**

Pelayanan Data dan Informasi Pengembangan Wilayah



1 SIAPKAN

- Mengisi *form* permohonan informasi (*form* dapat di *download* di <http://bpiw.pu.go.id/contact>).
- Fotokopi identitas (SIM/KTP).
- Harus menyertakan Surat pengantar instansi yang menyatakan keperluan permohonan data.



2 AJUKAN

Ajukan berkas permohonan pada jam kerja [08.00-16.30] ke salah satu dari *channel* berikut:

- Booth* layanan informasi BPIW di Lobby Gedung G BPIW (kepada petugas jaga atau melalui kotak saran dan pengaduan).
- Website* BPIW: (<http://bpiw.pu.go.id/contact>).
- Email: hkkompu.bpiw@pu.go.id
- Whatsapp: **0838-0874-7276**.
- Stand* layanan informasi di acara atau pameran BPIW.

3 TUNGGU

Tunggu selama permohonan Anda diproses :

- Verifikasi informasi publik/ informasi dikecualikan (untuk permohonan informasi).
- Proses pengumpulan informasi paling lambat 10 hari dan dapat diperpanjang selama 7 hari dengan pemberitahuan.
- Proses tidak dipungut biaya.

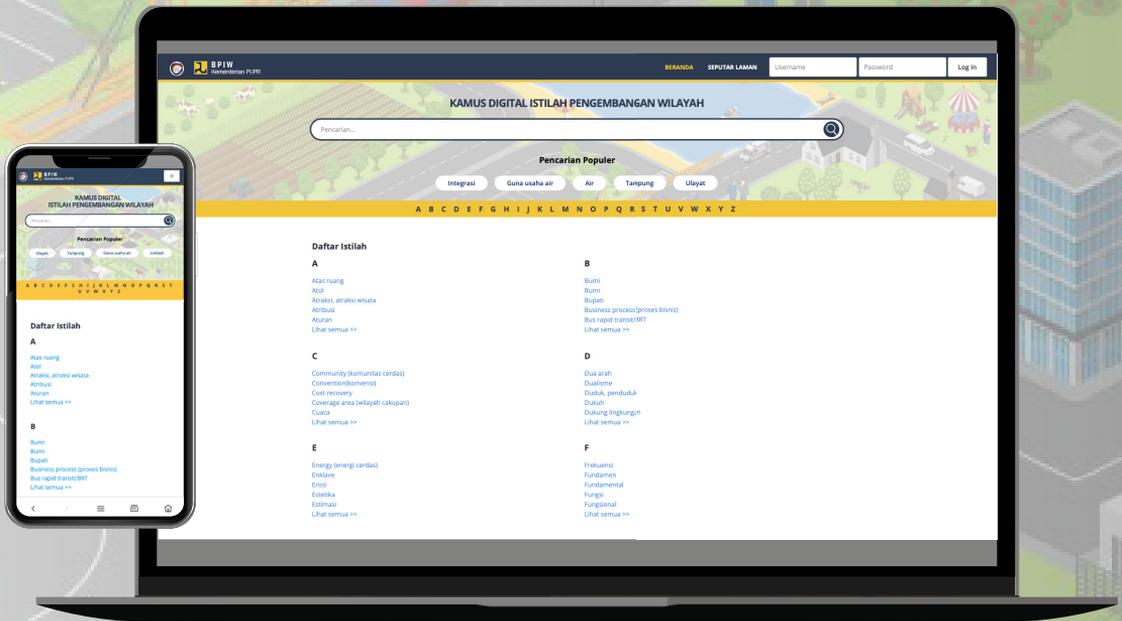


4 TERIMA

- Pemohon menerima jawaban dari Bagian Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik BPIW.
- Puas - selesai .
- Tidak puas - pemohon dapat mengajukan keberatan yang diajukan kepada *channel-channel* di atas.

Hubungi kami :

KAMUS DIGITAL ISTILAH PENGEMBANGAN WILAYAH



Selengkapnya
Cek QR!



 @pupr_bpiw

 @pupr_bpiw

 PUPR_BPIW

 Facebook fanpage : BPIW Kementerian PUPR



www.bpiw.pu.go.id